



Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Laporan Akhir

ISLAM, INDONESIA & TIONGKOK:

Analisis Potensi Peningkatan *People to People Connectivity*
Antara Indonesia-Tiongkok Perspektif Elite Muslim Indonesia



2020

LAPORAN AKHIR

ISLAM, INDONESIA & TIONGKOK;

Analisis Potensi Peningkatan *People to People Connectivity*
Antara Indonesia-Tiongkok Perspektif Elite Muslim
Indonesia

TIM RISET

Abid Rohman

M. Chabib Mustofa

M. Fathoni Hakim

M. Qobidl Ainul Arif

Ridha Amaliyah

Rizki Rahmadini Nurika

Zaky Ismail



Kerjasama Penelitian dan Pengkajian (*Joint Research*)

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia dengan UIN Sunan Ampel Surabaya

2020



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENELITI KEMITRAAN FISIP UINSA-BPPK KEMLU RI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi pandangan elit muslim Indonesia terhadap relasi Islam-Indonesia-Tiongkok dan pandangan tokoh muslim Tionghoa Indonesia dalam melihat relasi Islam-Indonesia-Tiongkok;
 - b. Bahwa untuk mendeskripsikan peluang, kendala dan dampak relasi Islam-Indonesia-Tiongkok dalam meningkatkan *people to people connectivity* antara kedua negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dilaksanakan penelitian kemitraan kerjasama FISIP UINSA dengan BPPK KEMLU RI dengan menunjuk kelompok kerja peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMA Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG KELOMPOK KERJA PENELITI KEMITRAAN FISIP UINSA-BPPK KEMLU RI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Peneliti Kemitraan FISIP UINSA_BPPK KEMLU RI sebagaimana nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Peneliti Kemitraan FISIP UINSA_BPPK KEMLU RI adalah menghasilkan penelitian yang bisa digunakan sebagai alternatif kebijakan luar negeri Indonesia dalam meningkatkan *people to people connectivity* antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka diplomasi politik
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penelitian dimaksud, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
REKAM:

M. MUZAKKI

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 37 TAHUN 2020

Tanggal : 30 Juli 2020

KELOMPOK KERJA PENELITI KEMITRAAN FISIP UINSA-BPPK KEMLU RI

Penanggung Jawab : Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.

Ketua : Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si

Koordinator : Moh. Fathoni Hakim, M.Si

Anggota : 1. Zaky Ismail, M.Si
2. Muhammad Qobidl Ainul Arif
3. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
4. Rizki Rahmadini Nurika, MA
5. Ridha Amaliyah, S.IP, MBA



KATA PENGANTAR

Puji syukur *al-hamdulillah*, penelitian dengan tema “*Islam, Indonesia & Tiongkok: Analisis Potensi Peningkatan People to People Connectivity Antara Indonesia – Tiongkok Perspektif Elite Muslim Indonesia*” telah selesai dilaksanakan.

Penelitian ini adalah kajian kemitraan strategis antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BPPK Kementerian Luar Negeri RI dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Peneliti untuk melakukan kajian ini.

Peneliti memilih tema ini karena melihat hubungan Indonesia – Tiongkok di level atas (pemerintah) saat ini tidak berbanding lurus dengan hubungan Indonesia – Tiongkok di level bawah (masyarakat). Peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua negara belum diimbangi dengan stigma positif Tiongkok di masyarakat Indonesia. Phobia masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok cukup beralasan mengingat isu komunisme di Indonesia dan isu kemanusiaan di Xinjiang rupanya masih menjadi batu sandungan besar dalam relasi masyarakat kedua negara. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok yang komunis dan anti-agama seolah melekat dan susah untuk dilepaskan.

Kedua, Dari sisi Tiongkok pun demikian, phobia terhadap masyarakat kita juga masih kuat mengingat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang belum maksimal. Permasalahan di level bawah ini jika tidak bisa dikelola oleh baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok akan menjadi ‘kerikil dalam sepatu’ yang sangat mengganggu, atau bahkan menjadi ‘api dalam sekam’ yang sewaktu-waktu bisa terbakar. Lebih-lebih adanya kepentingan eksternal yang merasa tidak senang dengan keberadaan hubungan Indonesia – Tiongkok yang harmonis. Provokasi dan pembentukan opini publik sino-phobia di Indonesia menjadi niscaya dilakukan oleh kelompok berkepentingan.

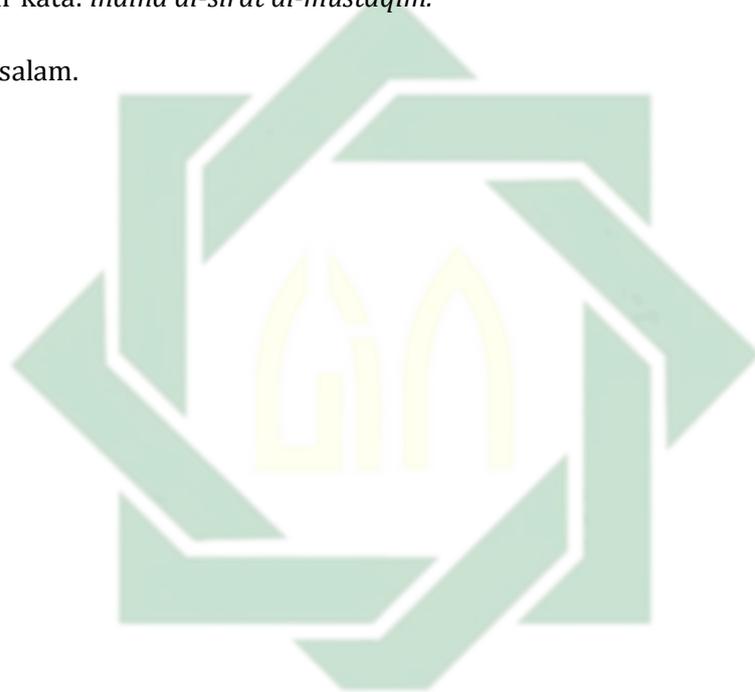
Maka kajian ini menjadi penting dilakukan, dalam rangka mencari titik temu dan persamaan masyarakat di kedua negara. Titik temu spirit ke-Islaman ini harapannya bisa menjadi *starting point* dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia ke Tiongkok.

Kita semua tidak ingin, masa kelam yang dilalui oleh kedua negara terulang kembali, hanya karena informasi yang salah, literasi yang buta, tentang Indonesia dan Tiongkok.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, sehingga saran kritik sangat diharapkan, dan kepada peneliti berikutnya agar mendalami tema penelitian ini dalam pespektif dan metode yang berbeda.

Akhir kata: *ihdina al-sirat al-mustaqim.*

Wassalam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.3.1 Tujuan Akademik	9
I.3.2 Tujuan Praktis.....	9
I.4. Penelitian Terdahulu	9
I.5. Sistematika Pembahasan	13
I.6. Timeline (Rentang Waktu) Penelitian	14
Bab II TINJAUAN TEORI	15
II.1 <i>People-to-People Connectivity</i>	17
II.1.1 Diplomasi Publik	17
II.1.2 Identitas Bersama	24
II.2 Elite Muslim	27
Bab III METODE PENELITIAN	28
III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
III.2 Unit Analisis dan Teknik <i>Sampling</i>	30
III.3 Teknik Pengumpulan Data	32
III.4 Teknik Analisis Data	33
III.5 Pemeriksaan Keabsahan Data	36

Bab IV ANALISIS	37
IV.1 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Relasi Indonesia dan Tiongkok di Era Kontemporer	38
IV.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok di Era Kontemporer	39
IV.1.2 Isu Komunisme dalam Relasi Indonesia dan Tiongkok	43
IV.1.3 Peningkatan Kerjasama Indonesia dan Tiongkok di Bidang Pendidikan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan	54
i. Pendidikan	54
ii. Pariwisata	60
iii. Ketenagakerjaan	63
IV.2 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Islamisasi dan Perkembangan Islam di Indonesia dan Tiongkok	66
IV.3 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Islam Sebagai Sarana Peningkatan People-to-People Connectivity Antara Indonesia dan Tiongkok	75
IV.3.1 Islam Mampu Menjadi Sarana <i>People-to-People Connectivity</i> dan Memiliki Peluang Besar	76
IV.3.2 Islam Mampu Menjadi Sarana <i>People-to-People Connectivity</i> dengan Syarat Khusus	82
IV.3.3 Islam Tidak Mampu Menjadi Sarana <i>People-to-People Connectivity</i> Karena Tantangan Terlalu Besar	85
IV.4 Proyeksi Diplomasi Publik Terkait Islam sebagai Sarana <i>People-to-People Connectivity</i> Antara Indonesia dan Tiongkok.....	87
 Bab V Penutup	97
V.1 Kesimpulan	98
V.2 Rekomendasi	100
 Daftar Pustaka	104
Lampiran	110
Outline Wawancara	
Bukti Wawancara (Daring dan Luring)	
Link master data (transkrip wawancara, rekaman suara dan video, foto, dll)	

BAB I

PENDAHULUAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

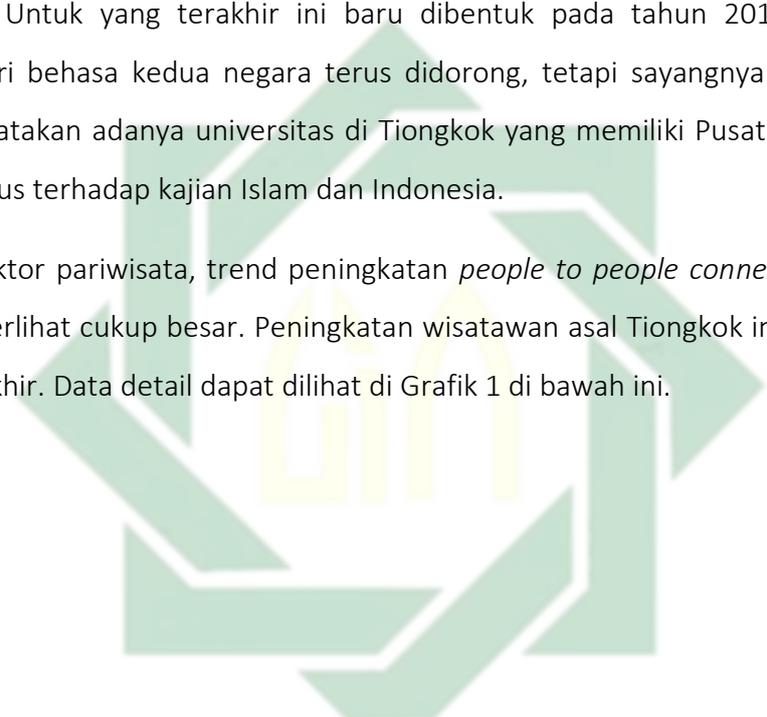
I.1 LATAR BELAKANG

Pasang surut hubungan diplomatik antara Indonesia-Tiongkok mewarnai kedua negara sejak era kemerdekaan. Di era Orde Lama, Soekarno membangun Poros Jakarta-Peking dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Memasuki Orde Baru, Soeharto mengambil sikap anti-komunis dan membekukan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kebijakan asimilasi melalui Inpres No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina adalah turunannya. Hubungan Indonesia-Tiongkok pada periode ini mengalami kondisi surut dan berada pada titik nadir. Memasuki era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan mencabut kebijakan asimilasi Soeharto melalui Kepres No.6/2000. Semangat afirmasi terhadap Tiongkok ini kemudian sekarang diteruskan oleh Presiden Jokowi.

Peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok terjadi sangat signifikan selama pemerintahan Joko Widodo. Beberapa fakta penguat argument ini adalah (1) intensitas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok selama 4 kali semenjak menjabat presiden. Realitas ini belum pernah ditemukan pada presiden sebelumnya. (2) Peningkatan *people to people connectivity*, baik di sektor pendidikan, sektor pariwisata maupun industri. Di sektor pendidikan, terdapat peningkatan jumlah pelajar Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Peningkatan ini juga terlihat dari pembukaan Pusat Bahasa Mandarin di berbagai daerah di Indonesia. Pusat pelatihan bahasa Mandarin yang sejatinya bernama Confucius Institute tersebut berinduk di perguruan tinggi, di antaranya Universitas Islam Al Azhar Indonesia, Universitas Negeri Malang, Universitas

Negeri Surabaya, dan Universitas Hasanudin.¹ Saat ini, pusat Bahasa tersebut telah berkembang ke pesantren, seperti di Ponpes Nurul Jadid Probolinggo.² Di sisi Tiongkok, beberapa Pusat Kajian Indonesia pun telah didirikan dan tersebar di beberapa kampus ternama Tiongkok, seperti *Beijing Foreign Studies University*, *Hebei Normal University*, *Fujian Normal University*, *Jilin International Studies University* dan *Central China Normal University*. Untuk yang terakhir ini baru dibentuk pada tahun 2018.³ Meski akses mempelajari bahasa kedua negara terus didorong, tetapi sayangnya belum ada data yang menyatakan adanya universitas di Tiongkok yang memiliki Pusat Kajian Indonesia dengan fokus terhadap kajian Islam dan Indonesia.

Di sektor pariwisata, trend peningkatan *people to people connectivity* Indonesia-Tiongkok terlihat cukup besar. Peningkatan wisatawan asal Tiongkok ini terjadi dalam 5 tahun terakhir. Data detail dapat dilihat di Grafik 1 di bawah ini.



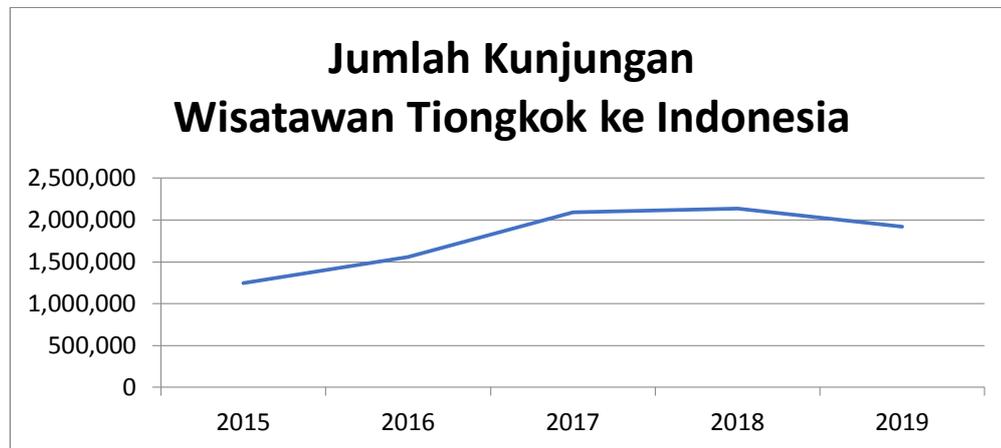
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Sejak 2010, Confucius Institute (Pusat Bahasa Mandarin) berdiri di 6 universitas di Indonesia, yaitu Universitas Islam Al Azhar Indonesia (dibuka November 2010), Universitas Kristen Maranatha (Februari 2011), Universitas Hasanudin (Februari 2011), Universitas Negeri Malang (Maret 2011), Universitas Negeri Surabaya (Mei 2011), dan Universitas Tanjungpura (November 2011). Masing-masing universitas yang menjadi induk mempunyai partner universitas di Tiongkok. Lihat Feri Ansori, *Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Hubungan Sosial Budaya China-Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol.4, No.1, Maret 2017, 15

² Saat ini Ponpes Nurul Jadid Probolinggo bisa menyelenggarakan tes ujian Bahasa Mandarin (*Hanyu Shuiping Kaoshi / HSK*) standar Internasional, diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/160570/sma-nurul-jadid-jadi-penyelenggara-ujian-bahasa-mandarin-berstandar-internasional>, tanggal 30 Oktober 2020

³ "New Indonesian-Chinese Studies Center Inaugurated in Wuhan", diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/27/new-indonesian-chinese-studies-center-inaugurated-in-wuhan.html>, tanggal 17 September 2020

Grafik 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tiongkok ke Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tahun 2015, angka kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia sebesar 1,249,091 jiwa. Di tahun 2016 angka tersebut naik menjadi 1,556,771 wisman. Di tahun 2017 angka naik signifikan menjadi 2,093,171 wisman. Di tahun 2018 angka kembali naik menjadi 2,139,161 wisman, sementara di tahun 2019 angka mengalami sedikit penurunan menjadi 1,919,841 wisman. Rata-rata kenaikan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah 19,6% per-tahun.⁴ Namun perlu diingat, pergerakan wisatawan Tiongkok ke Indonesia jumlahnya menurun pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya bahwa sektor pariwisata tidak selamanya 'surplus' dalam meningkatkan *people-to-people connectivity* antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok. Maka, alternatif baru perlu disusun dalam meningkatkan hubungan masyarakat di kedua negara. Islam dalam relasi Indonesia-Tiongkok bisa menjadi pilihannya.

Sinyal peningkatan hubungan bilateral kedua negara juga ditandai dengan realitas isu tenaga kerja asing asal Tiongkok. Berdasar data statistik, tenaga kerja asing di

⁴ "Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2015-2019", diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/04/07/1794/wisatawan-mancanegara-yang-datang-ke-indonesia-menurut-kebangsaan-2015-2019.html>, tanggal 20 September 2020

Indonesia didominasi oleh Tiongkok. Tahun 2015, jumlah TKA asal Tiongkok mencapai 17.515 orang. Tahun 2016 meningkat menjadi 21.271 orang dan Tahun 2017 sejumlah 24.804 tenaga kerja Tiongkok yang terdaftar di Indonesia.⁵ Seiring dengan peningkatan investasi asing Tiongkok yang berada di Indonesia, maka sudah sewajarnya ini terjadi. Namun faktanya banyak pro kontra yang berkembang di masyarakat atas keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Indonesia di klaim menerima jutaan tenaga kerja Tiongkok.⁶ Dari sisi ini ternyata juga belum mendorong *people-to-people connectivity* secara berkelanjutan antara kedua negara. Karena isu tenaga kerja merupakan isu yang sensitif, berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan, sementara masih banyak masyarakat Indonesia yang sulit mencari kerja.

Untuk selanjutnya, riset ini ingin melihat potensi lain dalam meningkatkan *people-to-people connectivity* antara masyarakat Indonesia dengan Tiongkok. Peneliti memilih aspek Islam-Indonesia-Tiongkok. Sebenarnya pilihan ini bukan tanpa alasan. Sebab dari sisi sejarah, sudah ada beberapa akademisi yang melihat benang merah antara Islam-Indonesia-Tiongkok. Proses Islamisasi di Indonesia (Nusantara) tidak bisa dilepaskan dari peran etnis Tionghoa. Tan Ta Sen melalui bukunya yang berjudul *Cheng Ho and Islam in Southeast Asia* menyebutkan bahwa Laksamana Cheng Ho, yang merupakan duta resmi Dinasti Ming disebut memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara.⁷ Lebih spesifik, Sjamsudduha mengidentifikasi genealogi Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang memiliki darah Tiongkok. Nasab atau garis keturunan Tiongkok ini bersumber dari ibu Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang merupakan perwakilan Tiongkok di Kerajaan Campa. Sunan Ampel di-klaim sebagai keturunan Sayyid Syamsuddin Umar (*Say Dian Chih*), gubernur Provinsi Yunnan.⁸

⁵ "May Day 2019 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat", diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat>, tanggal 20 September 2020

⁶ "Jokowi: TKI di Tiongkok Malah 80.000 Lebih di Sana yang Antek Indonesia", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/12422721/jokowi-tki-di-tiongkok-malah-80000-lebih-di-sana-yang-antek-indonesia>, tanggal 20 September 2020

⁷ Tan Ta Sen, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2010), 109

⁸ Sjamsudduha. *Sejarah Sunan Ampel, Guru Para Wali dan Perintis Pembangunan Kota Surabaya*. (Surabaya: JP Press, 2004), 195

Argumen berikutnya adalah aspek eksistensi diaspora Muslim Tionghoa di Indonesia yang dipandang semakin eksis. Meskipun muslim Tionghoa Indonesia mendapat sebutan '*double minorities*' (minoritas etnis dan minoritas muslim), hal ini tidak membuat muslim Tionghoa 'menutup diri' terhadap masyarakat. Justru muslim Tionghoa semakin 'membuka diri' dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang. Banyak pendakwah dari muslim Tionghoa yang bisa diterima oleh masyarakat muslim Indonesia. Melalui Yayasan Masjid Cheng Hoo Indonesia, mereka sudah membangun 18 Masjid Cheng Hoo yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Masjid Cheng Hoo di Palembang, Jambi, Kepulauan Riau, Purbalingga, Surabaya, Pandaan, Malang, Jember, Banyuwangi, Makassar, Gowa, Balikpapan, Samarinda dan Lombok Barat.⁹ Menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia (YHMCHI), HMY Bambang Sujanto, masjid Cheng Ho ini merupakan masjid yang dibangun dengan arsitektur dan ornamen yang menyerupai kelenteng/pagoda khas budaya Tiongkok.



Gambar 1. Masjid Cheng Hoo Surabaya

Sumber; Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia

⁹ HMY Bambang Sujanto. Wawancara. 5 Januari 2020.

Argumen lainnya adalah aspek tradisi. Data awal menyebutkan bahwa antara Islam Indonesia dan Islam Tiongkok, keduanya sangat adaptif terhadap tradisi yang berkembang di kedua negara. Proses Islamisasi baik di Indonesia maupun di Tiongkok, keduanya sama-sama ramah terhadap budaya dengan cara menghormati, melestarikan dan merangkul budaya. Dalam konteks ini, Iskandar Chang menyebutkan bahwa Konfusianisme sebagai budaya lokal masyarakat Tiongkok ternyata memiliki banyak irisan dengan nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Maka jika keduanya beririsan, tidak berarti menegaskan antara satu dan yang lain. Yang ada adalah proses dialog dan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal Tiongkok (*Confucianism*). Hal ini mirip dengan Islam ketika masuk ke Indonesia, yang waktu itu masyarakatnya di dominasi oleh penganut animisme, Hindu, Buddha. Banyak tradisi warisan Hindu Buddha seperti peringatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari kematian yang masih dijalankan oleh Muslim Indonesia hingga sekarang. Hanya saja kegiatannya diisi dengan bacaan yasin dan tahlil.¹⁰

Narasi aspek tradisi di atas semakin mendapat tempat ketika pemerintah RRT mengeluarkan kebijakan sinoisasi agama (*sinicization of all religions*).¹¹ Secara umum, kebijakan ini menitikberatkan pada aspek sinkretisme semua agama (sebagai produk luar) dengan budaya Tiongkok sebagai nilai-nilai lokal. Secara khusus, kebijakan sinoisasi agama di Tiongkok mengharuskan agama berposisi tidak lebih tinggi dari budaya Tiongkok. Nilai-nilai agama, simbol agama dan praktik beragama di Tiongkok harus berjalan berkelindan dengan nilai-nilai budaya Tiongkok.¹² Kebijakan sinoisasi agama ini tidak bisa dilepaskan dari Reformasi dan Keterbukaan Tiongkok (*open door policy*) yang digagas Deng Xiao Ping di tahun 1979. Era keterbukaan (*New Era*) kemudian dilanjutkan di era kontemporer oleh Presiden Xi Jinping dengan menggagas visi “*socialism with Chinese characteristics for a New Era*”.

¹⁰ Dr. Iskandar Chang, Wawancara, 12 Januari 2020

¹¹ “Five-Year Planning Outline for Persisting in the Sinification of Islam (2018-2022)”, diakses dari <https://www.chinalawtranslate.com/en/islamsinificationplan/>, tanggal 15 September 2020

¹² Benoit Vernander, “Sinicizing Religions, Sinicizing Religious Studies”, *Journal of Religions*, Vo.10, No.2, pp.1-23, doi.org/10.3390/rel10020137

Dari sisi Indonesia, kita memiliki aset yang besar terkait relasi agama dan budaya ini. Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, biasa menyebut dengan konsep Islam Nusantara, sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi lokal nusantara dan Indonesia (selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam). Organisasi massa Islam lainnya, Muhammadiyah, memiliki konsep Islam Berkemajuan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras dan golongan, serta kebudayaan umat manusia di muka bumi.¹³ Baik Islam Nusantara maupun Islam Berkemajuan, keduanya bukanlah agama baru dari Islam, melainkan strategi dakwah untuk membumikan Islam *rahmatan lil alamin*, Islam ala Indonesia yang ramah dan toleran terhadap budaya serta keragaman etnis.

Dinamika tersebut perlu dikembangkan dalam melihat potensi *people-to-people connectivity* antara masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dengan masyarakat Tiongkok. Aspek lain harus muncul di luar aspek ekonomi dalam meningkatkan kesepahaman masyarakat di kedua negara. Maka, tidak ada salahnya jika membuat kajian awal yang memetakan pendapat elit tokoh muslim Indonesia beserta tokoh muslim Tionghoa Indonesia terkait relasi Islam-Indonesia-Tiongkok beserta potensinya dalam meningkatkan *people to people connectivity* antara kedua negara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan elite Muslim Indonesia terhadap relasi Islam-Indonesia-Tiongkok?
2. Apa saja peluang dan tantangan Islam sebagai sarana bagi peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok?

¹³ Alpha Amirrachman, Azaki Khoirudin, Andar Nubowo (ed) , *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, Bandung; Mizan, 2015, 15

I.3 TUJUAN PENELITIAN

I.3.1 Tujuan Akademis

1. Untuk mengidentifikasi pandangan elit muslim Indonesia terhadap relasi Islam-Indonesia-Tiongkok.
2. Untuk mendeskripsikan peluang, kendala dan dampak relasi Islam-Indonesia-Tiongkok dalam meningkatkan *people to people connectivity* antara kedua negara.

I.3.2 Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif kebijakan luar negeri Indonesia dalam meningkatkan *people-to-people connectivity* antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka diplomasi publik.

I.4 PENELITIAN TERDAHULU

Penelusuran hasil penelitian sebelumnya sangat penting dalam sebuah penelitian, agar memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi teori dan metodologi yang akan digunakan atau menentukan posisi penelitiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tentang relasi Islam-Indonesia-Tiongkok adalah konsep yang menjadi kata kunci melakukan penelusuran. Beberapa hasil penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Buku bunga rampai yang ditulis oleh para santri NU yang melanjutkan studi ke Tiongkok. Buku berjudul "*Islam, Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok*". Buku terbitan tahun 2019 ini berisi catatan santri Indonesia yang menceritakan pengalaman keagamaan, keislaman, pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi selama mereka tinggal di Tiongkok. Pandangan santri terkait isu kemanusiaan di Xinjiang dan apakah Islam di Tiongkok tertindas dijawab dengan lugas. Selain itu, buku ini menarasikan aturan beragama di Tiongkok serta bentuk akulturasi tradisi budaya dan agama di beberapa kawasan negeri Tirai Bambu.

Catatan penutup buku ini mempertegas moderasi Islam di Tiongkok yang sedikit banyak mengadopsi filsafat Yin dan Yang dalam berdakwah.¹⁴

2. Artikel jurnal yang berjudul *Diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok* tahun 2019. Tulisan ilmiah karya Abid Rohman dan Ridha Amaliyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini memaparkan bagaimana relasi Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin lama membawa pengaruh tidak hanya pada seni budaya, tetapi juga pendekatan diplomasi kedua negara. Dalam seni dan budaya, jejak kebudayaan Tiongkok dan Muslim Tionghoa banyak bertebaran di Indonesia, mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, penamaan jalan, aneka aksesoris pakaian, nama makanan, serta bukti peninggalan purbakala Islam di Jawa. Laksamana Cheng Hoo disebut memiliki peran besar dalam penyebaran seni dan budaya agama Islam kala itu. Di praktik diplomasi, Indonesia telah berupaya menempatkan dirinya sebagai mitra dialog/kerjasama dan promotor terhadap Tiongkok. Kedua peran tersebut bertumpu sinergi pemerintah dan aktor non-negara, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga mendorong terciptanya *people-to-people connectivity*. Diplomasi kedua negara dapat terus diperdalam mengingat kedua pemimpin telah sepakat meningkatkan hubungan antarwarganya. Demi mencapai kerjasama yang berkelanjutan, Indonesia dan Tiongkok harus menyusun suatu kerangka komprehensif mengenai pendekatan diplomasi yang menghadirkan Islam di dalamnya.¹⁵
3. Artikel jurnal yang ditulis di 'Studia Islamika' (jurnal ter-index *scopus* dan *Thomson Reuters*), *The Tao of Islam; Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslims in Pre-Modern Java*, ditulis oleh Sumanto al-Qurtuby menyimpulkan bahwa kontribusi warisan sejarah Cheng Ho dan muslim Tionghoa dalam membentuk budaya dan

¹⁴ Ahmad Syaifuddin Zuhri, dkk. *Islam, Indonesia dan China; Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok*, Yogyakarta; Aswaja Nusantara Press, 2019

¹⁵ Abid Rohman dan Ridha Amaliyah, "Diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok", *Insiera*, Vol.4, No.1, 2019

peradaban Jawa telah ‘disembunyikan’ oleh rezim penguasa selama puluhan tahun. Baru pada era reformasi, seiring kebijakan afirmasi terhadap etnis Tionghoa,

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCHI) mulai berani menunjukkan eksistensi mereka dengan membangun Masjid Cheng Ho yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, Qurtuby melihat ada benang merah antara Islam Nusantara dengan Islam Tiongkok melalui cara dakwah Cheng Ho di Pulau Jawa. Kombinasi dan akulturasi antara Islam Nusantara dan Islam Tiongkok ada pada dialektika dengan tradisi lokal. Dia menyebut Islam Tiongkok dengan istilah ‘The Tao of Islam’, sebuah pertemuan dan persinggungan antara tradisi Islam dengan prinsip Tao sebagai kepercayaan lokal Tiongkok. Fakta sejarah ini dipakai oleh Cheng Ho dalam strategi dakwah Islam di Jawa. Keberadaan pengaruh Tiongkok dalam Islamisasi Jawa misalnya bisa dilihat pada ukiran padas di Masjid Kuno Mantingan-Jepara, Menara Masjid Pecinan Banten, konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik, konstruksi Masjid Demak (khususnya soko penyangga masjid beserta lambing kura-kura), konstruksi Masjid Sekayu di Semarang, konstruksi Masjid Kali Angke dan masjid Kebon Jeruk di Jakarta, arsitektur Keraton Cirebon beserta Taman Sunyaragi.¹⁶

4. Buku yang ditulis oleh Tan Ta Sen dengan judul *Cheng Ho and Islam in Southeast Asia*. Buku ini merupakan ekstraksi disertasi penulis ketika belajar di Universitas Indonesia tahun 2007. Tan Ta Sen memberikan fakta sejarah tentang keterlibatan Cheng Ho dalam proses islamisasi di Asia Tenggara dengan jalan damai dan tanpa adanya konfrontasi. Fakta ini kemudian menjadi bahan untuk membantah tesis Huntington yang menyatakan akan ada benturan peradaban (*the clash of civilisations*) antara peradaban Islam dan Tiongkok. Sejarah perjalanan muhibah Laksamana Cheng Ho yang membawa misi perdamaian terbukti mampu

¹⁶ Sumanto al-Qurtuby; ‘The Tao of Islam; Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslim in Pre-Modern Java’, *Studia Islamika*, Vol.16 No.1, 2009, 51-78

mendialogkan dan mentransformasikan antara tradisi budaya dan tradisi agama sekaligus, sehingga masyarakat muslim di Asia Tenggara bisa menerimanya. Hal ini menandai perkembangan Islam di Asia Tenggara pada abad ke-15.¹⁷

5. Buku yang ditulis oleh Sjamsudduha dengan judul *Sejarah Sunan Ampel, Guru Para Wali dan Perintis Pembangunan Kota Surabaya*. Buku ini menegaskan unsur Tionghoa dalam genealogi Sunan Ampel, salah satu penyebar Islam (Wali Songo) yang ada di Surabaya. Sjamsudduha mencoba mengidentifikasi genealogi Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang memiliki darah Tiongkok. Nasab atau garis keturunan Tiongkok ini bersumber dari ibu Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang merupakan perwakilan Tiongkok di Kerajaan Campa. Sunan Ampel di-klaim sebagai keturunan Sayyid Syamsuddin Umar (*Say Dian Chih*), gubernur Provinsi Yunnan.¹⁸
6. Artikel jurnal yang berjudul *Artikulasi Budaya Cina dan Islam dalam Arsitektur Tempat Ibadah di Kota Lasem Jawa Tengah*. Artikel jurnal ini ditulis oleh Diah Ayuningrum, mengidentifikasi arsitektur Masjid Jami' Lasem yang didirikan pada tahun 1558. Terdapat akulturasi antara budaya Cina dan Islam di Masjid Jami' Lasem ini. Bagian atap, ukiran dekat mimbar, kubah masjid dan menara sangat kental dengan corak budaya Cina.¹⁹
7. Artikel jurnal dengan judul *Minoritas Muslim di China; Perkembangan, Sejarah dan Pendidikan*. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ismail Suardi Wekke Rusdan ini menyimpulkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada abad ke-7 masa Dinasti Tang melalui jalur perdagangan dan perkawinan, bukan dengan peperangan (invasi). Corak penyebaran Islam yang seperti ini membentuk karakteristik muslim di Tiongkok lebih mudah menerima Islam serta adaptif terhadap budaya lokal mereka. Muslim Tiongkok sangat menjunjung tinggi kebudayaan Tiongkok. Hal ini

¹⁷ Tan Ta Sen, *Cheng Ho and Islam in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2009)

¹⁸ Sjamsudduha. *Sejarah Sunan Ampel, Guru Para Wali dan Perintis Pembangunan Kota Surabaya*. (Surabaya: JP Press, 2004)

¹⁹ Diah Ayuningrum, 'Akulturasi Budaya Cina dan Islam dalam Arsitektur Tempat Ibadah di Kota Lasem Jawa Tengah', *Jurnal Sabda*, Vol.12 No.2, 2017

sedikit berbeda dengan Muslim Uighur di Xinjiang yang memiliki cara berpakaian berbeda dengan penduduk asli Tiongkok.²⁰ Studi ini menggambarkan relasi Islam di Tiongkok dan Islam di Indonesia memiliki kesamaan pola, yakni akomodatif terhadap budaya lokal.

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber di atas, terlihat bahwa belum ada satu pun karya akademik yang mengkhususkan pembahasan pada relasi Islam-Indonesia-Tiongkok dalam kerangka peningkatan *people to people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok perspektif elite Muslim Indonesia. Penelitian ini nantinya diharapkan akan mampu menjadi alternatif pendekatan dalam peningkatan hubungan masyarakat kedua negara.

I.5 SISTEMATIKA BAHASAN

Secara garis besar sistematika pembahasan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu (*prior research*), sistematika bahasan, dan timeline penelitian.

Bab II memuat kerangka konseptual yang kompatibel untuk menjawab pertanyaan dalam riset ini, yakni konsep diplomasi publik dan konsep identitas bersama.

Bab III memuat metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan teknik *sampling*, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memuat temuan data dan analisis mendalam tentang bagaimana pandangan elite Muslim Indonesia terhadap relasi Islam, Indonesia, dan Tiongkok, termasuk peluang dan tantangannya dalam meningkatkan *people-to-people connectivity* antara masyarakat kedua negara.

Bab V memuat kesimpulan riset dan rekomendasi.

²⁰ Ismail Suardi Wekke Rusdan, 'Minoritas Muslim di China; Perkembangan, Sejarah dan Pendidikan', *Ijtima'iyah*, Vol.10, No.1, 2017

I.6 TIMELINE (RENTANG WAKTU) PENELITIAN

No.	Uraian Pekerjaan	Bulan Juli - November 2020																			
		Minggu ke-																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pre-research / Observasi Lapangan	■	■																		
2.	Penyusunan instrumen penelitian (draft pertanyaan)		■	■	■																
3.	Pengumpulan data (primer dan sekunder)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4.	Triangulasi data dengan informan yang relevan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5.	Olah data dan analisis data				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6.	Penyusunan laporan pendahuluan											■	■	■	■	■	■				
7.	Revisi laporan awal, penyusunan laporan kemajuan											■	■	■	■	■	■	■	■		
8.	Finalisasi laporan awal																	■	■	■	
9.	Laporan akhir																			■	■

BAB II

TINJAUAN TEORI



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritik beserta definisi konseptual. Tinjauan teori digunakan sebagai alat analisis dan alat baca data penelitian. Sedangkan definisi konseptual dimunculkan dalam rangka untuk membatasi lingkup topik penelitian yang berjudul ISLAM, INDONESIA & TIONGGOK: Analisis Potensi Peningkatan *People-to-People Connectivity* Antara Indonesia dan Tiongkok (Perspektif Elite Muslim Indonesia).

Di pokok bahasan pertama, peneliti memberikan definisi konsep *people-to-people connectivity* sebagai salah satu strategi diplomasi publik (*public diplomacy*) menurut Sharp (2009) dan Barston (2013). Dalam pandangan lain, *people-to-people* ini juga sangat erat kaitannya dengan identitas bersama (*common identity*) yang dikonstruksi oleh para aktor. Dua aspek inilah yang diambil peneliti dalam membingkai konsep *people-to-people connectivity* antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok dengan membagi nilai dan pandangan hidup agar dapat hidup berdampingan dengan damai.

Pokok bahasan kedua, peneliti merujuk kepada konsep diplomasi agama dari Philip Seib yang mengkaitkan antara kajian diplomasi dengan agama. Dalam terminologi ini, dikenal istilah *faith diplomacy* dan *religious-based public diplomacy*. Perspektif ini yang kemudian dipakai dalam melihat pandangan elite muslim Indonesia terkait peningkatan *people to people connectivity* antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok yang menggunakan basis isu keagamaan (Islam).

Di pokok bahasan berikutnya, peneliti memberikan definisi konsep elite Muslim Indonesia yang menjadi subyek penelitian sekaligus informan dalam penelitian ini.

II.1 *People-to-People Connectivity*

Secara harfiah, *people-to-people connectivity* berarti konektivitas antar-masyarakat, terhubungnya masyarakat di satu wilayah dengan masyarakat di wilayah lain. Secara terminologi, *people-to-people connectivity* seringkali dipakai dalam kajian hubungan internasional untuk menggambarkan kondisi di mana masyarakat suatu negara terhubung dan/atau berinteraksi dengan masyarakat negara lainnya. Di satu sisi, *people-to-people connectivity* diasosiasikan dengan konsep diplomasi publik.²¹ Namun di sisi lain, penggunaan *people-to-people connectivity* juga dapat merujuk pada pengertian yang digunakan oleh organisasi kawasan Asia Tenggara, ASEAN, yang memahaminya sebagai identitas bersama masyarakat Asia Tenggara.²² Konsep *people-to-people connectivity* dalam penelitian ini akan merujuk pada kedua pengertian tersebut secara bersamaan.

II.1.1 Diplomasi Publik

Dalam konteks diplomasi, konsep *people-to-people connectivity* berkaitan erat dengan diplomasi publik, yakni kegiatan diplomasi suatu negara mempengaruhi masyarakat di suatu negara agar mempunyai persepsi/opini seperti yang diinginkan agar tujuan kebijakan luar negeri dapat tercapai²³ (Manheim 1990, Berridge 2010, Barston 2013). Inisiator aktivitas diplomasi ini bisa berasal dari aktor pemerintah, namun bisa juga diawali oleh aktor non-pemerintah yang berkontribusi dalam kegiatan lintas batas negara, seperti bidang pendidikan, pariwisata, media, organisasi, dan

²¹ Konsep diplomasi publik telah dibahas oleh penstudi di berbagai negara. Beberapa rujukan yang banyak dipakai adalah Barston (2013), Manheim (1990), Berridge (2010), Sharp (2009), Mellisen (2005), Nye Jr (2008). Dalam perkembangannya, konsep diplomasi publik bercabang dan menghasilkan kajian yang lebih spesifik, seperti diplomasi budaya, diplomasi olahraga, dan diplomasi religi/agama. Di kajian diplomasi religi, rujukan yang banyak dipakai adalah karya Seib (2013), Riordan (2004), Johnston (2003).

²² Konsep identitas bersama merujuk pada semangat ASEAN Connectivity, yakni konsep masyarakat yang dipedomani di kawasan ASEAN karena semangat tersebut dirasa mewakili semangat Indonesia dan Tiongkok untuk hidup berdampingan dengan damai seperti ASEAN. Lihat Sekretariat ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016)

²³ Lihat Jarol Manheim, *Strategic Public Diplomacy: The Evaluation of Influence* (New York: Oxford University Press, 1990); G. R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice* (New York: Palgrave, 2010); R.P. Barston, *Modern Diplomacy* (London: Pearson Education, 2013)

lainnya. Menurut Seib, karakter khas dari diplomasi publik adalah kontak langsung diplomat dengan publik asing di negara tujuan, daripada pemerintah negara tersebut.²⁴

Meski terdengar baru, pendekatan diplomasi kepada publik ini sejatinya telah disorot sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat ketika rombongan paduan suara mahasiswa Universitas Howard berkeliling di wilayah Amerika Latin dan Afrika Selatan dalam misi kesenian. Masukan positif publik asing akan kunjungan rombongan mahasiswa tersebut menyadarkan pejabat pemerintah Amerika Serikat pada saat itu bahwa publik dapat berdiplomasi dengan caranya sendiri.²⁵ Keterlibatan aktor non-pemerintah menuntut pendekatan diplomasi dan tanggungjawab yang berbeda. Dengan kata lain, diplomasi publik adalah diplomasi yang ditujukan kepada publik suatu negara untuk membentuk opini/persepsi tertentu.

Diplomasi publik telah lama diartikan sebagai upaya diplomasi pemerintah menyampaikan nilai dan informasi positif kepada masyarakat luar negeri, menghilangkan celah kognitif dan emosi antar-masyarakat, meningkatkan pemahaman bersama, dan membentuk opini publik terhadap suatu negara melalui berbagai alat/cara termasuk pertukaran budaya dan media, untuk meningkatkan citra dan pengaruh suatu negara, sekaligus mempromosikan kepentingan nasionalnya.²⁶ Namun seiring dengan perkembangan relasi antarnegara, lingkup diplomasi negara tidak hanya berfokus pada negosiasi mengakhiri perang dan konflik. Diplomasi dapat dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi antar-masyarakat dunia dalam isu-isu non-perdamaian, seperti ekonomi, pendidikan, maupun budaya.

Masyarakat global dapat berinisiatif dan ikut menjadi aktor dalam diplomasi publik, yang kemudian membentuk diplomasi publik baru.²⁷ Masyarakat global tidak hanya diperlakukan sebagai objek/target dari diplomasi publik. Diplomasi publik baru

²⁴ Philip Seib, *Religion and Public Diplomacy* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 2

²⁵ Anne Turpeau, "People to People Diplomacy", *World Affairs*, Vol.123, No.4, 1960, 105

²⁶ Philip Seib, *Religion and Public Diplomacy*, 5

²⁷ R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, (London: Pearson Education, 2013), 43

tidak hanya berfokus pada aspek penyebaran nilai, ide, citra positif suatu negara kepada masyarakat asing. Jan Melissen menegaskan bahwa diplomasi publik baru lebih dari sekedar penyebaran informasi pada publik asing, namun cenderung menuju hubungan keterlibatan dengan publik asing.²⁸ Menurut Sharp, keterlibatan publik dalam diplomasi yang disebut dengan “*diplomatic thinking*” ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan para pembuat kebijakan. Publik yang semakin tertarik untuk terlibat dalam isu nasional atau internasional, baik secara individu maupun berkelompok, dengan kesadaran mereka sendiri sudah semestinya dijaga agar tidak sampai mengalami kelesuan (*discouragement*).²⁹

Tidak hanya masyarakat harus berpikir seperti diplomat, namun publik juga harus bisa bertindak strategis agar pesannya tersampaikan. Menurut Leonard, Stead, dan Smewing, diplomasi publik adalah tentang membangun relasi: memahami kebutuhan negara lain, budaya, mengkomunikasikan pandangan, mengoreksi mispersepsi, mencari area dimana ada kesamaan/tujuan bersama.³⁰ Diplomasi publik merupakan diplomasi yang dibangun berdasar premis bahwa citra dan reputasi sebuah negara adalah barang publik yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung (ataupun tidak mendukung) kepentingan individu. Bidang atau isu tertentu dapat mendorong citra negara dan merefleksikannya kembali ke arah positif maupun negatif. Maka dari itu, upaya diplomasi publik bukanlah upaya singkat karena dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahap/proses, yaitu³¹:

1. *Introducing* (memperkenalkan dan memberi kabar terbaru dari satu negara ke negara lain)
2. *Appreciating* (menghargai apa yang dimiliki negara lain, menciptakan persepsi positif)
3. *Engaging* (mempererat relasi, melaksanakan kerjasama di berbagai bidang)

²⁸ Melissen, *The New Public Diplomacy* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 5

²⁹ Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations* (New York: Cambridge University Press, 2009), 7

³⁰ Leonard, et al, *Public Diplomacy* (London: The Foreign Policy Centre, 2002), 8

³¹ Leonard, et al, *Public Diplomacy*, 9

4. *Influencing* (mendapatkan pihak lain untuk berinvestasi, publik dan pejabatnya telah berpihak dan siap membantu)

Untuk menyelesaikan semua tahap/proses tersebut, pemerintah suatu negara harus menyadari bahwa diplomasi publik bukanlah kegiatan sederhana yang sekedar menyampaikan pesan.

Keterlibatan publik dalam berdiplomasi merupakan upaya yang efektif dalam rangka memfasilitasi adanya dialog yg tulus dan nyata (*genuine dialogue/real conversations*) antara publik dengan tujuan membangun relasi yang saling menguntungkan³². Diplomasi publik dari publik ke publik (*people-to-people public diplomacy*) membawa peluang adanya perbaikan dan perubahan, setidaknya berdasar tiga asumsi. Pertama, pemerintah negara harus mengakui bahwa diplomat adalah bagian dari masalah diplomasi itu sendiri, maka diplomat tidak bisa disandingkan dari "*genuine dialogue*". Kedua, pemerintah harus meyakini pula bahwa publik punya kualitas yang sama bagusnya dengan pemerintah ketika berdiplomasi. Ketiga, diplomasi publik yang dijalankan oleh publik merupakan konsep yang secara nyata dapat diidentifikasi dan dapat berjalan secara otomatis sesuai kapabilitas masing-masing publik.³³

Kekuatan publik dalam menjalankan dialog yang tulus dan berkelanjutan tersebut dapat tercermin dalam diplomasi publik terkait agama (*religious-related public diplomacy*). Sejak berakhirnya Perang Dingin, khususnya sejak peristiwa 9/11 tahun 2001, agama menjadi sorotan dalam hubungan internasional. Agama menjadi subyek yang tidak dapat dihindari dalam mempertimbangkan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri di banyak negara.³⁴ Perhatian ini kemudian terefleksikan dalam diplomasi publik.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Xu Yihua, "Religion and China's Public Diplomacy in the Era of Globalization", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.9, No.4, 2015, 15, doi: 10.1080/19370679.2015.12023271

Dalam konteks diplomasi, realitas yang terjadi adalah agama berada di antara isu teologis dan politik dan telah menjadi aset yang berharga dalam hubungan antar-masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat persepsi luas di era modern di mana agama tidak lagi dianggap berpengaruh dalam kehidupan publik dan dianggap isu teologis dalam ranah privat³⁵. Menurut Johnston dan Cox, menempatkan isu agama dalam diplomasi publik merupakan upaya tepat dalam rangka proses penciptaan perdamaian (*peacemaking*) karena empat alasan.³⁶ Pertama, agama mengandung nilai yang telah mapan dan menancap dalam masyarakat. Kedua, agama dapat menjadi pendorong non-politik menuju perubahan berdasar nilai-nilai yang dihormati bersama. Ketiga, agama memiliki daya ungkit (*leverage*) yang khas dalam penyelesaian konflik. Keempat, agama memiliki kemampuan memobilisasi dukungan komunitas, nasional, dan internasional untuk tujuan perdamaian. Interaksi religius antar-masyarakat yang di dalamnya terkandung nilai, ide, emosi, dan perilaku diakui lebih mendasar dan bertahan lama dibanding sekedar afiliasi politik dan pertukaran barang/jasa.³⁷

Penyebutan diplomasi publik yang terkait agama ini ditulis beragam oleh para penstudi. Philip Seib (2013), Leight et al (2011) menyebutnya sebagai *faith diplomacy*. Cox dan Philpott (2003) dan Albright (2006) menamainya dengan *faith-based diplomacy*. Beberapa penstudi tidak menyebut spesifik dan hanya menyebutnya sebagai diplomasi publik religi (*religious public diplomacy / religious-based public diplomacy*). Tidak ada perbedaan signifikan dalam penyebutan tersebut karena mayoritas penstudi sama-sama berangkat dari konsep diplomasi publik dan sama-sama mengakui pentingnya memanfaatkan agama sebagai sumber/alat berdiplomasi. Dalam penelitian ini, penggunaan istilah yang dipakai adalah *faith diplomacy*, tetapi tidak serta merta menyingkirkan penggunaan istilah lain yang serupa mengingat bervariasinya rujukan yang dipakai. Secara khusus, *faith diplomacy* yang dimaksud

³⁵ Phillip Seib, *Religion and Public Diplomacy*, 5

³⁶ Brian Cox dan Daniel Philpott. *Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent*, The Brandywine Review of Faith & International Affairs, Vol.1, No.2, 2003, 33, doi: 10.1080/15435725.2003.9523161

³⁷ Xu Yihua, "Religion and China's Public Diplomacy in the Era of Globalization", 16

dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua negara memanfaatkan Islam sebagai sarana diplomasi dalam menjembatani celah interaksi antar-masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

Tiongkok telah memberikan kebebasan/toleransi terhadap praktik agama sejak era Keterbukaan tahun 1978. Namun kenyataan bahwa agama merupakan bagian penting dari formulasi kepentingan luar negeri dan *soft power* baru disadari di dua dekade terakhir³⁸ (Zhang, 2013). Pada tahun 2001, Presiden Tiongkok, Jiang Zemin, mengakui untuk pertama kalinya bahwa agama dapat berperan sebagai stabilisator dalam masyarakat dan dapat dimobilisasi sebagai pendorong pembangunan nasional. Agama telah berperan positif dan berkontribusi menciptakan harmoni atau keseimbangan masyarakat luas Tiongkok. Tokoh elit agama dan pejabat negara mulai memikirkan bagaimana mengatur agama secara institusional, maka tidak heran pemerintah Tiongkok mempertimbangan agama sebagai sumber diplomatik.³⁹ Bulan September 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menegaskan kembali bahwa hubungan dua negara tidak berbeda dengan hubungan antara dua manusia yang saling mengasihi. Ia mengatakan bahwa Jalur Sutra kuno menyediakan pelajaran berharga, yakni “dengan berbasis solidaritas, saling percaya, persamaan, keterbukaan, saling belajar, dan kerjasama saling menang, maka negara dengan berbeda ras, kepercayaan, latar belakang budaya akan dapat berbagi perdamaian dan pembangunan”.⁴⁰ Tujuan dari *faith diplomacy* Tiongkok adalah untuk mempromosikan pemahaman dan penerimaan kebijakan agama pemerintah Tiongkok secara internasional, mengadvokasi kegiatan-kegiatan keagamaan, meningkatkan citra Tiongkok, dan “membangun dunia yang harmonis”. Slogan terakhir tersebut jelas diadaptasi dari slogan domestik negara tersebut, “membangun masyarakat yang harmonis”. Dengan tujuan ambisius tersebut, pemerintah Tiongkok telah menginisiasi berbagai macam

³⁸ Zhang Juyan, “China’s Faith Diplomacy” dalam Philip Seib, *Religion and Public Diplomacy*, 77

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Xu Yihua, “Religion and China’s Public Diplomacy in the Era of Globalization”, 19

diplomasi agama dalam beberapa tahun belakangan, dan momentum tersebut berlanjut hingga sekarang.⁴¹

Indonesia pun telah menjalankan *faith diplomacy* dengan menempatkan isu agama, terutama Islam, dalam mempromosikan nilai-nilai positif dan toleransi. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia menempatkan Islam sebagai sumber dalam berdiplomasi publik. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia memiliki elemen *soft power* yang layak dijadikan sebagai sumber kekuatan atau pengaruh, termasuk nilai Islam Indonesia yang kemunculannya masih mengandung pro dan kontra di kalangan luas.⁴² Kritik yang muncul seringkali karena lemahnya dorongan *faith diplomacy* Indonesia di panggung global.⁴³

Salah satu perwujudan *faith diplomacy* Indonesia yang saat ini digemakan adalah mempromosikan konsep Islam Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan ulama nasional di kancah internasional. Islam Indonesia adalah nilai-nilai ke-Islaman berkarakter khas Indonesia: memiliki warna Islam universal, namun pada saat yang bersamaan tetap memiliki distingsi unik yaitu mengakui lokalitas.⁴⁴ Akarnya tak terlepas dari peran sejarah dan sepak terjang ulama Nahdatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dua organisasi Islam tersebut. NU melahirkan konsep Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah memunculkan konsep Islam Berkemajuan. Perpaduan kedua konsep di atas membentuk Islam Indonesia yang sangat kompatibel dengan nasionalisme, demokrasi dan kemajuan.⁴⁵ Kedua konsep ini tidak hanya dihidupkan di

⁴¹ Ibid.

⁴² Abid Rohman dan Ridha Amaliyah, "Diplomasi Islam Indonesia dan Tiongkok", 22

⁴³ Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia", dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008)

⁴⁴ "Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, Dari Indonesia Untuk Dunia", diakses dari <http://presidenri.go.id/internasional/islam-nusantara-dan-islam-berkemajuan-dari-indonesia-untuk-dunia.html>, tanggal 5 September 2020

⁴⁵ Abid Rohman dan Ridha Amaliyah, "Diplomasi Islam Indonesia dan Tiongkok", 25

kalangan masing-masing organisasi dan pengikutnya, tetapi juga mulai direspon positif oleh pemerintah dan diasumsikan sebagai kekuatan atau pengaruh Indonesia di kancah global.

II.2 Identitas Bersama

Sebagai identitas bersama, konsep *people-to-people connectivity* sangat berkaitan erat dengan fakta adanya relasi sejarah antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok. Secara terminologi, konsep *people-to-people connectivity* dalam penelitian ini merujuk pada salah satu konsep yang telah lama digaungkan oleh ASEAN, yakni terhubungnya masyarakat dalam suatu wilayah berdasar kesamaan identitas.

Menurut ASEAN, konsep *people-to-people connectivity* merupakan salah satu pilar yang dapat merekatkan masyarakat Asia Tenggara dengan mempromosikan pemahaman sosial dan budaya intra-ASEAN sekaligus meningkatkan mobilitas intra-ASEAN, utamanya di bidang pendidikan, pariwisata, dan budaya. Konsep *people-to-people connectivity* dipahami sebagai kunci dalam masyarakat yang multikultural (*multicultural society*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan ketahanan sosial (*social resilience*). Masyarakat modern yang menuntut lebih banyak peran individu atau kelompok dibanding peran pemegang kebijakan menunjukkan pentingnya relasi antar-masyarakat. Konektivitas antar-masyarakat di level domestik dan negara dapat berkontribusi positif terhadap keberlanjutan hubungan sosial masyarakat global.⁴⁶

Konektivitas antar masyarakat negara dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya: 1) saling bertukar pengetahuan dan informasi lintas batas nasional, sehingga masyarakat saling memahami budaya masyarakat di negara lain; 2) saling bekerjasama dan mempromosikan mobilitas kaum terdidik sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap masalah sosial dan budaya di tingkat nasional maupun

⁴⁶ Sekretariat ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016), 6

internasional; dan 3) saling menciptakan jaringan dan konektivitas untuk bekerjasama. Namun, perwujudan konektivitas antar-masyarakat dapat terhambat karena beberapa pertimbangan, seperti terbatasnya jaringan sebagai media komunikasi, konflik kultural, kontestasi politik, isu keuangan, hingga sistem dan relasi masyarakat di tingkat domestik maupun internasional. Maka dari itu, keterlibatan tokoh maupun inisiator dalam masyarakat sangatlah krusial karena peran mereka dapat menjangkau sisi yang tidak dapat didekati oleh pemerintah atau pembuat kebijakan. Sistem konektivitas dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar visi dan misi bersama yang hendak dicapai dapat terwujud.⁴⁷

Kesamaan identitas antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok adalah hadirnya Islam sebagai agama. Islam adalah agama asing baru yang diperkenalkan ke Tiongkok bukan oleh para juru dakwah tetapi orang-orang awam seperti para serdadu dan pedagang. Para Muslim perintis itu membangun kantong-kantong pemukiman di ibu kota dan pusat perdagangan. Penerimaan yang baik dari dinasti Tang dan dinasti Song terhadap Islam membuat para minoritas Muslim dapat hidup dan bertahan di bawah lingkungan dan aturan non-Islami.⁴⁸ Meski ideologi dan kepercayaan mayoritas di Tiongkok adalah Konfusianisme, Buddhisme, dan Daoisme, kelompok minoritas Muslim memosisikan diri mereka bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi ideologi mayoritas tersebut. Hal ini tidak terlepas dari status mereka yang kebanyakan adalah pedagang kaya raya dari Arab dan Persia sehingga memiliki pengaruh dan jejaring perdagangan yang baik dengan para pedagang Tiongkok setempat dan pedagang asing lainnya. Mereka berkontribusi besar menjadikan Tiongkok sebagai pelabuhan pusat perdagangan.⁴⁹

Dalam sejarahnya, relasi masyarakat Indonesia dan Tiongkok telah terjalin lama bahkan dapat dilacak hingga jaman kejayaan Nusantara. Dalam beberapa catatan

⁴⁷ NEAT Working Group, *Enhancing People to People Connectivity Education, Tourism and Cultural Exchange Final Report*, 2014

⁴⁸ Tan Ta Sen, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2010), 15

⁴⁹ Ibid.

sejarah, kaum pedagang Muslim Tiongkok telah jauh lebih dulu hadir sebelum masyarakat lokal memeluk agama Islam yaitu sekitar abad ke-14 atau sekitar abad ke-15. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan catatan-catatan atau berita dari bangsa Portugis, ditambah dengan catatan sekretaris Laksamana Cheng Hoo sewaktu melakukan perjalanan ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa.⁵⁰ Awal mula peran orang-orang Tionghoa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara adalah ketika ekspedisi Cheng Hoo terutama di Jawa dan Sumatera. Cheng Hoo yang merupakan duta resmi Dinasti Ming ini disebut memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam ketika itu. Ia melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, antara lain Vietnam, Taiwan, Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sri Lanka, India, Persia, Teluk Persia, Arab, Laut Merah ke Utara hingga Mesir, Afrika Selatan hingga selat Mozambik.⁵¹

Jejak-jejak relasi masyarakat Indonesia dan Tiongkok di wilayah Nusantara cukup banyak bertebaran di Indonesia. Mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesoris pakaian hingga nama makanan⁵². Sumanto Al-Qurtuby menemukan fakta bahwa eksistensi kehadiran Muslim dari Tiongkok pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kesaksian-kesaksian pengelana asing, sumber-sumber Tiongkok, teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga bukti peninggalan purbakala Islam di Jawa seperti adanya ukiran padas di Masjid kuno mantingan Jepara, menara masjid Tiongkok di Banten, arsitektur keraton Cirebon dan berbagai peninggalan kuno lainnya.⁵³

Relasi masyarakat kedua negara berlanjut hingga saat ini di berbagai sektor, utamanya sektor pendidikan, budaya, dan pariwisata. Di bidang pendidikan misalnya, data dari Kedutaan Indonesia di Tiongkok menunjukkan bahwa jumlah pelajar

⁵⁰ Rezza Maulana, *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa* (Yogyakarta: Impulse, 2010), 14

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Sumanto Al-Qurtuby, *Arus Tiongkok-Jawa Islam, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI* (Yogyakarta: INTI, 2013), 56.

Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok pada 2018 mencapai 14.233 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 9,48% dibanding posisi 2016 yang berjumlah 13 ribu jiwa.⁵⁴ Dalam kunjungan kenegaraan ke Tiongkok tahun 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Masjid Niujie di Beijing dan bertemu dengan Presiden Asosiasi Muslim RRT, Yang Faming. Kunjungan ke masjid yang sama telah dahulu dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 1999. Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok yang telah mendukung dan memberikan kebebasan ruang ibadah bagi 23 juta warga Muslim Tiongkok. Menurutnya, relasi budaya Muslim Indonesia dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak abad ke-lima belas harus terus dipelihara.⁵⁵

II.2 Elite Muslim

Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peneliti menterjemahkan konsep elite dengan sekelompok kecil orang yang terpandang dan berderajat tinggi (bangsawan, cendekiawan).⁵⁶ Dalam operasionalisasinya, elite muslim Indonesia dalam topik riset ini terbagi kedalam 4 (empat) unsur, yakni (1) pimpinan Pondok Pesantren Besar/Kawak, mantan birokrat dan mantan pengurus ormas Islam (2) pengurus organisasi kemasyarakatan Islam arusutama yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PERSIS, Al-Irsyad dan Nahdlatul Wathan; (3) pengurus ormas/yayasan Tionghoa muslim Indonesia; dan (4) akademisi/cendekiawan muslim Indonesia.

⁵⁴ "Berapa Jumlah Pelajar Indonesia di Tiongkok?", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/21/berapa-jumlah-pelajar-indonesia-di-tiongkok>, tanggal 5 September 2020

⁵⁵ "Kunjungi Masjid Niujie Beijing, Gus Dur Pertama Jokowi Kedua", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/875261/kunjungi-masjid-niujie-beijing-gus-dur-pertama-jokowi-yang-kedua/full&view=ok>, tanggal 5 September 2020

⁵⁶ Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

BAB III

METODE PENELITIAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Fenomena sosial dipandang sebagai sesuatu yang khas, tidak dapat diformulasikan atau digeneralisasikan ke dalam suatu model baku, sehingga yang perlu dipelajari adalah bagaimana memahami sedalam mungkin fenomena sosial tersebut.

Pengetahuan diyakini sebagai suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial di sekitarnya. Pemahaman seperti ini diperkenalkan oleh Mannheim dengan istilah *sociology of knowledge*. Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak dapat dilepaskan dari eksistensinya.⁵⁷ Berbagai macam faktor sosial akan membentuk pemahaman dan sikap seseorang, termasuk dalam membentuk suatu ilmu pengetahuan.

Penelitian ini bertujuan melakukan eksplorasi gagasan elite Muslim Indonesia terhadap Islam, suatu fenomena sosial-politik-budaya, sebagai sarana bagi peningkatan hubungan antar masyarakat (*people-to-people connectivity*) Indonesia dan Tiongkok. Ketertarikan peneliti terhadap topik penelitian ini relatif baru. Di dalam dunia akademik maupun sosial-politik masyarakat Indonesia, hubungan antara agama dengan masyarakat komunis diposisikan simetris atau tidak dipengaruhi satu dan yang lainnya. Dengan demikian, menghubungkan antara variabel Islam dengan masyarakat Tiongkok yang berideologi komunis menjadi suatu topik baru yang diperlukan tahap pembiasaan (*familiarize*) dan layak untuk diteliti lebih lanjut.⁵⁸

⁵⁷ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik*, Terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 78-85.

⁵⁸ Lihat logika penelitian eksploratif dalam Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, ed. 12 (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2010), 92.

III.2 Unit Analisis dan Teknik Sampling

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok individu (*groups*). Adapun yang dimaksud kelompok di sini adalah para elite Muslim Indonesia yang terdiri dari empat kluster. **Pertama**, tokoh nasional Muslim Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang sudah terkenal dan diakui ketokohnya secara nasional, seperti pimpinan pondok pesantren besar atau kawakan, mantan birokrat atau pejabat Muslim di tingkat nasional, dan mantan pengurus ormas Islam yang populer di tengah masyarakat Indonesia. **Kedua**, kluster pengurus ormas/yayasan Islam arus utama (*mainstream*) di Indonesia. Para pengurus ormas dengan massa besar di Indonesia juga menjadi unit analisis dalam penelitian ini, seperti dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Wathan. **Ketiga**, pengurus ormas/yayasan Islam Tionghoa di Indonesia, seperti pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCHI), Yayasan Haji Karim Oei (YHKO), dan Yayasan Al-Mahdi Magelang. **Keempat**, akademisi/cendekiawan Muslim Indonesia, yakni elite Muslim yang memiliki kapasitas intelektual atau pengetahuan mendalam tentang topik penelitian berbasis kampus.

Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* (dikenal juga dengan sebutan *haphazard sampling* atau *accidental sampling*). Teknik sampling ini termasuk dalam *non-random* atau *non-probability sampling* dimana anggota dari populasi yang menjadi target/subyek penelitian memiliki kriteria praktis tertentu, semisal mudah dijangkau, kedekatan geografis, kesediaan dalam waktu atau keinginan untuk berpartisipasi, diikutsertakan sesuai tujuan penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mencari subyek dari populasi yang mudah diakses. *Convenience sampling* sering disebut *accidental sampling* karena sampel dipilih secara kebetulan dalam suatu

situasi, baik secara kewilayahan ataupun administratif, dekat dengan tempat dimana peneliti mengumpulkan data.⁵⁹

Teknik *sampling convenience* dipilih karena jumlah populasi elite Muslim Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti dan memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga tidak mungkin dilakukan pemilihan sampel secara random atau acak. Peneliti juga memiliki keterbatasan sumber, waktu dan tenaga, oleh karenanya *convenience sampling* sangat tepat digunakan. Teknik *sampling non-probability* memang memiliki keterbatasan, terutama dalam hal keterwakilan populasi. Artinya, sampel yang dipilih sangat subyektif atau tidak akan mencukupi. Namun, pendekatan kualitatif yang menjadi logika berpikir penelitian ini memang mengasumsikan bahwa penelitian tidak akan digunakan untuk menggeneralisir kesimpulan di tingkat populasi.⁶⁰ Penelitian ini bermaksud menggali data sedalam mungkin dan menemukan makna dibalik data yang diungkap dari unit analisis.

Berdasarkan teknik *sampling convenience* yang digunakan untuk meneliti subyek populasi elite Muslim Indonesia, maka tergambar tabel informan sebagai sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Informan/Sampel Penelitian

No.	Nama Informan	Teknik Pengambilan Data	Kluster
1.	Dahlan Iskan	<i>Indepth interview</i>	Tokoh nasional Muslim Indonesia
2.	KH. Zaim Ahmad Maksum	<i>Indepth interview</i>	
3.	KH. Abd Qoyyum Mansur	<i>Indepth interview</i>	
4.	KH. Abdullah Yazid	<i>Indepth interview</i>	
5.	KH. Imron Rosyadi Hamid	<i>Indepth interview</i>	
6.	KH. Hasib Wahab	<i>Indepth interview</i>	
7.	Yudi Latif	<i>Indepth interview</i>	
8.	Njo Tjoen Hian	<i>Indepth interview</i>	
9.	Hamid Fahmy Zarkasyi	<i>Indepth interview</i>	

⁵⁹ Ilker Etikan, et.al., "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11

⁶⁰ *Ibid.*

10.	RKH. Abd. Mun'im Bayan AMZ	<i>Indepth interview</i>	
11.	Lukman Hakin Saifuddin	FGD	
12.	TGB Zainul Majdi	FGD	Pengurus ormas/yayasan Islam arusutama (<i>mainstream</i>) di Indonesia
13.	Fisher Zulkaarnain	<i>Indepth interview</i>	
14.	TGH. Hasanain Junaini	<i>Indepth interview</i>	
15.	Tiar Anwar Bachtiar	<i>Indepth interview</i>	
16.	KH. Agus Sunyoto	<i>Indepth interview</i>	
17.	H. Haryanto Satryo	<i>Indepth interview</i>	Pengurus ormas/yayasan Islam Tionghoa di Indonesia
18.	Iskandar Chang	<i>Indepth interview</i>	
19.	H. Nurawi	<i>Indepth interview</i>	
20.	Linda Chang	<i>Indepth interview</i>	
21.	Hj. Merry Effendi	<i>Indepth interview</i>	
22.	H. Mahdi	<i>Indepth interview</i>	
23.	Novi Basuki	FGD	
24.	Ahmad Syaifuddin Zuhri	FGD	
25.	Grace Lestariana Wonoadi	<i>Indepth interview</i>	
26.	Jona Widhagdo Putri	<i>Indepth interview</i>	
27.	Prof. Dicky Sofyan	<i>Indepth interview</i>	
28.	Wahidah Siregar	<i>Indepth interview</i>	
29.	Prof. Akh. Muzakki	<i>Indepth interview</i>	
30.	Prof. Ali Mufrodi	<i>Indepth interview</i>	
31.	Prof. Abdul A'la	<i>Indepth interview</i>	
32.	Prof. Ali Mufrodi	<i>Indepth interview</i>	
33.	Prof. AH. Rofiuddin	<i>Indepth interview</i>	
34.	Eko Siswanto	<i>Indepth interview</i>	

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni: wawancara mendalam (*indepth interview*), kelompok diskusi terarah (*focused group discussion*), dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan harapan data yang tersaji akan bersifat dalam (*deep*), kaya (*rich*), dan tebal (*thick*). Selama masa pandemi covid-19 di tahun 2020 ini, peneliti menggunakan strategi wawancara daring dengan menggunakan aplikasi *Zoom* dan *Google Meets* maupun berkunjung langsung menemui informan secara luring. Instrumen yang digunakan dalam wawancara

mendalam antara lain: buku catatan lapangan (*field notebook*), pulpen, alat perekam (*recorder*), kamera *smartphone*, serta panduan wawancara (*interview guide*).

Pengumpulan data dalam forum kelompok diskusi terarah (FGD) dilakukan secara langsung maupun tidak. Maksudnya, peneliti bisa secara langsung menghadirkan beberapa informan yang dikondisikan untuk membahas rumusan masalah di dalam suatu forum khusus yang memang di-*setting* oleh peneliti. Atau, secara tidak langsung dimana FGD di-*setting* oleh pihak lain, namun topik dan rumusan masalah yang ditanyakan dalam penelitian ini dibahas oleh para informan dalam forum tersebut. FGD dalam penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui *platform* digital telekonferensi.

Terakhir, teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mencari jawaban terhadap rumusan masalah di dalam berbagai sumber tertulis atau teks. Menurut O'Leary, terdapat tiga macam jenis sumber dokumentasi dalam penelitian. Pertama, catatan publik, yakni catatan resmi yang dibuat oleh suatu organisasi. Contoh dari catatan publik ini adalah transkrip mahasiswa, pernyataan resmi, laporan tahunan, petunjuk teknis suatu kebijakan, panduan mahasiswa, rencana strategis, dan silabus. Kedua, catatan personal, yakni catatan yang dibuat oleh seseorang berdasar pengalaman, keyakinan dan sudut pandangnya. Contohnya; catatan dalam kalender, email, *blog*, *posting* di *Facebook*, artikel jurnal/refleksi, dan surat kabar. Ketiga, bukti fisik, yakni berupa obyek fisik yang ditemukan dalam suatu penelitian, biasa disebut sebagai artefak. Contohnya, *flyers*, poster, materi-materi pelatihan, dan buku panduan.⁶¹ Pada pokoknya, seluruh sumber teks yang membantu menjawab permasalahan dan mengungkapkan makna, baik tercetak maupun digital, akan dikumpulkan oleh peneliti.

III.4 Teknik Analisis Data

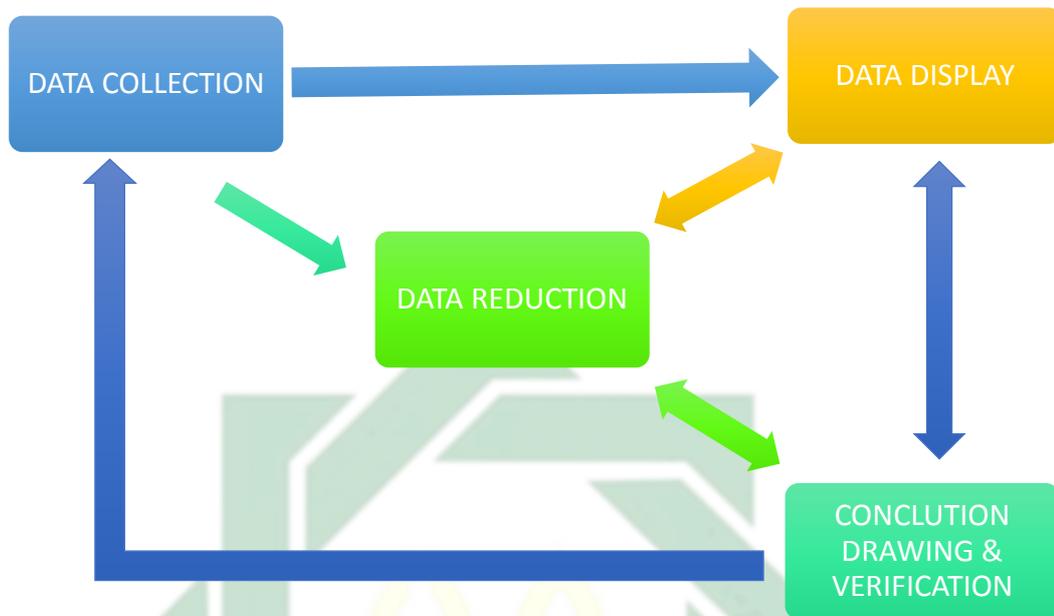
⁶¹ Z. O'Leary, *The Essential Guide to Doing Your Research Project*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2014).

Data yang telah terkumpul dari lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif. Kegiatan analisis data dan pengumpulan data dilakukan secara simultan atau berlangsung serempak. Miles dan Huberman menggambarkan teknik analisis data interaktif melibatkan beberapa komponen yang saling berhubungan secara simultan, yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).⁶²

Gambar 2 mengilustrasikan bahwa pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Ketika mengumpulkan data, peneliti dengan sendirinya melakukan perbandingan-perbandingan bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, maupun teorisasi. Hasil pengumpulan data tentu direduksi (semakna dengan pengelolaan data dengan editing atau koding dalam penelitian kuantitatif) yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan atau memilah-milah data ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data tentu perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk (*display*) tertentu sehingga terlihat utuh dan mempermudah upaya penarikan kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

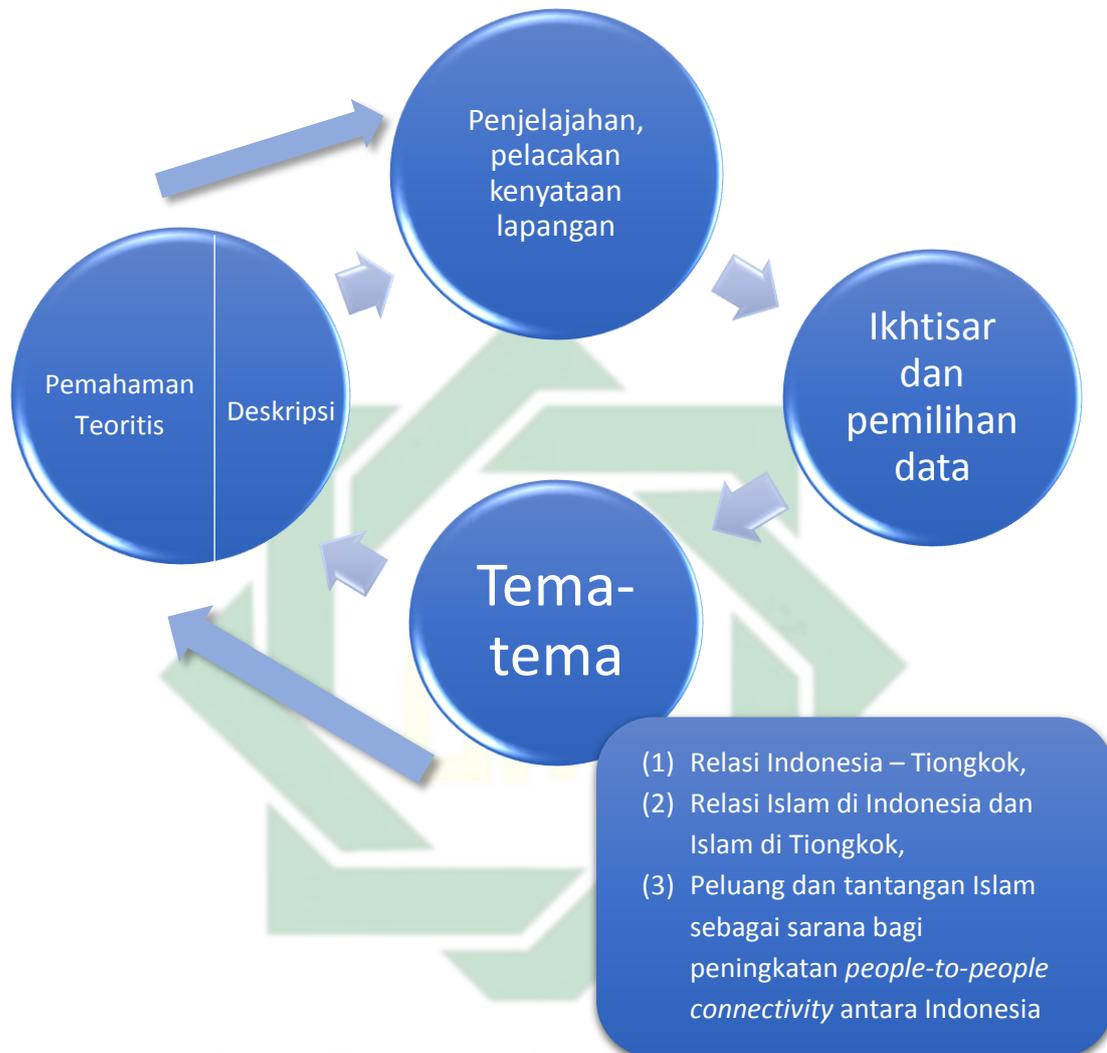
⁶² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analysis*, (New York Sage Publication, 1984), Terj. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 69.

Sesuai dengan rumusan masalah, peneliti mengkategorikan analisis data ke dalam tiga tema, yakni: pandangan informan terkait relasi Indonesia – Tiongkok, pandangan informan terkait relasi Islam di Indonesia dan Islam di Tiongkok, serta pandangan informan terkait peluang dan tantangan Islam sebagai sarana bagi peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok. Analisis data prosesnya tidaklah “sekali jadi,” melainkan terjadi secara interaktif, secara sekuensial atau bolak-balik sebagaimana ilustrasi Gambar 1. Untuk lebih memahami proses analisis data, disajikan Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Siklus Pengumpulan Data Menuju Deskripsi dan Teori

Sumber: Modifikasi model analisis data interaktif model Miles dan Huberman dari Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 71.

III.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data (uji kredibilitas) dilakukan triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat (*peer group*). Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik pengumpulan data, sumber data, dan waktu. Melalui diskusi sejawat akan diperoleh apresiasi, kritik, masukan dan saran.⁶³

⁶³ Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Afabeta, 2009), 209-210.

BAB IV

ANALISIS



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis penelitian yang berjudul ISLAM, INDONESIA & TIONGKOK: Analisis Potensi Peningkatan *People-to-People Connectivity* Antara Indonesia dan Tiongkok Perspektif Elite Muslim Indonesia. Pembahasan analisis terdiri dari tiga sub-bab. Pertama, analisis pandangan elite Muslim Indonesia terkait relasi Indonesia-Tiongkok secara umum. Subbab ini membahas berbagai persepsi elite Muslim Indonesia menanggapi kedekatan relasi Indonesia dan Tiongkok di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta isu yang menyertainya. Kedua, analisis pandangan elite Muslim Indonesia terkait relasi Islam di Indonesia dan Islam di Tiongkok. Sub-bab ini menjabarkan bagaimana persepsi elite Muslim Indonesia melihat keterkaitan sejarah Islam di kedua negara dan perkembangan proses Islamisasi saat ini. Ketiga, analisis pandangan elite Muslim Indonesia terkait peluang dan tantangan Islam sebagai sarana bagi peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok. Sub-bab ini memaparkan bagaimana elite Muslim Indonesia memandang peluang dan tantangan Islam menjadi sarana memperkuat relasi *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok. Ketiga sub-bab pembahasan analisis akan menyajikan beragam pandangan elite Muslim Indonesia.

IV.1 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Relasi Indonesia dan Tiongkok di Era Kontemporer

Relasi Indonesia dan Tiongkok telah terjalin lama meski mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Relasi ini terus dilakukan secara intensif dalam bentuk Kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, pertahanan, ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia dan Tiongkok meningkatkan kerjasamanya secara signifikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga saat ini. Kondisi ini

dipandang sebagai hal yang positif oleh Sebagian besar elite Muslim Indonesia di keempat kluster.

IV.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok di Era Kontemporer

Hubungan Indonesia-Tiongkok mengalami penguatan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedekatan relasi dua negara strategis ini menciptakan berbagai pandangan. Di masa kepemimpinan Jokowi jilid I, nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok melesat menjadi \$48,2 miliar dolar. Jumlah ini sangat signifikan bila mempertimbangkan nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok di tahun 2005 yang hanya mencapai \$8,7 miliar dolar.⁶⁴ Tiongkok juga menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Pemerintah menggandeng Tiongkok untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedekatan ini, menciptakan dilema bagi Presiden Jokowi.⁶⁵ Menurut analis dari South China Morning Post, Jeffrey Hutton, keinginan Jokowi menyediakan infrastruktur bagi rakyatnya dengan menggandeng Tiongkok sebagai investor dan pemasok tenaga kerja ahli justru menempatkan Presiden Jokowi di posisi yang sulit ketika menjalani pemilu tahun 2019. Namun keresahan Hutton tidak terjadi dengan terpilihnya Kembali Jokowi untuk memimpin Indonesia hingga tahun 2024.

Tokoh nasional yang juga mantan Menteri BUMN era pemerintahan Presiden SBY, Dahlan Iskan, menanggapi positif kedekatan Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok meningkat sebenarnya bukan pada masa Presiden Jokowi, tetapi lebih tepatnya mulai era reformasi yang berawal dari Pak Habibie. Di era Presiden Abdurrahman Wahid hubungan kedua negara dengan Tiongkok terlihat harmonis. Pada rezim ini sudah ada hubungan *government-to-government* bahkan afirmasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terlihat sangat kuat.

⁶⁴ "Relasi Indonesia-China di Era Jokowi: Mau Tapi Malu, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191017121413-106-440311/relasi-indonesia-china-di-era-jokowi-mau-tapi-malu>, tanggal 20 November 2020

⁶⁵ Jeffrey Hutton, "A Catch-22 from China that could derail Indonesia's Widodo", diakses dari <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2145806/catch-22-china-could-derail-indonesias-widodo>, tanggal 20 November 2020

Masyarakat Indonesia bebas merayakan Gong Xi Fat Cai, Imlek jadi libur nasional, pemeluk agama Kong Hu Cu juga diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Di era Presiden SBY, muncul UU No.12/2016 tentang Kewarganegaraan yang menghapus istilah pribumi dan non-pribumi. Di era Jokowi, maka tidak berlebihan jika ada peningkatan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.⁶⁶

KH. Moch Zaim Ahmad, tokoh Pondok Pesantren Kauman, Karangturi, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, memandang bahwa hubungan kedua negara Indonesia dan Tiongkok semakin penting dalam tatanan global khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dunia. Tiongkok negara besar yang penduduknya sangat banyak, dan sekarang Tiongkok merupakan negara yang perekonomiannya tumbuh pesat. Dengan kuantitas dan kualitas penduduk Tiongkok dewasa ini merupakan kekuatan besar, maka kedekatan Tiongkok dengan bangsa Indonesia itu menjadi penting. Ilmu pengetahuan pun mulai tumbuh di Tiongkok. Menurut tokoh Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia (MP3I) ini, persaingan internasional dalam aspek ekonomi global yang dipengaruhi oleh ekonomi Tiongkok mendorong agar hubungan Tiongkok dan Indonesia agar dikuatkan.⁶⁷

Hal serupa pun disampaikan oleh KH. Abdulloh Yazid (Rembang) dan KH. Hasib Wahab Hasbullah (Jombang). KH. Abdulloh Yazid yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, sekaligus Ketua IKATAN Saudagar Muslim Jawa Tengah, berpendapat bahwa hubungan pemerintah Indonesia dan Tiongkok semakin baik. Kedekatan relasi ini menjadikan peluang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, walaupun ada masih ada tantangan dari elemen masyarakat Indonesia.⁶⁸ KH. Hasib Wahab Hasbullah sebagai tokoh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, menjelaskan bahwa hubungan dengan Tiongkok memang sangat masif, baik di ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun, ia mengingatkan

⁶⁶ Dahlan Iskan, tokoh Muslim nasional, wawancara, 22 September 2020

⁶⁷ KH. Moch. Zaim Ahmad Ma'shoem, Pengasuh Pesantren Kauman-Lasem, wawancara, 20 Oktober 2020

⁶⁸ KH. Abdulloh Yazid, Ketua IKATAN Saudagar Muslim Jawa Tengah, wawancara, 20 Oktober 2020

bahwa pemerintah tidak boleh membuka keran bagi investor untuk investasi dan kerjasama seluas-luasnya dengan Tiongkok tanpa adanya regulasi yang tegas.⁶⁹

Kedekatan dengan Tiongkok adalah pilihan yang rasional menurut sebagian besar elite Muslim Indonesia. Dahlan Iskan pun menegaskan bahwa rasionalitas mendekat ke Tiongkok didasari atas dua hal. Pertama, Tiongkok saat ini sebagai sumber dana (uang). Kedua, negara di kawasan Barat saat ini banyak mengurangi pengaruhnya di beberapa kawasan. Contoh paling konkrit adalah Afrika. Eropa menarik diri dari Afrika karena resiko dengan yang benefit yang didapat tidak seimbang, sehingga Afrika kosong dan kemudian Tiongkok masuk ke Afrika. Ia mempertanyakan kabar yang menyatakan bahwa Tiongkok menjerat Afrika karena ia melihat ada kemiripan apa yang terjadi di Afrika dengan kondisi di Indonesia.⁷⁰ Dr. Eko Siswanto, tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Fattahul Muluk Papua, berpendapat bahwa Tiongkok adalah negara besar yang perkembangan ekonominya luar biasa dan diakui dunia, maka tidak salah ketika presiden Jokowi memiliki upaya membangun hubungan baik dengan Tiongkok untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Ini terlihat dari intensitas presiden kita untuk komunikasi dengan Tiongkok. Sebagai umat Muslim di tanah Papua, ia memandang positif bahwa itu adalah upaya pengembangan ekonomi di Indonesia.⁷¹

Prof. Akh. Muzakki, tokoh akademisi Muslim dari UIN Sunan Ampel Surabaya, berpendapat senada dan menegaskan hal tersebut. Peningkatan hubungan dengan Tiongkok itu sudah dimulai sejak era Gus Dur. Pertama, kebijakan luar negerinya Gus Dur yang disebut sebagai "*looking towards Asia*". Itulah yang kemudian membuat Amerika Serikat sangat tidak senang karena rezim di bawah Gus Dur tersebut membuka peluang terjadinya hubungan yang lebih kuat terhadap Tiongkok. Hal yang dilakukan Gus Dur adalah ikatan emosional kebudayaan. Ini dibuktikan dari diakuinya

⁶⁹ KH. Hasib Wahab Hasbulloh, tokoh PP Bahrul Ulum Jombang, wawancara, 12 Oktober 2020

⁷⁰ Dahlan Iskan, Op. Cit.

⁷¹ Dr. Eko Siswanto, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Fattahul Muluk Papua, wawancara, 24 September 2020

konghucu dan asimilasi budaya Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Barongsai dan festival-festival kebudayaan Tiongkok direkognisi di jaman Gus Dur. Bahkan Gus Dur sendiri mengatakan bahwa 'saya ini keturunan Cina'. Ia pun menjelaskan bahwa memahami kebijakan masing-masing negara itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman kesejarahan. Indonesia punya sejarah kelam yang kemudian menempatkan Tiongkok pada posisi tertuduh sejak lama. Maka, apapun kemudian yang berbau China atau Tiongkok itu seperti menjadi musuh bersama. Itulah kira-kira keberhasilan Orde Baru selama 32 tahun untuk mencari *the common enemy*.⁷²

Eratnya hubungan Indonesia dan Tiongkok dianggap sebagai pilihan strategis yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Indonesia di berbagai bidang. Namun ada pula yang bersikap hati-hati terhadap kedekatan ini. Tokoh Muslim berdarah Tionghoa seperti Hj. Merry Efendi menyambut baik kedekatan kedua negara. Sekretaris DPW PITI Sumatera Selatan ini memandang sangat baik adanya peningkatan relasi Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, wisatawan muslim dan non-muslim berkunjung ke Masjid Cheng Hoo Palembang sebelum pandemi. Urusan mu'amalah bebas bermitra dengan siapa saja, tetapi tetap berhati-hati bila menyangkut urusan aqidah dan keimanan.⁷³ Ketua Yayasan Haji Muhammad Chengho Indonesia (YHMCHI), H. Nurawi, pun seakan mengiyakan pendapat tersebut. Pengusaha sepatu ini pun menjelaskan bahwa dirinya menyambut baik adanya Kerjasama Indonesia Tiongkok. Bahan-bahan dan peralatan yang dipakai di pabrik sepatu miliknya pun banyak yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, bangsa Indonesia maupun Tiongkok sama-sama menginginkan kemajuan. Maka, Kerjasama adalah jawabannya. Tetapi, ia menekankan bahwa Kerjasama itu haruslah bersifat win-win alias saling menguntungkan.⁷⁴

Pandangan senada diberikan oleh H. Hariyanto. Ketua Harian PITI Jatim menilai bahwa kedekatan Indonesia-Tiongkok sebagai hal yang rasional dilakukan karena

⁷² Prof. Akhmad Muzakki, Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, wawancara, 1 Oktober 2020

⁷³ Merry Efendi, Sekretaris DPW PITI Sumatera Selatan, wawancara, 22 Oktober 2020

⁷⁴ H. Nurawi, Ketua Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia (YHMCHI), wawancara, 22 September 2020

Tiongkok saat ini tengah dilirik semua negara. Menurutnya, aspek sejarah berkontribusi terhadap munculnya persepsi Indonesia terhadap Tiongkok. Persepsi negatif terhadap bangsa Tiongkok diwariskan oleh penjajah Belanda maupun Jepang. Tiongkok bangkit secara ekonomi pada masa Deng Xiao Ping. Pilihan Jokowi melirik Tiongkok adalah pilihan yang sangat rasional. Sebagai negara, Indonesia tentu punya dasar untuk bekerjasama dengan Indonesia.⁷⁵

Rasionalitas kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pun sering dibahas dalam jurnal ilmiah oleh berbagai penstudi kajian Indonesia dan Tiongkok. Posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik di level global tentu menarik perhatian banyak negara untuk bekerjasama. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di trimester 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,2 persen bahkan ketika ia mengalami badai pandemi COVID-19. Badan Statistik Tiongkok menunjukkan bahwa besaran pendapatan nasional (GDP) Tiongkok tahun 2019 telah melewati besaran \$10.000 untuk pertama kalinya. Kritik pun tidak jarang diutarakan agar Tiongkok masuk dalam kategori “negara maju”. Dengan begitu ia tidak boleh lagi menikmati berbagai keringanan dalam perdagangan dunia seperti diatur WTO.⁷⁶ Di tengah banyaknya kritik, pertumbuhan Tiongkok yang terus menerus membuatnya terus dilirik oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk digandeng dalam kerangka kerjasama dan investasi.

IV.1.2 Isu Komunisme dalam Relasi Indonesia dan Tiongkok

Dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Indonesia, hubungan Indonesia Tiongkok yang terjadi sejak tahun 1950 mengalami pasang surut. Penting untuk dicatat bahwa hubungan bilateral kedua negara mengalami puncaknya pada tahun 1965 yang

⁷⁵ Hariyanto, Ketua PITI Jawa Timur, wawancara, 19 September 2020

⁷⁶ David Ahlstrom, “Time for China to Accept It Is No Longer a Developing Country”, diakses dari <https://asia.nikkei.com/Opinion/Time-for-China-to-accept-it-is-no-longer-a-developing-country>, tanggal 19 November 2020

ditandai dengan deklarasi poros Jakarta-Peking pada 17 Agustus 1965⁷⁷. Namun tidak lama setelah itu hubungan tersebut harus diakhiri karena munculnya dugaan keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa maha dahsyat yang mencoreng sejarah Republik Indonesia sebagai bangsa, yaitu peristiwa G/30 S PKI yang terjadi beberapa saat setelah deklarasi poros Jakarta-Peking.

Peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap perjalanan hubungan kedua negara pada masa-masa selanjutnya. Sejarah mencatat bahwa pada masa Orde Baru hubungan keduanya berada pada titik nadir. Di tengah banyaknya upaya dan kesempatan melakukan normalisasi hubungan kedua negara, hubungan kedua negara diwarnai kecurigaan-kecurigaan politik dan keamanan. Bahkan dalam konteks Indonesia keputusan-keputusan politik dan perlakuan politik Orde Baru berimbas pada muncul pandangan negatif terhadap warga negara keturunan (Tionghoa) sehingga beberapa peristiwa kekerasan, semisal peristiwa Medan tahun 1994 dan Peristiwa yang mengiringi proses reformasi Mei 1998 menimbulkan trauma mendalam bagi warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia. Warisan traumatik tersebut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sejarah masa lalu. Bahkan upaya normalisasi hubungan kedua negara pada masa reformasi selalu saja dihubungkan dengan sejarah kelim relasi kedua negara. Isu komunisme masih menjadi isu paling santer di tengah upaya normalisasi hubungan. Di kalangan elit muslim Indonesia, setidaknya ada tiga varian pandangan yang berkembang dalam menyikapi isu komunisme: (1) komunisme sebagai isu politik; (2) Komunisme sebagai ideologi yang perlu diwaspadai; (3) Komunisme sebagai sejarah masa lalu.

- ***Komunisme sebagai isu politik***

Isu komunisme yang sangat sensitif ini seringkali dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Dalam banyak peristiwa dan proses politik di Indonesia, semisal pemilihan umum, pemilihan presiden dan lain-lain, isu komunisme seringkali, bahkan

⁷⁷ Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 107

selalu dijadikan sebagai “jualan” politik untuk meraup keuntungan dan menjatuhkan lawan politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh cendekiawan Muslim yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif. Menurutnya, bagaimanapun Jakarta punya pengalaman traumatik dengan penetrasi Beijing terhadap politik Indonesia di masa lalu terutama melalui komunisme. Tetapi saat ini Tiongkok sendiri mengalami proses transformasi sedemikian rupa sehingga komunisme saat ini beda dengan komunisme di masa lalu. Komunisme hari ini memberi ruang hak milik pribadi dengan pengusaha yang dulu justru menjadi musuh komunisme. Tapi bagaimanapun tetap saja stigma komunisme di Indonesia selalu bisa dipolitisasi. Perubahan komunisme di sana tidak mencegah kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia untuk bisa mempabrikasi ancaman komunis tersebut. Maka, sebenarnya Beijing telah berupaya untuk menetralsir isu tersebut dengan diplomasi *people-to-people*, terutama dalam relasi keagamaan, yaitu dengan memperluas jaring-jaring konektivitas antara muslim di Indonesia dan Muslim di Tiongkok. Hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak.⁷⁸

Kelompok-kelompok kepentingan melakukan pabrikasi isu komunisme untuk memberi stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini ditandai dengan semakin menguatnya politik identitas di Indonesia. Sebenarnya fenomena tersebut mengakar pada sejarah Orde Baru yang melakukan deideologisasi di mana apapun dan siapapun yang memiliki kaitan dengan peristiwa tahun 1965 tidak diberikan ruang-ruang aktualisasi politik dalam bentuk apapun, bahkan cenderung “dimatikan”. Karakteristik otoritarian Orde Baru benar-benar membuat pertumbuhan ideologi komunis di Indonesia tidak memiliki ruang. Bahkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang berideologi komunis pun mengalami titik nadir pada masa ini.

Ketika Orde reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokrasi, maka ketakutan akan bangkitnya kembali ideologi komunisme juga muncul. Lebih-lebih dalam perkembangan situasi berikutnya, belakangan menguat kecenderungan politik

⁷⁸ Yudi Latif, Ph.D, cendekiawan Muslim Indonesia, wawancara, 6 Oktober 2020

identitas di Indonesia, termasuk identitas ideologis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Mietzner menyatakan bahwa kecenderungan politik identitas ini menguat pasca pemilu 2014. Isu-isu yang berkaitan dengan etnik, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politik untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya.⁷⁹ Dalam sejarah bangsa Indonesia, ideologi komunis inilah yang paling ampuh untuk “mematikan” lawan politik.

Komunisme sebagai ideologi dinilai cukup efektif digunakan sebagai alat mobilisasi. Menempatkan ideologi komunisme sebagai *common enemy* memberi ruang bagi munculnya sentimen anti komunisme. Sehingga bisa menimbulkan perlawanan secara vertikal terhadap penguasa, misalnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Akh. Muzakki. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini, di akhir masa periode pertama Jokowi hingga di awal periode kedua isu komunisme disunting sedemikian rupa untuk menjadi pemantik dan memobilisasi horizontal supaya orang melakukan perlawanan vertikal kepada penguasa. Ini dilakukan karena karena masyarakat Indonesia pernah mengalami masa pahit ketika komunisme menjadi kekuatan dalam tatanan politik bangsa Indonesia ketika itu. Penggeloraan kembali anti-komunisme hanya efektif untuk mereka yang termasuk dalam generasi tua Indonesia. Maka, hal yang perlu diwaspadai adalah ketika ada kelompok tertentu yang ingin mengungkit kembali sentimen komunisme. Sebaiknya di titik inilah masyarakat tidak gampang mengambil informasi atau mempercayai informasi yang masuk karena sumber informasi sangat *fragmented* dan ada perbedaan generasi. Generasi muda saat ini ditambah dengan bonus demografi beberapa tahun ke depan, mulai melihat bahwa isu komunisme bukanlah isu yang mengancam.⁸⁰

Senada dengan Prof. Akh. Muzakki, Hj. Merry yang merupakan sekretaris DPW PITI Sumatera Selatan, menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan isu komunisme, karena warga Muslim Indonesia telah kuat secara aqidah. Jika

⁷⁹ Marcus Mietzner, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia* (Honolulu: East-West Center, 2015)

⁸⁰ Prof. Akhmad Muzakki, Op.Cit.

ada provokasi terkait isu komunis, maka itu bersifat politis.⁸¹ Begitu pula dengan H. Hariyanto yang menjabat sebagai Ketua PITI Jatim. Baginya, pada masa Orde Lama, hal paling mendasar yang dieksploitasi adalah komunisme. Padahal bila bicara ideologi itu dari Marxisme dan Leninisme. Jika berbicara politik global sebenarnya aktor utama persebaran ideologi komunis adalah Soviet. Ia menjelaskan bahwa Tiongkok adalah negara non-agama, namun ada penghormatan terhadap agama dan non agama di sana.⁸²

Sebagai sebuah isu publik, eksploitasi isu komunisme tidak bisa dihindari, bahkan dengan dukungan media hari ini isu tersebut dengan cepat dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini diamini oleh Eko Siswanto dengan mengatakan isu publik seperti itu tidak bisa dibendung karena memang ada beberapa yang memang memainkan menjadi sebuah isu politik yang kemudian itu dikapitalisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Di satu sisi ia meyakini dasar negara Pancasila yang telah dipedomani sejak awal kemerdekaan adalah prinsip final konsep bernegara di Indonesia. Tetapi di sisi lain, ia tidak memungkiri bahwa masih memiliki satu persepsi bahwa ketika Indonesia mempunyai koneksi yang bagus dengan Tiongkok maka dikhawatirkan ideologi komunis itu akan terbawa masuk. Ia menyarankan perlunya penelitian ilmiah menguji tentang persepsi publik tersebut agar bisa dijadikan pedoman secara obyektif, membendung isu yang muncul seperti isu tenaga kerja Tiongkok. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar tidak semuanya itu benar karena tenaga kerja asing yang datang adalah tenaga kerja yang mempunyai skill lebih dibanding tenaga kerja lokal. Hal ini ia tegaskan setelah mendengar kabar dari kawannya yang memang berada di lokasi pekerja tersebut ditempatkan.⁸³

Sebagai sebuah isu yang bisa dipolitisasi maka peran media menjadi sangat signifikan dalam eksploitasi isu komunisme. Melalui media, isu ini menjadi semakin liar. Politisasi isu menjadi semakin masif, apalagi jika ada upaya “pemelintiran” isu secara

⁸¹ Merry Efendi, Op.Cit.

⁸² Hariyanto, Op.Cit.

⁸³ Dr. Eko Siswanto, Op.Cit.

tidak bertanggung jawab. Hal ini misalnya bisa dipahami dari pernyataan Iskandar Chang. Ketua PITI Jawa Tengah tersebut menyatakan bahwa bentuk atau landasan negara berkaitan dengan latar belakang negara tersebut. Ia meyakini bahwa tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang menyukai komunisme. Meski begitu, ia menegaskan bahwa isu komunisme dibuat seolah-olah menakutkan, padahal isu paling menakutkan di Indonesia itu adalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan kesenjangan ekonomi yang begitu dalam. Isu komunisme adalah isu yang dibolak-balik oleh politisi dan oleh orang-orang yang tidak memahami ideologi komunis itu sendiri. Isu komunisme adalah isu yang memang dahulu pernah ada, tetapi saat ini isu tersebut tidak akan “laku”. Ia sangat menyayangkan bila Indonesia lupa dengan persoalan bangsa yang sebenarnya.⁸⁴

- **Komunisme sebagai ideologi yang harus diwaspadai**

Dalam hal ini, komunisme diperhadapkan secara *vis-a-vis* dengan Pancasila sebagai ideologi resmi negara. Berdasarkan peristiwa sejarah masa lalu bangsa Indonesia, komunisme merupakan “musuh” Pancasila yang karenanya wajib untuk diwaspadai. Bahkan sebenarnya semua ideologi yang berusaha merongrong ideologi Pancasila harus diwaspadai. Akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fisher Zulkarnain, mengatakan bahwa komunisme harus diwaspadai karena kalau terlanjur masuk maka akan berat untuk dikembalikan. Maka, ia bisa memahami adanya gerakan KAMI yang digalakkan oleh salah satu mantan panglima TNI. Poin yang ingin disampaikan KAMI adalah mengawasi tentang kejadian PKI yang dulu terjadi. Ia juga memaklumi mengapa lebih banyak masyarakat Muslim yang terlibat di gerakan KAMI tersebut.⁸⁵

Komunisme sebagai ideologi yang harus diwaspadai dianggap tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia sejatinya adalah apa yang tergambar dalam Pancasila. Sehingga ideologi apapun yang bertentangan dengan

⁸⁴ Dr. Iskandar Chang, Op.Cit.

⁸⁵ Fisher Zulkarnain, Ph.D, cendekiawan Muslim Indonesia, wawancara, 15 September 2020

Pancasila harus diwaspadai. Dalam Pancasila, negara Indonesia memang bukan negara agama, namun secara tegas mengakui agama sebagai sumber moral yang diakui serta hidup dan berkembang secara intrinsik dan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wahidah Br Siregar, akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila, perlu diwaspadai. Ini karena negara Indonesia sangat spesial di mana terdiri dari lebih dari 350 suku bangsa. Ideologi yang cocok hanyalah Pancasila. Indonesia mengakui berbagai agama-agama besar dunia dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan produk budaya lokal dari masyarakat. Hal ini tentu tidak difasilitasi oleh ideologi komunisme. Akademisi yang juga sedang menjabat sebagai Wakil I Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini juga menekankan bahwa semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masih relevan sekali untuk diwaspadai untuk dikritisi seperti itu. Tidak hanya komunisme, tetapi juga berlaku untuk liberalisme dan ideologi lain. Ideologi dapat dimengerti dalam tiga cara. Pertama, mempertahankan Pancasila. Kedua, memodifikasi. Ini berarti bila ada unsur-unsur dari ideologi lain yang bersesuaian dengan Pancasila, maka itu bisa diambil intisarinnya untuk mengayakan Pancasila. Ketiga, bila bertentangan sama sekali dengan Pancasila, maka ideologi itu tidak boleh diambil. Pancasila adalah ideologi paripurna yang pas untuk bangsa Indonesia.⁸⁶

Sebagai ideologi yang harus diwaspadai dan adanya pengalaman traumatik bangsa Indonesia yang meninggalkan luka dalam, maka sebenarnya tidak ada tempat bagi ideologi ini untuk berkembang di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh KH. Hamid Fahmi Zarkasyi, pimpinan PP Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ia mengaku khawatir karena meyakini bahwa Tiongkok membawa program *One Belt One Road* sekaligus dengan ideologi komunisme ke Indonesia.⁸⁷ Namun kewaspadaan terhadap kemunculan komunisme sebagai ideologi yang akan merongrong ideologi negara tentu perlu pembuktian. Sikap traumatik terhadap ideologi komunisme ini tidak lantas

⁸⁶ Wahidah Zein Siregar Ph.D, cendekiawan Muslim Indonesia, wawancara, 25 September 2020

⁸⁷ KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, Direktur Pascasarjana UNIDA Gontor, wawancara, 13 Oktober 2020

membuat relasi bangsa Indonesia dengan Tiongkok dipersoalkan tanpa dasar yang valid. Sikap proporsional dan pembuktian secara akurat mutlak dihadirkan. Kemunculan isu komunisme memang sebuah hal yang wajar, namun juga tidak bisa ditolak begitu saja. Hal ini disebutkan oleh Linda Chang. Menurutnya, kecurigaan adanya kembali ideologi komunisme di Indonesia adalah hal yang wajar. Tetapi ia juga menceritakan bagaimana anak dari rekannya yang sekolah dan tinggal di Tiongkok tidak mengalami masalah, merujuk pada isu adanya pengajaran paham komunisme terhadap mahasiswa asing di Tiongkok.⁸⁸ Menurut KH. Moch. Zaim Ahmad, isu kebangkitan PKI di Indonesia tidak perlu diwaspadai karena terbukti sistem ekonomi sosialis komunis telah gagal. Hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa bangsa yang besar seperti Tiongkok akan dapat mempengaruhi tatanan dunia, apalagi ditunjang dengan kualitas penduduknya.⁸⁹

- ***Ketiga, komunisme sebagai sejarah masa lalu***

Dalam banyak peristiwa sejarah tentu saja ada pelajaran penting yang ada di dalamnya. Pandangan ini misalnya disampaikan oleh Prof. Rofiuddin. Menurut Rektor Universitas Negeri Malang ini, suatu bangsa pasti punya masa lalu. Maka hal yang penting adalah bagaimana memanfaatkan apa yang terjadi di masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Ia pun mengibaratkan kaca spion yang sesekali harus dilihat agar selamat melaju berkendara. Isu komunisme memang masih menjadi konsumsi masyarakat di beberapa daerah. Akar masalahnya adalah adanya soal kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Ini berkaca pada pengalaman kelam di tahun 1965 yang menyentuh banyak dimensi, baik politik, kenegaraan, ekonomi, dan sosial budaya. Ia pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut dan punya cara jitu untuk memastikan agar tidak lagi terjebak dengan isu

⁸⁸ Iskandar Chang, Op.Cit.

⁸⁹ KH. Moh. Zain Ahmad, Op.Cit.

yang sama. Bila Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang handal maka tidak mungkin suatu saat Tiongkok yang malah menjadi ‘pancasilais’.⁹⁰

Peristiwa sejarah masa lalu memang menempatkan komunisme menjadi musuh bangsa yang keberadaannya selalu diwaspadai. Namun sebagai akademisi, pembelajar dan pembaca peristiwa sejarah, maka sikap realistis dan proporsional harus diutamakan. Keberadaannya harus dikritisi sesuai dengan data dan fakta di lapangan, serta tidak termakan dengan isu *hoax* yang kontraproduktif dengan nilai akademis. Walaupun demikian, sikap waspada terhadap gelombang ideologi yang menghantam bangsa Indonesia harus diwaspadai darimana saja datangnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Abdul A’la. Menurut mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini, secara realistis sejatinya komunisme sudah tidak ada. Tiongkok hari ini adalah Tiongkok yang sangat kapitalistik. Indonesia tetaplah harus waspada tetapi dalam arti tetap punya nilai jati diri dan menjaganya dengan baik. Jangan berlebihan menanggapi isu komunisme. Saat ini sedang terjadi perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat dan kecenderungan bahwa Amerika Serikat sedang kalang kabut menghadapi ekspansi perdagangan Tiongkok. Dalam konteks umat Islam dan akademisi, maka universitas harus menyikapi hal tersebut dengan paparan data yang valid, tidak terpancing isu yang beredar, apalagi *hoax*.⁹¹

Peristiwa sejarah juga bisa saja memberi efek traumatik berkepanjangan. Lebih-lebih jika peristiwa sejarah tersebut sudah membentuk *collective memory*⁹² Peran sejarah dalam ingatan sosial bangsa perlu disadari pengaruhnya bagi kehidupan bangsa. Fobia/ketakutan berkepanjangan itu lahir dari *collective memory* tentang peristiwa. Dalam konteks inilah komunisme menjadi fobia yang menghantui perjalanan

⁹⁰ Prof. AH. Rofiuddin, Rektor Universitas Negeri Malang, wawancara, 22 Oktober 2020

⁹¹ Prof. KH. Abdul A’la, Pengasuh Pesantren An-Nuqayyah, wawancara, 21 September 2020

⁹² Terdapat dua istilah yang jamak digunakan yaitu *collective memory* dan *social remembering*. Halbwachs adalah penstudi yang menggunakan istilah *collective memory*. Lihat dalam Halbwachs, M. *Closer on Collective Memory* (Chicago: The University of Chicago Press, 1992), sementara Misztal adalah penstudi yang menggunakan istilah *social memory*. Lihat dalam Misztal, B. A. *Theories of Social Remembering* (London: Open University Press, 2003).

sejarah, dan juga dieksploitasi. Ustad Mahdi, pendiri Yayasan Al Mahdi Magelang, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami fobia. Indonesia fobia dengan bangsa/budaya Tiongkok. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tiongkok ditakuti. Bahkan ia juga menilai Indonesia juga fobia dengan bangsa/budaya Arab. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan negatif terhadap bangsa/budaya Arab, sehingga muncul pelabelan teroris terhadap mereka yang berbaju gamis. Begitu pula dengan bangsa/budaya Tiongkok yang diasosiasikan dengan paham komunisme.⁹³

Dalam konteks yang lebih spesifik, tentu saja Orde Baru memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam membentuk kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun jika ditelisik lebih jauh, apa yang dilakukan Orde Baru juga merupakan pilihan rasional berdasarkan kondisi dan tatanan global saat itu. Sehingga mungkin saja pertimbangan-pertimbangan ekonomi juga menjadi pertimbangan utama. Hal senada juga diungkapkan oleh Ustad Tiar Anwar Bakhtiar. Akademisi, penulis buku, sekaligus pengurus PERSIS (Persatuan Islam) ini menyatakan bahwa komunisme di Indonesia juga merupakan musuh politik bagi Orde Baru sehingga isu komunisme menjadi sesuatu yang sangat penting. Setelah era Orde Baru, perubahan politik global terjadi di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan dunia. Prediksi adanya penyeimbang/kekuatan baru pun muncul di mana India, Tiongkok, dan negara-negara Muslim disebut. Indonesia yang tidak terhitung sebagai pemain besar di level global harus mempertimbangkan munculnya ini. Pengalaman buruk dan trauma dengan Tiongkok cukup mengganggu kelancaran upaya pemerintah Indonesia membangun relasi dengan Tiongkok. Baginya, relasi Indonesia dan Tiongkok saat ini masih bertumpu pada kerjasama ekonomi, bukan kerjasama politik.

Dahlan Iskan pun memandang perlunya mempelajari sejarah komunisme agar masyarakat Indonesia tidak gampang terprovokasi. Menurutnya, pada tahun 1965 posisi Islam dirugikan sekali karena di satu pihak Islam dibenturkan dengan komunis sehingga masyarakat memiliki stigma bahwa Tionghoa itu *China* dan *China* itu

⁹³ H. Mahdi, Pendiri Yayasan Al Mahdi Magelang, wawancara, 20 September 2020

komunis, sehingga pada akhirnya Tionghoa banyak yang masuk (eksodus) ke Kristen dan ada konfrontasi Islam vs Kristen. Sebenarnya komunisme yang ada di Tiongkok antara dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Ia menegaskan bahwa ideologi apapun tidak masalah sepanjang ideologi tersebut dapat membawa pengikutnya menjadi sejahtera.⁹⁴

Menelisik beberapa varian pandangan di atas sesungguhnya pelurusan sejarah dan sikap proporsional sebagai bangsa menjadi tuntutan yang harus urgen. Karena jika dicermati lebih lanjut, iklim kerja sama Indonesia-Tiongkok pada era Reformasi sebenarnya bisa dikatakan semakin kondusif. Hubungan kedua negara terus meningkat di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan memuncak dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis pada tahun 2005. Saat itu, Presiden Tiongkok, Hu Jintao, berkunjung ke Indonesia dalam rangka memperingati 50 tahun KAA.⁹⁵ Pada pertemuan bilateral di Singapura saat APEC Economic Leaders Meeting, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RRT, Hu Jintao, bahkan mencanangkan tahun 2010 sebagai “Tahun Persahabatan Indonesia-Tiongkok”.⁹⁶ Jalinan kerjasama yang terus meningkat hingga saat ini menjadi pertanda bahwa baik Indonesia dan Tiongkok menganggap masing-masing pihak adalah mitra strategis.

Mencermati konteks ekonomi politik global hari ini, dimana Tiongkok sebagai negara *super power*, sejatinya Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra kerja sama ekonomi dan politik-keamanan. Demikian juga sebaliknya, Tiongkok tentu membutuhkan Indonesia. Kondisi saling membutuhkan dan saling mendukung kepentingan nasionalnya ini menjadi pertimbangan utama terlaksana kerja sama bilateral di berbagai bidang. Dengan pertimbangan itulah, maka kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok menuntut keberpihakan strategi kepada kepentingan

⁹⁴ Dahlan Iskan, Op.Cit.

⁹⁵ Lidya Christin Sinaga, *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013), 2

⁹⁶ “Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-Cina”, Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/324-memaknai-tahun-persahabatan-indonesia-cina->

nasional. Walaupun dalam dinamika politik regional persepsi terhadap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan Asia-Pasifik masih ada.

IV.1.3 Peningkatan Kerjasama Indonesia-Tiongkok di Bidang Pendidikan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan

i. Pendidikan

Hubungan antara Indonesia-Tiongkok semakin masif dengan maraknya pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Tiongkok dan semakin banyaknya pusat pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia. Hal ini disambut positif oleh beberapa tokoh dan akademisi muslim Indonesia dimana mereka menganggap eskalasi hubungan tersebut bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi Indonesia.

Jona Widhagdo Putri, tenaga ahli Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang lulus dari Fudan University, Tiongkok, mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok di sektor pendidikan meningkat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Tiongkok (termasuk Macau dan Hongkong) di mana pada tahun 2018 mencapai 14.233 mahasiswa dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 15.670 mahasiswa. Jumlah ini lebih banyak daripada jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan ke Australia dan Amerika Serikat. Peningkatan *people-to-people connectivity* ini juga didukung dengan berbagai program beasiswa yang dicanangkan pemerintah Tiongkok mulai dari kementerian pendidikan dari pemerintah daerah, seperti *Beijing Government Scholarship* dari pemerintah kota Beijing. Selain itu, ada juga beasiswa pemerintah Tiongkok, yaitu *China Scholarship Council*. Ia menegaskan jadi kemampuan beasiswa mereka yang cukup tinggi ini merupakan salah satu daya tarik mahasiswa Indonesia ke Tiongkok. Selain itu, baginya banyaknya investasi Tiongkok di Indonesia juga bisa

meningkatkan kesempatan bekerja mereka setelah menyelesaikan studi di Tiongkok.⁹⁷

Peningkatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok disambut baik dari akademisi dan pejabat publik Pendidikan Tinggi karena tentu mempromosikan dan memfasilitasi *people-to-people connectivity*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Rofiuddin, Rektor Universitas Negeri Malang, menanggapi positif hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam bidang pendidikan tersebut. Ini juga ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin antara kampus di Indonesia dengan kampus di Tiongkok sejak sepuluh tahun yang lalu. Universitas Negeri Malang (UM) yang ditunjuk untuk berpartner dengan Guangzhou University langsung membentuk Pusat Bahasa Mandarin yang kemudian disebut dengan PTIMUM dengan proses persiapan selama satu tahun. Baginya, Tiongkok sangat mendukung program tersebut dengan mengirimkan sepuluh dosen untuk mengajar Bahasa Mandarin dengan biaya transportasi dan gaji dari pemerintah Tiongkok, sementara pihak UM hanya memberikan tempat dan akomodasi. Proses tersebut dilakukan selama satu tahun hingga UM bisa memperoleh SDM untuk mengajar bahasa mandarin di PTIMUM. Selain itu, UM yang telah memiliki Prodi Bahasa Mandarin juga melakukan pertukaran pelajar selama satu sampai dua semester. Kementerian Pendidikan Tiongkok memfasilitasi penuh program pertukaran tersebut. Menurut Prof. AH. Rofi'uddin, dukungan pendanaan yang tinggi ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus belajar dari Tiongkok dimana sebenarnya dukungan tersebut tidak hanya dilakukan dengan Indonesia tetapi seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena adanya misi *One Belt One Road* (OBOR) yang dicanangkan oleh Tiongkok memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga Tiongkok dipandang menjadi negara yang cukup kuat dan perlu diperhitungkan di lingkungan internasional.⁹⁸

⁹⁷ Jona Widagdho Putri, Tenaga Ahli Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, wawancara, 22 Oktober 2020

⁹⁸ Prof. AH. Rofiuddin, Op.Cit.

Dampak dari peningkatan kerjasama pendidikan kedua negara yang paling nyata terlihat adalah bertambahnya minat masyarakat mempelajari Bahasa Mandarin. Meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin juga sebetulnya tidak lepas dari gencarnya pemerintah Tiongkok menawarkan beasiswa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan bahkan menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi di Tiongkok.⁹⁹ Begitu juga dengan kerjasama penyelenggaraan ujian standarisasi Bahasa Mandarin (HSK) di Indonesia.¹⁰⁰ Fenomena ini dinilai positif oleh Iskandar Chang. Menurutnya, saat ini bahasa Mandarin menjadi bahasa yang penting dalam dunia bisnis karena pergerakan pusat ekonomi mulai bergeser ke Tiongkok. Oleh sebab itu, belajar bahasa Mandarin menjadi peluang yang baik di lingkungan bisnis dan ekonomi internasional.¹⁰¹ Hal ini senada dengan Prof. Abd. A'la yang menyatakan bahwa adanya eskalasi hubungan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia-Tiongkok menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia agar bisa belajar ke Tiongkok atau sebaliknya, karena proses dalam menimba ilmu tersebut juga bisa sekaligus mempelajari kebudayaannya. Oleh sebab itu, kontekstualisasi nilai-nilai Islam dengan budaya Tiongkok juga bisa dilakukan seperti halnya kontekstualisasi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Budha pada abad ke 16. Hal ini juga sebenarnya sudah terbukti dengan berdirinya Masjid Cheng Ho di Surabaya dan Masjid di Sumenep, Madura yang arsitekturnya *Chinese-oriented*.¹⁰² Senada dengan Iskandar Chang, bagi KH. Hasib Wahab Abdullah, bila kegiatan pendidikan dilakukan dengan baik di Tiongkok dan diiringi dengan dakwah maka silakan saja. Pesantren yang belajar bahasa Mandarin adalah hal yang baik.¹⁰³

⁹⁹ "Bahasa Mandarin Makin Populer di Indonesia", Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/bahasa-mandarin-makin-populer-di-indonesia-/5627047.html>, tanggal 22 November 2020

¹⁰⁰ Feri Ansori, *Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Hubungan Sosial Budaya China-Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol.4, No.1, Maret 2017, 14

¹⁰¹ Dr. Iskandar Chang, Op.Cit.

¹⁰² Prof. Abd. A'la, Op.Cit.

¹⁰³ KH. Hasib Wahab Abdullah, Op.Cit.

Menurut akademisi muslim UIN Sunan Ampel Surabaya, Wahidah Zein Siregar, maraknya pengajaran bahasa mandarin di Indonesia ini merupakan perkembangan, penguasaan, dan pengetahuan bahasa yang bersifat terbuka dan bisa belajar dari siapapun. Sebab, hal ini juga sesuai dengan anjuran Rasulullah yang menyuruh umatnya berdakwah dengan bahasa suatu kaum. Selain itu, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa beruntunglah orang yang menguasai bahasa suatu kaum, karena dia akan terhindar dari tipu muslihat kaum tersebut. Seperti halnya bahasa Arab yang menjadi populer di Indonesia karena sebagian masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam serta bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional sehingga banyak dipelajari. Sementara saat ini, Tiongkok juga menempati posisi sangat penting di dunia, maka belajar bahasa Mandarin menjadi suatu peluang agar bisa menjalin relasi yang lebih baik. Ia juga menegaskan perlunya kedutaan Indonesia di Tiongkok mengadakan acara budaya yang lebih banyak pertukaran pelajar agar tidak stagnan hanya pada aspek ekonomi saja sehingga persahabatan semakin lama bisa semakin indah. Hal senada dilontarkan oleh Linda Chang yang melihat bahwa pertukaran pelajar dan pendirian pusat bahasa Mandarin sebagai upaya peningkatan kualitas SDM. Tiongkok memiliki kecanggihan dalam ilmu pengetahuan yang juga perlu dipelajari oleh orang Indonesia.¹⁰⁴

Meski begitu mempelajari Bahasa Mandarin bukanlah satu-satunya bekal yang harus dipersiapkan masyarakat Indonesia untuk menyambung relasi dengan Tiongkok. Menurut H. Mahdi (Kwee Giok Yong), Muslim Tionghoa yang merupakan pendiri Masjid Cheng Ho Magelang, seharusnya pelajar-pelajar Indonesia yang dikirim ke Tiongkok haruslah dibekali dengan ilmu agama terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga ma'had tertentu agar aqidah dan akhlaknya lebih kuat sehingga pelajar-pelajar tersebut tidak terpengaruh dengan berbagai pergaulan yang kurang baik di Tiongkok atau malah justru terjebak dalam pernikahan dengan warga Tiongkok yang baru saja masuk islam. Sebab,

¹⁰⁴ Wahidah Zein Siregar, Op.Cit.

menurutnya pernikahan dengan orang mu'alaf baru bisa mengancam pernikahan itu sendiri karena masih kurangnya ilmu tentang islam secara menyeluruh.¹⁰⁵

Pentingnya pertukaran pelajar antara Indonesia dan Tiongkok juga disampaikan oleh Ust. Hamid Fahmy Zarkasyi, direktur Pascasarjana Universitas Darussalam, Gontor, Jawa Timur. Menurutnya, kerjasama dalam bidang pendidikan sudah umum dilakukan dimana beasiswa pertukaran pelajar terus digalakkan. Penerapan ilmu pelajar-pelajar Indonesia yang berasal dari Tiongkok inilah yang seharusnya bisa diterapkan di Indonesia dimana transfer pengetahuan dan teknologi seharusnya bisa dilakukan. Jika transfer pengetahuan dan teknologi bisa diterapkan di Indonesia, maka hal ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok. Sebab, ketergantungan yang terus-menerus bisa membahayakan bagi umat Islam dan Indonesia, di mana Tiongkok membuat proyek, investasi, serta memberikan pinjaman sehingga Indonesia tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Lebih lanjut, ia juga menegaskan kehebatan Tiongkok dalam bidang riset yang memiliki sembilan Langkah, di mana dari sebuah penelitian riset yang bersifat teoritis bisa dikembangkan menjadi penelitian yang bersifat teknis hingga bisa menciptakan suatu produk. Pemerintah Tiongkok pun juga ikut andil dengan membiayai proses riset tersebut jika layak menjadi produk industri. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar penelitian mungkin hanya melakukan langkah satu sampai empat, sehingga penelitian hanya berupa penulisan karya ilmiah yang diletakan di perpustakaan saja. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh industrinya yang belum *match* dengan perguruan tinggi.¹⁰⁶

Penelitian yang dilakukan oleh kedua negara pada akhirnya akan mendorong terjadinya pemutakhiran pengetahuan dan wawasan antar masyarakat. Menurut KH. Moch. Zaim Ahmad, ilmu pengetahuan dan ekonomi yang tumbuh pesat di Tiongkok perlu dipelajari oleh mahasiswa Muslim dari Indonesia agar terjadi

¹⁰⁵ H. Mahdi, Op.Cit.

¹⁰⁶ KH. Hamid Fahmy Zarkasy, Op.Cit.

transfer pengetahuan. Pemahaman pada aspek budaya juga penting dilakukan untuk mewujudkan kesepahaman. Pemahaman pada budaya Tiongkok akan mendukung terjadinya dialektika kehidupan sosial.¹⁰⁷ Pemahaman yang sama disampaikan oleh Hj. Merry yang melihat bahwa pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok adalah peluang, bukan ancaman. Apalagi *cross-cultural understanding* terhadap budaya Tiongkok, seperti makanan, seni barongsai, sudah bisa diterima di Indonesia.¹⁰⁸ Tokoh nasional, Dahlan Iskan, bahkan telah memiliki lembaga ITCC (*Indonesia Tionghoa Culture Center*) yang setiap tahun mengirim ratusan pelajar di Indonesia untuk studi di Taiwan, Tiongkok dan Hong Kong.¹⁰⁹

Meski disambut positif, beberapa elit Muslim Indonesia masih ragu terhadap masa depan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok. Salah satunya adalah Fisher Zulkarnain. Menurut akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, pertukaran pelajar Indonesia-Tiongkok dan wisatawan asal Tiongkok yang semakin meningkat bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Jika Indonesia tidak membatasi diri, maka hal ini bisa menjadi ancaman. Sebab, orang asal Tiongkok sudah banyak yang tinggal di Indonesia dan semakin sulit membedakannya dimana dari segi bahasa dan nama sudah seperti layaknya warga 'asli' Indonesia. Selain itu, sebagian sektor ekonomi juga dikuasai oleh Tiongkok, seperti Ciputra, Salim Group (BCA), RCTI dan pengusaha-pengusaha properti. Menurutnya, orang-orang terkaya di Indonesia itu hampir 90% itu orang *Chinese* semua, walaupun nama-namanya ada nama Muslim atau nama Indonesia. Tetapi, pada prinsipnya mereka yang bergabung dengan nama Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh pengusaha Indonesia. Oleh karena itu, ia juga mengungkapkan bahwa hal ini bisa menjadi ancaman ekonomi yang jika dibiarkan akan menguasai Indonesia sehingga harus lebih berhati-hati. Menurutnya, Tiongkok yang lebih unggul dari segi ekonomi di negara Indonesia harus diimbangi dengan kebijakan

¹⁰⁷ KH. Moch. Zaim Ahmad, Op.Cit.

¹⁰⁸ Merry Efendi, Op.Cit.

¹⁰⁹ Dahlan Iskan, Op.Cit.

khusus dari pemerintah agar bisa meningkatkan kapasitas ekonomi bagi masyarakat asli Indonesia.¹¹⁰

Senada dengan Fisher Zulkarnain, keraguan juga disampaikan oleh Tiar Bachtiar Anwar, pengurus organisasi Persatuan Islam (PERSIS). Menurutnya, kerjasama dalam sektor pendidikan seperti pendirian pusat bahasa Mandarin dan pertukaran pelajar dapat dilihat dari skema ekonomi. Ia melihat hal tersebut bisa menjadi ancaman, tetapi peluang ekonominya juga cukup besar. Hal ini tergantung pada kemampuan Indonesia membangun relasi pasar baru dengan Tiongkok dan kemampuan memanfaatkan Tiongkok sebagai pasar, dan bukan sebaliknya di mana Indonesia sebagai pasar. Ia juga menegaskan bahwa kedua negara merupakan negara yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh jika menjalin relasi dengan Tiongkok.¹¹¹

ii. Pariwisata

Selain masifnya pertukaran pelajar antara Indonesia-Tiongkok, di sektor pariwisata juga mengalami peningkatan dimana wisatawan asal Tiongkok mulai mendominasi di tempat-tempat wisata, terutama di Bali. Menurut Jona Widagdho Putri, tren kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia memang mengalami peningkatan kunjungan selama 2014-2019. Pemerintah Indonesia juga terus menggalakkan berbagai program promosi seperti *Wonderful Indonesia*, *Indonesia Festival* di Tiongkok, dan lainnya yang mana bekerjasama dengan agen pariwisata di Tiongkok. Di bulan Agustus 2019, pemerintah Indonesia melalui perwakilan kedutaan di Beijing pun menyelenggarakan "Indonesia-China Business Forum on Investment and Tourism 2019". Forum Bisnis tersebut yang dihadiri lebih dari 200

¹¹⁰ Fisher Zulkarnain, Op.Cit.

¹¹¹ Tiar Anwar Bachtiar, Pengurus PERSIS, wawancara, 19 September 2020

pelaku usaha dari kedua negara tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerja sama investasi dan pariwisata Indonesia-Tiongkok.¹¹²

Peningkatan aktivitas kerjasama di bidang pariwisata ini ditanggapi positif oleh tokoh muslim seperti Prof. Rofiuddin yang menuturkan bahwa kehadiran wisatawan akan selalu menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ia mengingatkan bahwa memang harus dibarengi dengan pengelolaan pariwisata yang baik agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terkontrol dengan baik.¹¹³ Hal ini juga dijelaskan oleh Iskandar Chang mengenai pentingnya prosedur keamanan pengecekan visa turis yang harus diterapkan secara ketat agar turis yang masuk tidak membawa sesuatu yang bisa merusak bangsa, misalnya membawa narkoba.¹¹⁴ Sementara itu, Prof. Abd. A'la juga menuturkan bahwa wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia menjadi peluang besar bagi Indonesia sehingga harus ditingkatkan dan diperluas dimana para wisatawan bukan hanya ke tempat wisata yang bersifat sekedar untuk rekreatif saja, tetapi juga pariwisata pusat-pusat keagamaan di Indonesia. Ia juga tidak mengkhawatirkan terkait nilai-nilai orang Tiongkok yang mungkin bisa mempengaruhi Indonesia. Sebab, menurutnya, hal itu justru menjadi peluang untuk memperkenalkan dan mempromosikan tentang Indonesia dan nilai-nilai islam yang hampir menyentuh seluruh lini kehidupan. Hal ini menjadi penting untuk mempelajari bahasa Mandarin untuk menjadi alat komunikasi, mengingat sebagian besar wisatawan asal Tiongkok tidak bisa melakukan komunikasi dengan bahasa inggris.¹¹⁵

Menurut pengalaman akademisi Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Jogjakarta, Prof. Dicky Sofjan, jumlah turis dari Tiongkok yang datang ke Indonesia semakin banyak di mana pelayanan katering dan restoran juga

¹¹² "Tingkatkan Kerjasama Investasi dan Pariwisata RI-China KBRI Beijing Gelar Forum Bisnis, diakses dari <https://rmco.id/baca-berita/internasional/18559/tingkatkan-kerja-sama-investasi-dan-pariwisata-richina-kbri-beijing-gelar-forum-bisnis>, tanggal 25 November 2020

¹¹³ Prof AH Rofiuddin. Op.Cit.

¹¹⁴ Dr. Iskandar Chang, Op.Cit.

¹¹⁵ Prof. KH. Abd. A'la, Op.Cit.

menyiapkan fasilitas untuk wisatawan asal Tiongkok. Menurutnya, hal ini menjadi peluang yang menguntungkan bagi Indonesia karena kehadiran wisatawan ini akan menarik investor-investor untuk membangun koneksi dan relasi di Indonesia. Ia pun melihat sebagai peluang tidak hanya untuk peningkatan ekonomi, tetapi juga pemahaman terhadap budaya, pertukaran pengetahuan, dan lain-lain. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan membentengi diri dengan nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Oleh sebab itu, setiap orang harus memiliki nilai-nilai nasionalisme yang tertanam dengan kuat sehingga ketika berkenalan atau bergaul dengan orang asing, mereka tidak terpengaruh dengan nilai-nilai buruk dari orang lain.¹¹⁶

Prof. Akh. Muzakki juga memandang positif peningkatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok di sektor pariwisata. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pariwisata di Bali didominasi oleh turis dari Tiongkok di mana berbagai hotel juga sudah menyediakan petunjuk-petunjuk berbahasa Mandarin. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan bisnis pariwisata dengan melatih pemandu wisata dan supir taksi menggunakan bahasa Mandarin. Namun, peluang ini hanya ditangkap di Manado, di mana pemandu wisata sudah memiliki kapasitas komunikasi dalam bahasa mandarin. Sedangkan pemandu wisata dan sopir taksi di Bali belum memiliki kemampuan berbahasa Mandarin. Secara umum, Indonesia menangkap peluang ini sehingga sekolah-sekolah pembelajaran Bahasa Mandarin pun bermunculan. Meroketnya ekonomi Tiongkok ini merupakan peluang untuk memantik penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok.¹¹⁷

Di masa pandemi COVID-19, bidang pariwisata adalah bidang yang terdampak secara signifikan, baik di Tiongkok maupun Indonesia. Di bulan Januari 2020, kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,62 persen

¹¹⁶ Prof. Dicky Sofjan, cendekiawan Muslim Indonesia, wawancara, 7 Oktober 2020

¹¹⁷ Prof. Akh. Muzakki, Op.Cit.

dibandingkan Desember 2019.¹¹⁸ Selama pandemi ini berlangsung, baik Indonesia maupun Tiongkok menutup penerimaan kunjungan turis asing. Hal itu membuat pendapatan ekonomi yang di dapat dari pariwisata baik pihak Indonesia maupun Tiongkok mengalami penurunan yang drastis. Akibat pandemi COVID-19, Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 4 miliar dolar di sektor pariwisata.¹¹⁹ Maka dari itu, pemerintah Indonesia yang membuka kembali akses pariwisata di Bali dan Manado sedang getol berpromosi di Tiongkok. Seperti disarankan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok, Indonesia bisa meniru Tiongkok yang membangun fasilitas destinasi baru yang bertujuan untuk menetralkan stres yang dialami oleh masyarakat selama masa pembatasan sosial.¹²⁰ Destinasi baru tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang sebagai menarik lebih banyak turis lokal dan asing untuk berkunjung pasca pandemi COVID-19.

iii. Ketenagakerjaan

Selain bidang pendidikan dan pariwisata, Indonesia dan Tiongkok juga menjalin kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Kerjasama ini adalah bagian dari upaya kedua negara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerjasama ini mempertimbangkan Tiongkok sebagai negara investor terbesar ke-4 di Indonesia.¹²¹ Menurut Jona Widagdho Putri yang juga ahli sinologi, dalam tiga tahun terakhir investasi Tiongkok di Indonesia terus mengalami peningkatan, khususnya di bidang industri logam, industri listrik, dan pembangunan infrastruktur publik. Bahkan

¹¹⁸ "Pariwisata Indonesia Tiongkok Diyakini Kembali Bangkit Usai Pandemi", diakses dari <https://www.jawapos.com/internasional/18/09/2020/pariwisata-indonesia-tiongkok-diyakini-kembali-bangkit-usai-pandemi/>, tanggal 25 November 2020

¹¹⁹ "Turis Asal China Bisa Pulihkan Pariwisata Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, Tujuan Favoritnya Bali", diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/07/18/turis-asal-china-bisa-pulihkan-pariwisata-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19-tujuan-favoritnya-bali>

¹²⁰ "Pariwisata Indonesia Tiongkok Diyakini Kembali Bangkit Usai Pandemi", diakses dari <https://www.jawapos.com/internasional/18/09/2020/pariwisata-indonesia-tiongkok-diyakini-kembali-bangkit-usai-pandemi/>, tanggal 25 November 2020

¹²¹ "RI-China Teken Kerja Sama Pelatihan Buruh", diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4839455/ri-china-teken-kerja-sama-pelatihan-buruh>, tanggal 21 November 2020

industri logam tetap berjalan meski masa pandemi dan hal ini tentu sangat membantu perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat COVID-19.¹²²

Isu ketenagakerjaan asing khususnya dari Tiongkok yang sering menjadi polemik mendapat respon beragam dari para elite Muslim Indonesia. Jona Widagdo Putri mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan mengapa investasi banyak menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan karena krisis lulusan teknik di Indonesia yang memang pada dasarnya tidak cukup. Oleh karena itu, para investor membutuhkan pakar teknik sipil untuk menyelesaikan pembangunan proyek mereka di Indonesia pada awal pembangunan, khususnya pada sektor industri logam dan industri pembangunan infrastruktur publik. Sejatinya, pemerintah Indonesia sendiri selalu mengedepankan penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, kelestarian lingkungan serta *adapt value*. Data dari Universitas Indonesia bersama Kemenristek Dikti dari Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK menunjukkan adanya *gap* antara ketersediaan dan kebutuhan dari lulusan teknik baik S1 ataupun D3 yang ada di Indonesia. Bila dibiarkan terus berlanjut maka akan terakumulasi lebih tinggi. Data tersebut harusnya bisa menjadi proyeksi bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan kebutuhan dari sarjana dan diploma vokasi teknik yang ada di Indonesia.¹²³

Kehadiran tenaga kerja asal Tiongkok ditanggapi berbeda oleh Tiar Bachtiar Anwar. Menurutnya, Tiongkok mempersyaratkan tenaga kerja asing dari level tinggi hingga rendah untuk negara yang akan diberikan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara Eropa atau Amerika yang tidak mempersyaratkan tenaga kerja. Oleh sebab itu, jika Tiongkok berinvestasi di Indonesia, maka banyak orang Tiongkok yang datang ke Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan masalah kultural, terutama agama dimana mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk

¹²² "Pengamat: Pastikan Kerjasama RI-China Buka Lapangan Kerja Lokal", diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1540192/pengamat-pastikan-kerja-sama-ri-china-buka-lapangan-kerja-lokal>, tanggal 21 November 2020

¹²³ Jona Widagdo Putri, Op.Cit.

agama Islam memungkinkan terjadinya gesekan. Ia menegaskan bahwa di Singapura saja ada perbenturan antara orang Tiongkok yang lahir di daratan Tiongkok dengan orang Tiongkok yang lahir di Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga harus memikirkan solusi penyelesaian untuk persoalan kependudukan, sosial, dan kebudayaan yang muncul antara warga Indonesia dengan ‘orang’ Tiongkok. Ia menegaskan pemerintah harus memperhitungkan apakah biaya yang harus dihabiskan oleh Indonesia dalam menyelesaikan eksese kebudayaan dan hubungan antar manusia lebih kecil dibandingkan keuntungan dalam hubungan dengan Tiongkok atau bahkan lebih besar.¹²⁴

Kekhawatiran akan adanya gesekan sosial dan budaya antara masyarakat lokal dan pekerja asing bisa dimengerti karena terjadi peristiwa di mana investasi Tiongkok memicu polemik yakni rencana hadirnya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok untuk pembangunan smelter di Kawasan Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk hal ini, Jona Widagdho Putri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus bisa memastikan bahwa investasi asing menciptakan lapangan kerja lokal, memberikan kesempatan transfer teknologi, membawa manfaat bagi warga lokal, memelihara kelestarian lingkungan hidup, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.¹²⁵

Seperti halnya Tiar Bachtiar Anwar yang penuh kewaspadaan, Linda Chang pun menuturkan kekecewaan terkait masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok karena tenaga kerja dalam negeri masih melimpah ruah. Menurutnya, tenaga kerja dalam negeri juga cukup berkualitas sebab di jaman kepemimpinan Soeharto tenaga kerja Indonesia sudah bisa membangun tol dan jembatan layang di Malaysia. Namun, di era kepemimpinan Jokowi ini justru mengalami gejolak ekonomi dengan kedatangan tenaga kerja asing yang berdampak pada tidak diserapnya tenaga kerja

¹²⁴ Tiar Bachtiar Anwar, Op.Cit.

¹²⁵ “Pengamat: Pastikan Kerjasama RI-China Buka Lapangan Kerja Lokal”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1540192/pengamat-pastikan-kerja-sama-ri-china-buka-lapangan-kerja-lokal>, tanggal 21 November 2020

lokal. Ia menilai bahwa sisi *bargaining* antara kedua negara harus bisa saling menguntungkan kedua belah pihak di mana tenaga kerja dalam negeri dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk transfer teknologi dari Tiongkok.¹²⁶

Mengenai isu ketenagakerjaan, Prof. Akh. Muzakki menuturkan bahwa jika dilihat dari segi jumlah tenaga kerja Indonesia di Tiongkok lebih banyak daripada tenaga kerja Tiongkok yang bekerja di Indonesia. Narasi-narasi publik yang seringkali memperdebatkan hal ini juga harus melakukan validasi dan verifikasi data dengan cermat. Sebab, ada aspek lain yang penting untuk diperdebatkan dimana jika dilihat dari sisi ekonomi, hal ini menguntungkan Indonesia. Jika membeli teknologi dari Jerman, maka hanya teknologinya yang datang berupa mesin. Sedangkan, pembelian teknologi dari Tiongkok akan dibarengi dengan tenaga kerjanya sehingga yang datang ke Indonesia bukan hanya mesinnya, tetapi juga tenaga kerja yang melakukan transfer teknologi kepada orang Indonesia sampai tenaga kerja dalam negeri bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa itulah salah satu kelebihan dan keunggulan Tiongkok yang harus diapresiasi dalam konteks ketenagakerjaan.¹²⁷

IV.2 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Islamisasi dan Perkembangan Islam di Indonesia dan Tiongkok

Agama Islam merupakan keyakinan yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Artefak sejarah menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama pertama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Agama Hindu dan Budha hadir terlebih dahulu di Nusantara kemudian disusul oleh dominasi agama Islam hingga saat ini. Proses perubahan keyakinan masyarakat Indonesia menjadi dominan beragama Islam tentu mengharuskan adanya dakwah atau persebaran misi keagamaan.

¹²⁶ Linda Chang, Op.Cit.

¹²⁷ Prof. Akh. Muzakki, Op.Cit.

Dalam analisis para sejarawan, terdapat tiga teori tentang persebaran misi Islam di Nusantara, yakni teori Gujarat, Mekkah, dan Persia. Teori pertama meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat yang melakukan hubungan perdagangan sembari berdakwah. Perdagangan yang dilakukan para pedagang Gujarat ini melalui Selat Malaka pada sekitar abad ketujuh. Waktu itu, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal di dunia hingga pedagang Muslim dari Gujarat, India dapat berinteraksi dengan penduduk Nusantara di Malaka. Teori ini dikemukakan oleh Shouck Hurgronje dari Belanda.¹²⁸

Teori kedua meyakini bahwa misi dakwah Islam tersebar melalui interaksi Muslim Persia. Michael Laffan dalam bukunya berjudul *Sejarah Islam Nusantara*, mengungkapkan bukti adanya kesamaan corak budaya istana para penguasa di kawasan Barat Nusantara dengan India yang sangat mungkin terjadi karena Asia Tenggara berada di persimpangan dua zona perdagangan, yakni zona Samudera Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Sejarah kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara paling awal berasal dari berbagai catatan berbahasa Mandarin yang merekam kedatangan para utusan dengan nama-nama yang tampaknya menggunakan nama Muslim. Sementara itu, catatan sejarah berbahasa Arab menyebutkan berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok Selatan bertumpu di titik Selat Malaka.¹²⁹

Teori ketiga melandasi keyakinan tentang masuknya Islam ke Nusantara melalui interaksi langsung penduduk Nusantara dengan Muslim Mekkah sejak awal mula Islam disiarkan. Teori ini dilandasi oleh berita dari Tiongkok pada zaman Dinasti Tang, kurang lebih tahun 674 Masehi, bahwa telah ditemukan perkampungan Muslim di pantai Barat Sumatera pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal ini didukung adanya jalur

¹²⁸ Ari Welianto, "Teori Masuknya Islam di Nusantara", diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/nusantara?page=all>, tanggal 20 November 2020

¹²⁹ Ibid.

perdagangan yang bersifat internasional sehingga memungkinkan Islam tersebar pada masa awal-awal perkembangannya dari Mekkah sebelum abad Ketujuh Masehi.¹³⁰

Ketiga teori mengenai bagaimana asal mula persebaran agama Islam ke Nusantara tersebut banyak ditemui dalam buku sejarah di Indonesia dan menjadi diskursus utama, terutama pada rezim Orde Baru. Namun setelah Orde Baru tumbang dan tidak ada lagi pelarangan semua hal yang berbau Tionghoa, maka ramai diperbincangkan teori persebaran misi Islam di Nusantara yang diyakni berasal dari Tiongkok.

Teori Tiongkok sebenarnya pernah dikemukakan oleh Slamet Muljana dalam bukunya “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara” yang kemudian dilarang beredar oleh Pemerintah Orde Baru. Menurut Muljana, Islam Nusantara, dan di Jawa khususnya, bukanlah Islam “murni” dari Arab, melainkan Islam campuran yang memiliki banyak varian. Muljana menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Cang. Sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menurut Muljana, adalah Toh A Bo, putra dari Tung Ka Lo, alias Sultan Trenggana.¹³¹

Senada dengan keyakinan Muljana, Sumanto Al Qurtuby dalam bukunya “Arus Cina Islam Jawa” menemukan fakta bahwa nama tokoh yang menjadi agen sejarah Islam merupakan transliterasi dari nama Chinese ke nama Jawa. Nama Bong Ping Nang misalnya, kemudian terkenal dengan nama Bonang. Raden Fatah yang punya julukan Pangeran Jin Bun, dalam bahasa Cina berarti “yang gagah”. Raden Sahid (nama lain Sunan Kalijaga) berasal dari kata “sa-it” (sa = 3, dan it = 1; maksudnya 31) sebagai peringatan waktu kelahirannya di masa ayahnya berusia 31 tahun.¹³²

Dari beragamnya catatan sejarah, proses Islamisasi dan perkembangannya yang terjadi di Indonesia dan Tiongkok adalah catatan sejarah yang harus dipelajari dan

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

didalami maknanya. Sebagian besar elite Muslim Indonesia mengakui adanya proses Islamisasi di kedua negara, meski sebagian informan lainnya tidak mengetahui persis sumber sejarah tersebut.

Menurut Ketua PITI Jawa Tengah, Iskandar Chang, berdasarkan bukti sejarah, baik yang berada di Tiongkok maupun di Indonesia, terungkap adanya corak keberagaman Islam yang serupa antara masyarakat Muslim Tiongkok dengan masyarakat Muslim Nusantara, terutama yang berada di pesisir pantai Jawa, seperti Tuban dan Rembang.¹³³ Walaupun teori persebaran Islam dari Tiongkok ini masih diperdebatkan, namun berbagai bukti otentik tentang adanya kontak masyarakat Muslim Tiongkok semisal ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke Nusantara, tidak dapat dielakkan dari rekaman sejarah dunia. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat Muslim Tiongkok dalam persebaran Islam, atau minimal kontak langsung, dengan penduduk Nusantara merupakan cermin hubungan masyarakat Tiongkok dengan Indonesia yang telah terjadi dalam periode yang sangat lama.

Kontak Laksamana Cheng Ho dengan beberapa Kesultanan Islam Nusantara dijelaskan lebih rinci oleh sejarawan UI yang juga pengurus DPP PERSIS, Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar. Menurutnya, kontak Cheng Ho tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik-perdagangan dunia waktu itu yang didominasi oleh Kesultanan Turki Utsmani. Dinasti Ming ingin mengamankan kepentingan politik dan bisnisnya dengan menunjukkan keberadaan pejabat sekelas Laksamana yang beragama Islam beserta para prajuritnya. Pengiriman Cheng Ho ke Kesultanan Demak dan Banten bukanlah dalam rangka Islamisasi, melainkan demi tujuan politik-bisnis supaya kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di Nusantara waktu itu mau bermitra dengan Dinasti Ming dari Tiongkok.¹³⁴

Catatan sejarah Cheng Hoo juga diyakini kebenarannya oleh Ketua PITI Jatim, H. Hariyanto. Menurutnya, proses Islamisasi di Indonesia dapat dikaitkan dengan kisah

¹³³ Dr. Iskandar Chang, Op.Cit.

¹³⁴ Tiar Anwar Bachtiar, Ph.D, Op.Cit.

sejarah Laksamana Cheng Ho yang melakukan muhibah dan datang ke Nusantara sebanyak 7 kali. Cheng Ho dari suku Ma (Muhammad) yang merupakan keturunan dari sahabat Saad bin Abi Waqqas. Sejarah datangnya Islam ke Nusantara berdasarkan teori tersebut bisa dipertanggungjawabkan.¹³⁵

Dalam catatan sejarah, Laksamana Cheng Ho dengan para awak kapalnya yang beragama Islam meninggalkan jejak warna Islam di beberapa wilayah di Nusantara, seperti di Lao Sam (Lasem) dan Kalimantan Tenggara. Namun pada abad kesembilan belas, migrasi etnis Tionghoa dari Tiongkok memang tidak lagi didominasi oleh warna Islam sehingga terlihat adanya keterputusan narasi sejarah Islamisasi Nusantara yang berhubungan dengan Tiongkok.¹³⁶ Keterputusan narasi sejarah yang berhubungan dengan jaringan Tiongkok dalam proses Islamisasi di Indonesia ini, menurut cendekiawan Muslim Yudi Lathif, akan menjadi ruang produktif bagi kerjasama antar Tiongkok dan Indonesia untuk dapat berlanjut dalam proyek-proyek riset bersama yang tentu akan meningkatkan relasi antar dua bangsa.¹³⁷

Mempertegas pandangan diatas, Pengasuh Pesantren An-Nuqayyah Sumenep, Prof. KH. Abd. A'la, menyatakan bahwa kontribusi Tiongkok dalam perkembangan budaya di Indonesia tidak bisa dielakkan. Begitu juga dengan perkembangan budaya Islam di Nusantara. Fakta empiris terkait ini beberapa bisa dilihat di Sumenep. menurutnya, di Madura terdapat beberapa masjid kawak yang desain arsitektur beserta ornamennya ada unsur Chinese-nya.¹³⁸ Setuju bahwa perkembangan budaya Indonesia dipengaruhi oleh Tiongkok, Prof. Akh. Muzakki menilai bahwa masyarakat Indonesia dan Tiongkok sangat apresiatif kepada budaya. Islam sebagai *the connecting bridge* dipahami oleh kedua masyarakat ini sebagai bagian dari sistem budaya yang bisa menyatu dengan tradisi budaya masyarakat. Ia meyakini bahwa bangsa yang menghargainya terhadap budaya itu kuat maka agama yang masuk ke bangsa

¹³⁵ Hariyanto, Op.Cit.

¹³⁶ Grace Lestariana Wonoadi, cendekiawan Muslim Indonesia, wawancara, 1 November 2020

¹³⁷ Yudi Latif, Ph,D, Op.Cit.

¹³⁸ Prof. KH. Abd. A'la, Op.Cit

tersebut akan melakukan penyesuaian sehingga agama itu dipeluk oleh mayoritas. Inilah faktor yang bisa menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia dan di Tiongkok sama-sama berjalan secara mulus. Ia menegaskan bahwa jumlah komunitas Muslim di Tiongkok yang besar mendorong negara tersebut membuka industri halal yang cukup massif, meski masih kalah dengan Jepang dan Korea Selatan. Maka, di ruang seperti inilah terjadinya penguatan *connectivity* antara ekspresi Islam di Indonesia dan di Tiongkok. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedua komunitas ini membangun dan memperkuat sekaligus apa yang disebut dengan kapitalisasi dari Islam itu sendiri.¹³⁹

Di sisi lain, sebagian elite Muslim Indonesia mempertanyakan kebenaran sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa dari Tiongkok. KH. Zaim Ahmad dari Rembang yang mengatakan bahwa proses islamisasi di Nusantara yang konon katanya ada hubungan sejarah Islam di Tiongkok perlu dikaji lagi secara empiris kebenaran para wali-wali songo itu berasal dari Tiongkok. Menurutnya, masyarakat Islam di Indonesia merupakan masyarakat Islam yang asimilatif. Asimilasi budaya ini menjadikan kultur/budaya baru yang kemudian memunculkan sebuah akulturasi budaya. Misalnya, daerah Lasem, Rembang, yang dikenal dengan sebutan “The Little of Beijing”. Di Lasem, ada asimilasi budaya Arab Islam, Jawa, *China*. Masyarakat Lasem antar etnis saling menghargai dan membaaur. Terkait proses Islamisasi di Tiongkok, ia mengaitkan dengan isu masyarakat muslim Uighur di Xinjiang. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus memahami bahwa pemerintah Tiongkok dan masyarakat Muslim Uighur tidak menemui kesepakatan. Hal ini mungkin bisa dipahami karena secara kultur antara masyarakat Muslim Uighur tidak sesuai dengan kultur pemerintah Tiongkok secara umum. Hal yang perlu dilakukan ke depan adalah menciptakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang harus terus dibangun.¹⁴⁰

¹³⁹ Prof. Akh. Muzakki, Op.Cit.

¹⁴⁰ KH. Moch. Zaim Ahmad, Op.Cit.

Ketidaksepehaman antara muslim Uighur di Xinjiang dengan otoritas pemerintah Tiongkok juga diamini oleh Dahlan Iskan. Namun beliau menekankan bahwa ini bukan konflik dan penindasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Di Tiongkok, peta persebaran umat Islam disana terbagi kedalam 3 (tiga) provinsi, yakni; Provinsi Ningxia, Gansu dan Xinjiang. Dua provinsi pertama; Ningxia dan Gansu, tidak ada penindasan disana, tidak ada konflik vertical. Jika tujuan pemerintah Tiongkok melakukan penindasan terhadap umat Islam, semestinya muslim di Ningxia dan muslim di Gansu juga ditindas, tapi faktanya tidak. Mengapa demikian, karena muslim di kedua provinsi ini tidak melakukan makar terhadap pemerintah. Ini yang benar pemerintah Tiongkok ingin menekan umat Islam di negaranya, atau ingin menekan kaum pemberontak separatis yang mau merdeka. Ia lalu mengakui bahwa orang biasa seperti dirinya tidak berani untuk terbuka berbicara seperti itu karena waspada akan kecaman masyarakat yang memandang dirinta terlalu berpihak pada Tiongkok.¹⁴¹

Dalam tinjauan sejarah, proses Islamisasi antara muslim di Xinjiang dengan Muslim etnis Hui di Tiongkok diklaim berbeda oleh Novi Basuki. Mahasiswa yang sedang menempuh S3 di Tiongkok ini menceritakan bahwa proses penyebaran Islam etnis Hui melalui asimilasi, perdagangan dan perkawinan, yang cenderung tidak ada konflik disana. Sementara Islam masuk ke Xinjiang era Satuq dengan cara invasi dan peperangan. Basuki menuturkan bahwa invasi Qutayba menjadi pendorong terbesar terhadap menyebarnya agama Islam ke Asia Tengah. Pada masa itu, wilayah tersebut masih menganut agama Zoroaster/Majusi dan Budha. Setelah invasi tersebut, banyak masyarakat disana yang berpindah agama menjadi muslim. Lanjutnya, ia melihat hal ini bukan bersumber dari hidayah Allah SWT semata, namun pragmatisme masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, serta demi menghindari *jizyah* (pajak perorangan) dan

¹⁴¹ Prof (HC) Dahlan Iskan, Tokoh Nasional, *Wawancara*, 04 September 2020

kharaj (pajak tanah) yang dibebankan kepada non-muslim jika ingin mendapatkan perlindungan pemerintah.¹⁴²

Perbedaan proses Islamisasi di kedua wilayah dan etnis yang berbeda ini kemudian membentuk karakter muslim yang berbeda pula. Jika proses Islamisasinya melalui invasi dan peperangan, secara tidak langsung akan membentuk karakter keras dan suka konflik. Sementara proses Islamisasi yang melalui asimilasi, perdagangan dan perkawinan, cenderung lebih soft dan menghindari konflik. Fakta perbedaan dinamika muslim di Provinsi Xinjiang, Gansu dan Ningxia kemudian tidak bisa dilepaskan dari sejarah *historical background* proses Islamisasi disana. Narasi ini yang kemudian dijustifikasi terdapat benang merah kesamaan antara muslim etnis Hui di Tiongkok dengan muslim Indonesia secara umum. Prof. Akh Muzakki menyebut ini dengan istilah “adaptability” antara tradisi budaya dan agama. Titik temu persamaan inilah yang harus dikuatkan antara kedua masyarakat muslim di kedua negara jika mau sinergi bersama.¹⁴³

Dalam pandangan lain, Rais Syuri’ah PCI-NU Tiongkok, KH. Imron Rosyadi Hamid menegaskan bahwa dinamika Islam di Tiongkok bisa dibaca dalam tulisan para santri NU yang sedang belajar ke Tiongkok. Bagaimana proses akulturasi tradisi budaya dengan nilai-nilai Islam di beberapa provinsi Tiongkok dicatat dalam buku Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok. Dalam buku tersebut juga dinarasikan tentang pengalaman keagamaan, keislaman, pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, perkembangan teknologi perspektif santri NU yang studi di Tiongkok.¹⁴⁴

Meskipun antara Indonesia dan Tiongkok sama-sama memiliki apa yang dikatakan “adaptability” terhadap tradisi budaya dan agama, namun peneliti melihat distingsi/pembeda antara keduanya. Letak perbedaan terlihat di aktor dalam ikhtiar sinkretisasi dan akulturasi antara budaya - agama. Indonesia proses “adaptability”

¹⁴² Novi Basuki, Sinolog, *Wawancara*, 01 September 2020

¹⁴³ Prof. Akh. Muzakki, *Op.Cit*

¹⁴⁴ KH. Imron Rosyadi Hamid, Rais Syuriah PCI-NU Tiongkok, *Wawancara*, 05 September 2020

berawal dari para ulama hingga kemudian berkembang luas keatas (*bottom up*). Sementara proses “adaptability” yang ada di Tiongkok peran utamanya adalah negara/pemerintah yang memberikan aturan kebawah (*top down*). Aturan inilah yang oleh Xi Jinping dinamakan dengan *sinicization of all religions and beliefs* (kebijakan sinoisasi agama dan kepercayaan di Tiongkok), termasuk Islam.

Definisi umum terkait perkembangan dinamika agama di Tiongkok ditulis oleh Tenzin Tseten. Menurutnya, kebijakan sinoisasi agama di Tiongkok bukan aturan baru. Ini hanya kepanjangan dari Regulation on Religious Affairs yang sudah ada. Aturan ini tidak lain adalah untuk mengurangi jumlah kelompok agama yang “illegal” dan cenderung “radikal”. Tentu pada saat yang sama, regulasi ini mengharuskan semua personel agama untuk setia mengikuti doktrin dan aturan pemerintah Tiongkok.¹⁴⁵

Dalam konteks di atas, Sekretaris DPW PITI Sumatera Selatan, Hj. Merry Efendi, menyebutkan bahwa kebijakan sinoisasi agama di Tiongkok merupakan hal positif, karena nilai budaya selama tidak bertabrakan dengan agama maka keduanya boleh dan bisa berdialog, dan begitu juga sebaliknya. Moderatisme Islam di Indonesia pun bisa menjadi modal Indonesia mendekati Tiongkok selama tidak melanggar syara’/hukum Islam.¹⁴⁶ Hal senada disampaikan KH. Abdulloh Yazid yang menekankan bahwa dari dulu Tiongkok tidak melarang agama selama itu tidak bertentangan dengan kebijakan negara. Menurutnya, moderatisme tidak boleh dipelajari separuh separuh. Pemahaman terkait ajaran islam itu harus menyeluruh, jangan dikotak-kotakkan. Pemahaman Islam harus dibawa pada islam yang menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyyah* yang pada gilirannya akan mewujudkan *ukhuwwah wathaniyyah*. Ia menambahkan bahwa isu pengkotak-kotakan Islam berdampak pada munculnya konflik antar umat Islam.¹⁴⁷

¹⁴⁵ “China;s Regulation on Religious Groups: A Systematic Sinicization of Religions”, diakses dari <https://tibetpolicy.net/chinas-regulation-on-religious-groups-a-systematic-sinicization-of-religions/> tanggal 21 Oktober 2020

¹⁴⁶ Merry Efendi, Op.Cit.

¹⁴⁷ KH. Abdulloh Yazid, Op.Cit.

Sinoisasi agama di Tiongkok ditunjukkan oleh pemerintah Tiongkok dengan memfasilitasi pembangunan masjid. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh H. Nurawi. Menurutnya, perkembangan Islam di sana berjalan aman dan baik. Pemerintah Tiongkok mendukung jalannya ibadah umat Muslim dengan terus membangun masjid.¹⁴⁸ Kepemilikan masjid yang terpusat kepada pemerintah bisa dipahami bahwa Tiongkok tidak mengizinkan adanya kepemilikan privat. Tetapi penggunaannya bebas untuk publik. Dari beberapa pandangan ini, elite muslim Indonesia menilai ada benang merah antara dinamika perkembangan Islam di kedua negara. Pun begitu juga dengan tantangan radikalisme agama dan isu separatisme, kedua negara juga memiliki problematika yang sama.

IV.3 Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Islam Sebagai Sarana Peningkatan *People-to-People Connectivity* Antara Indonesia dan Tiongkok

Secara umum, hampir semua informan elite muslim Indonesia menyetujui jika terdapat upaya peningkatan hubungan masyarakat antara Indonesia – Tiongkok yang menggunakan sarana isu keagamaan (Islam). Namun, pandangan umum tersebut terpolarisasi kedalam 3 (tiga) tipologi pandangan yang lebih spesifik: (1) sepakat bahwa Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* antara kedua negara dan memandang adanya peluang yang besar; (2) sepakat bahwa Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* antara kedua negara, namun dengan memberikan catatan persyaratan khusus; (3) pesimis dan tidak menganggap arti penting jika hubungan masyarakat Indonesia–Tiongkok didekatkan dengan sarana isu keagamaan (Islam) karena tantangan yang terlalu besar.

¹⁴⁸ H. Nurawi, Op.Cit.

IV.3.1 Islam Mampu Sebagai Sarana *People-to-People Connectivity* dan Memiliki Peluang Besar

Informan yang memiliki optimisme besar dan sangat menyetujui Islam sebagai sarana dalam peningkatan hubungan masyarakat Indonesia – Tiongkok memiliki beragam argumentasi. Cendekiawan muslim UINSA, Prof. Akh. Muzakki, menyampaikan bahwa peluang isu keagamaan (Islam) ini sangat besar perannya dalam peningkatan hubungan masyarakat di kedua negara, karena antara Indonesia dan Tiongkok memiliki kesamaan di bidang apresiasi tradisi dan budaya. Keduanya memiliki *traditional culture* yang kuat, yang kemudian bisa mempertemukan Islam sebagai bagian dari sistem kebudayaan.

“... Bangsa yang penghargaannya terhadap budaya itu kuat, maka agama yang masuk ke bangsa itu akan mengalami adjustment yang kemudian membuat agama itu dipeluk mayoritas. Ketika bangsa itu kurang menghargai ekspresi budaya, maka sifatnya lebih denial (menolak). Kebetulan Indonesia dan China masyarakatnya lebih apresiatif terhadap budaya. Traditional culture-nya itu kuat, oleh karena itu kemudian yang bisa mempertemukan Islam sebagai the connecting brige antara keduanya karena Islam lalu dipahami kedua bangsa ini menjadi bagian sistem kebudayaan. Nah itu yang menjelaskan proses islamisasi di Indonesia dengan yang terjadi di China berjalan lebih smooth. Bedanya hanya sederhana, di china itu Islam tidak menjadi kekuatan dalam situasi politik, di Indonesia sebaliknya. Itu yang membuat proses proses Islamisasi menemukan ruang yang lebih leluasa, karena di China Islam menjadi bagian dari ekspresi kebudayaan dari keyakinan masyarakat muslim disana. Ekspresi itu terbatas hanya sebagai ekspresi budaya. Tidak bisa lebih dari itu. Sementara di Indonesia Islam dapat masuk ke ruang budaya, politik, ekonomi. Di China, jangan kita lupakan komunitas muslim jumlahnya juga besar, meskipun muslim disana minoritas.”¹⁴⁹

Argumen Prof. Akh. Muzakki berikutnya adalah melihat dari sisi geopolitik Tiongkok. Pemerintah RRT tidak akan bisa meninggalkan tatanan dunia Islam karena Tiongkok sendiri punya perbatasan dengan negara-negara Islam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Akh. Muzakki yang memandang bahwa bagaimanapun kondisi Tiongkok hari ini, Islam adalah sebuah faktor di tatanan kawasan mereka. Tiongkok

¹⁴⁹ Prof. Akh. Muzakki, Op.Cit.

sendiri punya perbatasan dengan negara-negara Islam. Karena itu, posisi negara-negara Islam tetap dianggap penting. Apalagi wilayah-wilayah perbatasan Tiongkok justru lebih banyak berdekatan dengan warga dengan penduduk dunia secara kolektif lebih banyak Islam, termasuk negara Muslim di kawasan Asia Barat, seperti Tajikistan dan Kazakhstan. Negara-negara tersebut menjadi bagian irisan terluar dari Tiongkok.

Faktor berikutnya, menurut Prof. Akh. Muzakki, adalah kondisi yang dimiliki oleh kedua negara ini relatif sama, khususnya di isu separatisme. Dari sisi Tiongkok, separatisme muncul dari etnis minoritas muslim di Xinjiang, sementara separatism di Indonesia muncul dari minoritas Kristen Papua.

“Jadi seperti ini, ada beberapa kondisi yang sedang dihadapi oleh kedua negara. Jadi kedua negara Indonesia Tiongkok menghadapi kondisi. Tiongkok pernah dan sedang memiliki salah dengan komunitas muslim yang ada di Xianjiang, jadi mereka sensitif sekali dengan Islam. Jika kemudian Islam yang dimaksud, masuk ke ruang politik. Karena sedang dianggap sebagai perlawanan. Komunitas Uighur, dianggap melakukan perlawanan. Kemudian pemerintah China membranding, bukan membranding ekspresi keyakinan keagamaan. Tetapi membrandingnya dengan separatisme. Indonesia juga pernah punya pengalaman buruk, zaman Orde Lama. Di mana masa silam waktu itu tidak bisa lepas dengan masalah komunisme. Sehingga membicarakan China identik dengan komunisme. Pada level ini sebetulnya, penguatan hubungan bilateral tidak bisa semata-mata diandalkan atau mengandalkan goverment. Harus dibangun relasi dengan baik melalui people-to-people connectivity. Bagaimanapun negara memiliki kepentingan yang sama. Seperti di Indonesia, bagaimana di Papua secara etnis juga berbeda dengan masyarakat kebanyakan.”

Dari penjelasan diatas, Prof. Muzakki memandang peluang yang besar jika Islam dijadikan sarana peningkatan hubungan masyarakat Indonesia – Tiongkok karena berlandaskan 3 (tiga) hal; pertama, tingkat kesamaan kedua negara di bidang traditional culture. Kedua, aspek geopolitik Tiongkok yang tidak mungkin meninggalkan dunia Islam. Ketiga, tantangan yang dimiliki oleh kedua negara relative sama, khususnya pada aspek radikalisme agama dan isu separatisme. Maka dari sini perlu

diupayakan suatu ikhtiar bersama, yang dilakukan bukan hanya oleh pemerintah kedua negara, namun juga kelompok masyarakat dalam kerangka peningkatan *people to people connectivity* di kedua negara. Prof. Muzakki menambahkan, terdapat beberapa peluang yang bisa disinergikan kedepan, yakni kerjasama di bidang pendidikan (pertukaran pelajar/ santri / mahasiswa), kapitalisasi Islam dalam bisnis dan industri halal. Dua aspek ini yang memiliki peluang besar jika Islam sebagai sarana peningkatan hubungan masyarakat di kedua negara.¹⁵⁰

Elite muslim berikutnya yang juga memiliki optimisme besar adalah cendekiawan Yudi Latif. Dalam pernyataannya, dikatakan bahwa ada beberapa persamaan antara Indonesia – Tiongkok (sejarah, kultural dan kepentingan) yang bisa didekatkan. Pintu masuk yang paling tepat adalah menjalin relasi yang kuat antara muslim di Tiongkok dengan Muslim di Indonesia.

“ Oleh karena itu kita harus membangun common ground, mencari titik persamaan. Baik persamaan sejarah, persamaan kultural, maupun persamaan kepentingan. Ini bisa dimulai dengan menjalin relasi antar kedua komunitas yang secara kultural memiliki jaringan persamaan dan persamaan sejarah, yakni relasi muslim China dengan relasi muslim di Indonesia.”

Yudi Latif menambahkan bahwa Identitas persamaan ‘Islam’ ini, nantinya mampu mengikis phobia muslim Indonesia terhadap Tiongkok yang memiliki ideologi komunis dan anti-agama. Bagaimana caranya, tentu bisa melakukan berbagai kerjasama di kedua negara, seperti kerjasama riset dan kajian yang lebih mendalam tentang sejauhmana peran etnis Tionghoa dalam proses Islamisasi di nusantara. Hal ini bisa diinisiasi oleh UINSA bekerjasama dengan kampus di Tiongkok. Program *live-in* pelajar Muslim Tiongkok ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Sampai terjadi kesepahaman yang utuh antara praktik keislaman di kedua negara. Kemudian peningkatan bisnis dan perdagangan yang tersegmentasi juga dianggap mampu

¹⁵⁰ Prof. Akh. Muzakki, Op. Cit

sebagai peluang yang besar, dengan catatan kemitraan yang *win-win*, bukan *win-lose*.¹⁵¹

Elite muslim ketua PCI-NU Tiongkok, KH. Imron Rosyadi Hamid juga sangat sepakat ketika isu keagamaan (Islam) dijadikan sebagai sarana hubungan masyarakat Indonesia – Tiongkok. Dalam pandangannya dijelaskan bahwa argumentasi utama terkait ini adalah benang merah sejarah dan karakteristik moderat di kedua masyarakatnya. Kalaupun ditemukan fakta ada yang ekstrem kanan dan radikal, ya pasti ada. Di Indonesia juga memiliki tantangan yang sama terkait radikalisme agama. Namun secara mayoritas, baik muslim Indonesia maupun muslim Tiongkok, keduanya mayoritas sama-sama moderat. Oleh karenanya kedua masyarakat muslim memiliki peluang yang besar untuk didekatkan.

“Kita bisa lihat bagaimana kontribusi orang Tionghoa dalam peranannya syiar dan penyebaran Islam di Nusantara. Ini bukti sejarah dan harus kita rawat jaga sampai sekarang. Jangan sampai kita mudah dipecah-belah, diadu domba, kan begitu. Yang kedua, kebetulan saya juga lagi menempuh studi doktoral di Tiongkok, sehingga tahu persis bagaimana karakteristik muslim Tiongkok. Mereka itu sama dengan kita, moderat dan toleran. Kalaupun ada fakta muslim Tiongkok radikal, di Indonesia pun sama, ya kan. Tapi mereka ini minoritas. Dengan demikian, Indonesia dan Tiongkok sama-sama memiliki tantangan dalam isu radikalisme agama. Yang saya sebut tadi adalah mayoritas. Mayoritas muslim Indonesia dan muslim Tiongkok itu moderat. Maka ini menjadi peluang yang besar untuk didekatkan.”¹⁵²

Penempatan isu keagamaan (Islam) sebagai sarana peningkatan hubungan masyarakat antara Indonesia dan Tiongkok juga diamini oleh Iskandar Chang, ketua DPD PITI Jawa Tengah. Menurutnya, ajaran Islam dan ajaran konfusianisme terdapat beberapa titik penekanan substansi maupun simbol yang sama. Yang terpenting adalah jangan mencampur simbolisasi agama ke dalam pemerintah/negara. Karena Indonesia dan Tiongkok bukan negara agama. Menurutnya, Islam dan *Confucianism*

¹⁵¹ Yudi Latif, Ph.D, Op.Cit.

¹⁵² KH. Imron Rosyadi Hamid, Op.Cit

memiliki kesamaan yang sangat luar biasa. Salah satu contoh adalah penghormatan terhadap orang tua bahasa kita *birrul walidin*. Contoh lain adalah di Islam diakui bahwa setiap manusia dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dalam *Confucianism* diakui bahwa seluruh manusia dari 4 samudra dunia adalah bersaudara. Budaya bersujud pun dikenal di Tiongkok karena *Confucianism* mengajarkan sujud sebagai bentuk penghormatan/penyembahan.

Aspek kesamaan di atas merupakan modal awal dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. KH. Zaim Ahmad Ma'shoem, pengasuh Pesantren Kauman Lasem juga memiliki pandangan yang sama. Lebih spesifik beliau menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan hubungan Indonesia dan Tiongkok, melihat banyak kesamaan keduanya. Sama-sama kultur masyarakat Timur, banyak sekali orang Islam Ahlu al-sunnah wal jama'ah di kedua negara serta kesamaan pada aspek diaspora.

*"Hubungan Indonesia – Tiongkok itu menurut saya perlu ditingkatkan lagi dan sangat besar peluang untuk bisa ditingkatkan itu, melihat bahwa banyak kesamaan-kesamaan. Pertama, kesamaan kultur masyarakat ketimurannya. Kedua, kesamaan banyak sekali orang Islam Ahlu al-sunnah wal jama'ah di kedua negara. Ketiga, di Indonesia banyak sekali orang yang dari daratan Tiongkok yang datang ke Indonesia. Ini bisa dipakai sebagai landasan untuk peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok, baik secara G to G, maupun hubungan antar masyarakat kedua negara."*¹⁵³

Optimisme berikutnya datang dari pandangan Pengasuh pesantren An-Nuqayyah, Abdul A'la yang secara spesifik menyitir satu ayat di surah al-Hujurat bahwa takdir kita diciptakan berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk saling mengenal (*li ta'arofu*). Meskipun di Tiongkok muslim minoritas, sementara di Indonesia mayoritas muslim, bukan berarti tidak ada peluang, justru peluangnya sangat besar. Indonesia bisa mengenalkan Islam moderat kepada Tiongkok, namun tantangannya ada pada penguasaan bahasa.

¹⁵³ KH. Zaim Ahmad Ma'shoem, Op.Cit.

“... Bahkan ketika Dubes Tiongkok ke PWNU saya sarankan bagaimana melibatkan tokoh-tokoh Islam Moderat ya NU Muhammadiyah untuk terlibat dalam penguatan Islam di sana dan ini lagi-lagi untuk masyarakat awam kita harus menguasai bahasa mandarin mungkin atau pakai penerjemah dan sebagainya, itulah berapa pentingnya menguasai bahasa Mandarin.”¹⁵⁴

Dalam aspek ini, moderasi Islam juga dipandang Eko Siswanto sebagai asset yang bagus bagi amunisi Indonesia untuk meningkatkan hubungan masyarakat Indonesia – Tiongkok. Moderasi Islam memungkinkan ruang-ruang dialog dan keterbukaan untuk menegaskan titik temu antara kedua negara. Sehingga menempatkan Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* bisa lebih maksimal dan berdampak luas.

“Saya pikir bahwa Islam sangat mungkin sekali dan memang diperlukan untuk menjadi satu media atau jembatan adanya connectivity antara Indonesia dengan Tiongkok. Salah satunya yaitu kuncinya saya pikir adalah semangat moderasi beragama ini yang perlu untuk sama-sama dikampanyekan. Ini adalah tugas kita bersama sebab bahwa Islam membutuhkan satu pandangan yang implusif maupun terbuka kemudian Islam itu dianggap sebagai agama yang mampu untuk berdialog maupun berkomunikasi dengan pihak manapun dengan inklusivisme seperti inilah kemudian kita bisa untuk membuka diri termasuk dengan Tiongkok. Yang kedua adalah kita untuk melakukan satu antisipasi terhadap maraknya gerakan radikalisme di negara kita ini yang ternyata itu mengganggu harmonisasi antar umat Islam maupun antar umat beragama satu dengan yang lain dan itu juga bisa menampilkan satu persepsi publik yang negatif terhadap Islam sehingga ini bisa untuk menghambat adanya hubungan atau pun connectivity antara Indonesia dengan negara lain termasuk dengan Tiongkok. Kita bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi sebuah nilai maka Islam pun juga seperti itu kita tampilkan bukan dari sisi uniform tetapi dari sisi sebuah substansi maupun value dari Islam itu yang kemudian perlu untuk sama-sama kita tampilkan di permukaan sehingga dengan adanya upaya untuk menampilkan value maupun nilai di permukaan itulah Islam bisa diterima oleh pihak manapun”¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Prof. KH. Abd. A'la, Op.Cit.

¹⁵⁵ Dr. Eko Siswanto, Op.Cit.

IV.3.2 Islam Mampu Sebagai Sarana *People-to-People Connectivity* dengan Catatan dan Syarat Khusus

Beberapa elite Muslim Indonesia memiliki pandangan bahwa Islam bisa menjadi sarana peningkatan people to people connectivity antara Indonesia – Tiongkok dengan beberapa syarat khusus. Prof. AH. Rofi'uddin misalnya, memberikan syarat khusus berupa ketepatan dalam memetakan simpul-simpulnya. Karena muslim di Tiongkok itu minoritas, tidak semua provinsi di sana kuat Muslimnya. Hanya di daerah tertentu saja yang banyak Muslim. Jika ketepatan dan kecerdasan memilih segmentasi ini bisa dilakukan, maka isu keagamaan (Islam) bisa menjadi sarana untuk meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara.

“Peningkatan hubungan dengan menggunakan agama ya mungkin-mungkin saja, kalo kita lihat dengan perkembangan Cina anak-anak muda generasi muda ya secara keseluruhan beberapa kota provisi yang sempat saya sempat hadir pernah melihat itu generasi mudanya tidak jauh beda dengan generasi muda di negara-negara Kapitalis cara berkomunikasi juga seperti itu, perhatian pada persoalan keagamaan juga seperti itu saya kira rendah, memang bukan hanya islam saja tp yang lain juga seperti itu, nah oleh karena itu kalo kita ingin menjadikan agama sebagai tema untuk meningkatkan diplomasi untuk meningkatkan hubungan dengan Cina harus pandai-pandai memetakan yang mana dan dengan siapa, kita tahu ada provinsi yang muslimnya kuat tapi banyak bagian nyaris muslimnya tidak kuat kesana-sana Minim gitu, kita tau juga tradisi mereka yang meskipun mereka bukan katakanlah sangat minim muslimnya itu menghargai orang islam itu sangat tinggi rata-rata, menghargai dalam arti begini ya cara makan di konfrom-konfrom itu sudah menjadi SOP mereka itu Muslim Food dipisahkan bahwa bukan hanya bahan makannya saja bahkan perangkatnya juga di perhitungkan dan seterusnya, saya ingin mengatakan bahwa apresiasi mereka terhadap islam itu patut di hargai lah tapi sekalilagi kalau mengangkat tema agama sebagai media untuk meningkatkan hubungan itu lebih cocok dengan katakanlah dengan daerah tertentu Provinsi tertentu secara keseluruhan mungkin ini bukan sesuatu yang menarik bagi mereka mungkin bagi kita iya tapi bagi mereka tidak, yang namanya kerjasama itu kan harus menarik kedua belah pihak apakah adakah peluang katakan sajalah harus pandai memilah sekmen mana yang harus kita lakukan komunikasi pendekatan dan sebagainya seperti itu.”¹⁵⁶

¹⁵⁶ Prof. AH. Rofiuddin, Op.Cit.

Dalam pandangan lain, Tiar Bachtiar dari PERSIS menyatakan bahwa Islam sangat bagus dipakai sebagai jembatan dalam hubungan Indonesia – Tiongkok. Hal ini memiliki peluang yang besar dengan catatan kita harus mampu meyakinkan pemerintah RRT untuk memberi izin kepada muslim Uighur di Xinjiang supaya belajar Islam kepada kita. Indonesia memiliki asset moderasi Islam, sehingga diharapkan muslim Uighur disana tidak merasa terancam.

“... Saya kira peluangnya besar ya, sebenarnya banyak itu orang orang Uighur yang belajar ke Indonesia tapi sekarang malah gak boleh itu, jadi kita harus meyakinkan kepada pemerintah China agar supaya bahwa kita mengajarkan Islam kepada orang orang Uighur kemudian kita berpartisipasi saja dalam pendidikan tentang ulama; begitu, atau orang Uighurnya yang belajar ke sini dan sebagainya nah itu siapa tau nanti kan, tapi ini harus diyakinkan ya dengan pola pengajaran Islam yang telah diajarkan oleh ulama’ dari Indonesia ke china sana. Itu siapa tau dapat meredakan ketegangan tadi orang Uighur dengan pemerintah China gitu dengan memberikan diplomat.... Tapi harus benar benar meyakinkan, kita harus percaya begitu bahwa kita harus melakukan itu. Kalau kitanya sendiri tidak percaya melakukan itu sendiri agak susah ya, nah ini bikin dulu skemanya polanya bias menyelesaikan konflik itu ya, jadi di Afghanistan ini bukan dengan pendekatan G to G gitu ya tapi dari P to P ormas Islam relative lebih mudah gitu ya persoalannya. Karena kan kadang kadang itu persoalan komunikasi aja persoalan kita meyakinkan orang bahwa kita bukan musuh kita tidak berbahaya bagi yang lain dan keagaman di Indonesia kan sebenarnya secara umum itu kan sangat ramah ya. saya kira biasa aja. Ini harus ada moment meyakinkan pemerintah China untuk menyelesaikan Uighur tanpa melukai orang-orang jadi mereka tanpa merasa terancam dengan keberadaan mereka, pemerintah China itu.”¹⁵⁷

Respon positif juga datang dari elite Muslim Indonesia KH. Abdulloh Yazid yang menilai bahwa hubungan *people-to-people connectivity* antara Muslim Indonesia dan Muslim Tiongkok itu baik, tetapi dengan catatan bahwa kepentingan kedua belah pihak sudah jelas. Baginya, hal yang perlu dikaji adalah apakah Tiongkok yang komunis itu apakah termasuk ahli kitab atau musyrik. Menurut Al-Qur’an, menjalin relasi

¹⁵⁷ Tiar Anwar Bachtiar, Op.Cit.

dengan negara ahli kitab itu lebih utama bila dibanding dengan negara musyrik. Indonesia harus tetap waspada. Kalau niatannya membangun ukhuwwah Islamiyyah maka harus ditanyakan terkait penindasan kaum muslim di Xinjiang.

“Jika kita sebagai muslim disuruh memilih, lebih baik bekerjasama dengan siapa, orang non-muslim yang ahli kitab, atau orang musyrik. Al-Qur’an dengan tegas memberi afirmasi kepada non-muslim namun ahli kitab. Muslim pun boleh menikah dengan non-muslim asal dia ahli kitab. Nah kedepan harus dikaji, Tiongkok yang komunis apa termasuk golongan ahli kitab atau golongan musyrik. Juga Amerika dan Eropa (Barat) itu apa masuk golongan non-muslim ahli kitab atau musyrik. Karena negara-negara besar ini yang sering membayangi kita dan kita sebagai muslim sudah memiliki panduan yang jelas terkait ini, disarankan memilih bekerjasama dengan sesama muslim, atau non-muslim yang ahli kitab, bukan yang musyrik. Dalam konteks ini menjalin relasi dengan muslim di Tiongkok itu sangat baik. Namun bekerjasama dengan pemerintahan RRT harus tetap waspada. Kita harus mencatatkan diawal dengan jelas apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.”¹⁵⁸

Syarat khusus juga dinarasikan oleh Grace, cendekiawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meskipun isu keagamaan (Islam) ini mampu dibuat sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan masyarakat Indonesia – Tiongkok. Namun dalam aplikasinya, harus ada kolaborasi dari pemerintah dan civil society yang tidak terbatas dari unsur Islam saja, tapi juga melibatkan kelompok lain non-muslim. Hal ini cukup beralasan karena pemerintah Tiongkok sangat sensitif dengan isu agama. Pemerintah RRT cenderung takut jika aktifitas P2P yang eksklusif pada agama tertentu, dikhawatirkan sebagai media komunikasi antara kelompok radikal.

“Kementerian Luar Negeri juga membuat beberapa aktifitas diplomasi kebudayaan yang memungkinkan agar anak-anak muda itu berinteraksi masuk ke dalam suasana diplomasi yang nyata dan dengan demikian mereka kedepan tentu di harapkan dengan itu bisa membawa secara lebih Real begitu ya bahwa yang Namanya agama itu merupakan sarana yang penting begitu dalam membangun connectivity nah khususnya people to people connectivity meskipun berbeda keyakinan lalu saya kira juga lalu tantangannya ya ini tadi saya sudah sebut di depan ya bahwa kemungkinan ada kekhawatiran dari pemerintah republic rakyat tiongkok

¹⁵⁸ KH. Abdulloh Yazid, Op.Cit.

bahwa kegiatan people to people contact yang seperti ini itu akan membawa satu dua perkara yang mengancam kepentingan negaranya apabila yang di buat sebagai kegiatan itu hal-hal yang sifatnya radikalisme nah di manapun termasuk di indonesia kan kita tidak mengharapkan radikalisme dalam artian radikalisme yang mengarah ke terorisme jadi pembuatan satu outline mengenai isu-isu yang lebih meningkatkan martabat manusia dalam konteks kalau di sini ini apakah dia islam atau tidak bisa di hubungkan dengan pengetahuan sains dan teknologi misalnya saja kita membuat sosialisasi tentang halal food itu kemudian di sorot juga hubungannya dengan Kesehatan di sorot juga hubungannya dengan pengetahuan local tempat di sana misalnya karena di sana yang selalu di bicarakan itu atau yang sering di manfaatkan masyarakat itu adalah herbal mechine itu saya kira bisa menjadi satu isu yang saling melengkapi. Mungkin disitulah kita bisa saling belajar, saling memperkaya. Kalau akupuntur, itu beberapa dosen UMY yang dokter ya pernah mendapatkan kesempatan kesana, tetapi kalau hal yang lebih umum, lebih milenial, misalnya tentang kuliner lah, ya kuliner yang umum-umum saja begitu ya sehingga nanti jika dihubungkan dengan manfaat kesehatan kemudian kehalalan lalu dengan hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama dalam tuntunan agama, itu saya kira malah lebih, lebih netral ya mengurangi kekhawatiran dari pemerintah disana.¹⁵⁹

Syarat khusus yang diberikan Grace diatas cukup rasional. Ini bisa menjadi jalan tengah bagi hubungan kedua negara. Indonesia bisa mensyiarkan nilai-nilai keislaman ke Tiongkok. Sementara Tiongkok bisa menerima dan memberi kontribusi balik.

IV.3.3 Islam Tidak Bisa Menjadi Sarana *People-to-People Connectivity* karena Memiliki Tantangan Besar

Sebagian kecil informan elite muslim Indonesia ada yang menyatakan secara pesimis, memandang isu keagamaan (Islam) justru sebagai ancaman terbesar hubungan Indonesia - Tiongkok. Seperti yang dinyatakan oleh KH. Qoyyum, Pengasuh Pesantren An-Nur Lasem, isu pelanggaran HAM di Xinjiang hingga saat ini masih menjadi batu sandungan hubungan muslim Indonesia dengan muslim di Xinjiang.

¹⁵⁹ Grace Lestariana Wonoadi, Op.Cit.

karena mereka terisolasi dan kita tidak diperbolehkan masuk. Walaupun ada kunjungan dari pihak luar, pasti yang ditunjukkan adalah pembangunan masjid, bukan penghancuran masjid dan penindasan jamaahnya.

“Buku diplomatiknya tentang Model Politik Cina. Jadi politik Cina niku umpami wonten pelanggaran HAM terkait ideologi, umpami.. umpama di Cina itu ada kerusakan masjid, penghancuran masjid besar-besaran. Nanti kalau ada pimpinan negara Islam... kunjungan ke Cina akan ditunjukkan pembangunan masjid bukan penghancuran masjid. Haaa.. akan ditunjukkan pembangunan masjid bukan penghancuran masjid. Jadi informasi yang kembali ke Indonesia bahwa Cina itu negara yang toleran, yang baik dengan Islam, karna disana ada masjid, ada pondok, ada tempat hafalan Qur’an. Tapi tempat yang dihancurkan Cina tidak ditunjukkan.”¹⁶⁰

Sedikit berbeda dari pandangan diatas, pesimisme juga muncul dari Direktur Universitas Darussalam Gontor, KH. Hamid Fahmy Zarkasy. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa masyarakat Tiongkok itu karakternya eksklusif, oleh karenanya, meskipun Islam sudah masuk lebih dulu dibanding Indonesia, namun penyebaran Islam sangat lambat, kalah jauh dengan Indonesia. Yang kedua, apa bisa muslim Indonesia berhubungan dengan muslim Uighur di Xinjiang. Jika ini bisa dilakukan, pasti akan banyak mengalir bantuan kemanusiaan kesana.

“Misalnya apakah Muslim Indonesia mempunyai hubungan kuat dengan Muslim Cina gitu ya. Nampaknya saya tidak melihat adanya kemungkinan itu. Meskipun disana memang ada muslim yang, yang ada di daerah Erhmm utara Cina gitu ya, utara Cina itu Muslimnya sudah lama, bukan di Xinjiang. Saya lupa namanya itu. sepupu saya itu dari sana, sepupu saya ini istrinya orang sana, kemudian menikah juga disana karena dia juga belajar di Cina, nenek moyangnya udah Muslim. Saya lupa nama daerahnya itu. Ya.. daerah Cina bagian utara, itu Muslim. Tapi dia memang eemm eksklusif berada disitu dengan tradisinya dengan yaa apa namanya...ee.. ya cara-cara Islam dengan mahdzab-mahdzab mereka gitulah ya. Itu ada disana. Cuman itu tidak ekspansif. Ndak ekspansif, ndak yang kemudian menyebarkan Islam di Cina, di daerah Cina yang lain itu engga. Erhmm.. nah pertanyaannya kan bisa ngga kita punya hubungan dengan orang-orang Cina yang Muslim yang ada di sana. Ya kan? Itu kemungkinan yang

¹⁶⁰ KH. Qoyyum, Pengasuh Pesantren An-Nur Lasem, wawancara, 16 Oktober 2020

bisa dipertanyakan. Atau bisa ngga kemudian kita berhubungan dengan Muslim Uyghur. Kalo berhubungan, itu disini akan sudah pasti akan mengalir bantuan-bantuan kemanusiaan sesama Muslim. Pertanyaannya, Mungkinkah itu dilakukan?

Direktur Pascasarjana UNIDA mempertegas pesimisme dengan membandingkannya ketika kita bekerjasama dan berhubungan dengan orang Barat. Kemungkinan berhubungan dan kerjasama dengan masyarakat Barat masih tinggi. Karena masyarakat Barat jika berkepentingan bisnis tidak akan mengganggu ideologi, tidak mengganggu ras. Sementara tantangan terbesar ada di Tiongkok yang sangat ideologis. Sosialis, kapitalis, komunis jadi satu.

“Orang Cina ini tidak mudah untuk menikah sama non Cina gitu ya. Itu. Itu satu dari satu juta lah mungkin. Jadi gitu. Wis begitu. Erhm.. Jadi kalau ditanya sejauh mana kemungkinannya, ya kemungkinannya kecil kalo saya lihat hhehehe kemungkinan sangat kecil. Lebih, lebih memungkinkan kita bekerja sama dengan orang barat. Orang Barat ini.. pertama, dia kepentingan bisnis itu tidak mengganggu ideologi ya. Tidak mengganggu ras juga. Meskipun orang Barat itu juga rasial. Heeh sekarang nih tantangan yang besar lagi adalah bahwa Cina itu sekarang sudah berideologi. Ideologinya adalah kapitalis, sosialis komunis jadi satu.”¹⁶¹

Tantangan terkait isu HAM di Xinjiang dan isu komunisme tersebut juga diamini oleh semua informan elite muslim lainnya. Namun bedanya, sebagian besar dari mereka masih memandang adanya peluang jika isu keagamaan (Islam) ini dipakai sebagai landasan dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia – Tiongkok.

IV.4 Proyeksi Diplomasi Publik terkait Islam sebagai Sarana Peningkatan *People-to-People Connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok

Dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok membuka peluang keterlibatan aktor non-negara dalam diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok. Komunitas Muslim Indonesia adalah salah satu aktor non-negara yang berpotensi untuk meningkatkan *people-to-people connectivity* antara

¹⁶¹ KH. Hamid Fahmy Zarkasy, Op.Cit.

Indonesia dan Tiongkok, mengingat adanya hubungan sejarah keislaman yang cukup kuat di antara kedua negara. Sebagaimana mekanisme kerja dari diplomasi publik, yaitu pemerintah negara asal memanfaatkan pendekatan terhadap masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah negara tujuan, maka dalam hal ini, di bawah payung *people-to-people connectivity*, komunitas Muslim Indonesia akan berperan sebagai “lakon” yang akan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di Tiongkok, sementara “dalang” dalam aksi ini adalah pemerintah Indonesia itu sendiri.

Dalam bahasa yang lain, Akh. Muzakki menegaskan posisi aktor negara dalam kerangka diplomasi publik ini bukan hanya sebagai fasilitator, tapi promotor. Pemerintah bukan hanya memberikan fasilitas, tapi keaktifan dalam mempromosikan arti penting isu keislaman ini dalam peningkatan hubungan masyarakat di kedua negara. Karena pemerintah memiliki kewenangan politik, sementara aktor lainnya tidak.

“Negara sangat penting untuk meningkatkan perannya. Tidak sekedar fasilitator, tetapi promotor. Negara itu penting untuk bergerak mendorong perannya lebih kedepan sebagai promotor. Bukan sekedar fasilitator. Kalau fasilitator hanya menyediakan ruang dan kesempatan. Terserah pemainnya. Tetapi kalau promotor tidak, promotor mendorong diri lebih kedepan supaya kemudian kepentingan membangun hubungan baik. Satu, kita mendorong pemerintah untuk tidak sekedar fasilitator. Karena negara punya kewenangan politik yang tidak dimiliki oleh kekuatan apapun. Apa yang kita lakukan? Kita perlu mendorong pemerintah atau negara untuk lebih kedepan memainkan perannya. Tidak sekedar fasilitator.”¹⁶²

Diplomasi publik Indonesia terhadap Tiongkok berangkat dari kepentingan nasional Indonesia, yaitu menjajaki kemitraan yang strategis dengan Tiongkok. Sebagai raksasa ekonomi dunia, Tiongkok memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Jaringan kerja sama antara Tiongkok dengan negara-negara di dunia sering kali diwarnai oleh motif ekonomi politik internasional. Meskipun demikian, namun kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok hendaknya dibangun atas

¹⁶² Prof. Akh. Muzakki, Op.Cit

dasar rasa persahabatan yang sejati, sebagaimana pandangan dari Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Wahidah Siregar.

“Jika people-to-people connectivity memang mau dibangun, maka dibutuhkan rasa saling percaya satu sama lainnya seperti halnya persahabatan. Persahabatan yang nantinya akan dibangun antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok harus benar-benar dilandasi oleh kejujuran kedua belah pihak, dan juga rasa saling tolong-menolong yang kuat. Persahabatan sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini bukanlah persahabatan yang tujuannya hanya untuk mengeruk keuntungan saja karena persahabatan yang demikian tidak akan dapat bertahan lama, tetapi persahabatan yang bersedia menanggung suka dan duka bersama, sehingga kedua belah pihak bisa saling membahagiakan dan saling menguntungkan. Prinsip semacam ini harus diimani baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Tiongkok.”¹⁶³

Terkait hal ini, peran komunitas Muslim Indonesia sebagai aktor non-negara dalam diplomasi publik Indonesia terhadap Tiongkok akan menjadi celah tersendiri bagi Indonesia untuk mengangkat Islam sebagai isu *low politics*. Diplomasi publik memang erat kaitannya dengan isu-isu yang bersifat *low politics*, sehingga meminimalisir terjadinya konflik terbuka antar negara. Meskipun isu keagamaan terbilang cukup sensitif karena berkaitan dengan ideologi, namun penggunaan diplomasi publik akan membuat isu ini dikemas sedemikian rupa hingga menjadi suatu bentuk pendekatan terhadap masyarakat. Oleh karenanya, kesepahaman antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok menjadi penting. Bila selama ini ada stigma negatif dari masyarakat mengenai kedua belah pihak, maka pendekatan *people-to-people connectivity* melalui isu *low politics* diharapkan akan mengeliminasi kesalahpahaman persepsi masyarakat di kedua negara. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan mengenalkan Islam tidak dalam perspektif teologi, tetapi dalam perspektif budaya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diplomasi publik Indonesia perlu melalui empat tahapan/proses, yakni *introducing*, *appreciating*, *engaging*, dan *influencing*.

¹⁶³ Wahidah Siregar, Ph.D, Op.Cit.

- **Introducing**

Dalam diplomasi publik, sasaran pertama dan utama adalah masyarakat negara tujuan. Masyarakat inilah yang nantinya akan mempengaruhi pemerintahnya. Sehingga, pemerintah negara asal tidak akan mempengaruhi pemerintah negara tujuan secara langsung, tetapi secara tidak langsung, yaitu melalui masyarakatnya. Oleh karena itu, diplomasi publik Indonesia terhadap Tiongkok dapat diawali dengan aktivitas memperkenalkan Indonesia dari sisi di mana Tiongkok belum mengetahuinya. Menghadirkan konsep Islam Indonesia dan mem-*branding* citra positif Islam di mata masyarakat luas Tiongkok adalah langkah pertama yang bisa ditempuh.

Citra positif tersebut penting mengingat bahwa pada saat ini, *Islamophobia* berkembang semakin luas di kalangan masyarakat dunia sejak adanya peristiwa terorisme 9/11. Hal ini juga disebutkan oleh Wahidah Siregar dalam paparannya.

“Islam sudah diwacanakan dalam konteks dunia saat ini sebagai sebuah kekuatan yang mengerikan. Masyarakat di seluruh dunia saat ini cenderung lebih melihat Islam sebagai teroris radikal yang kemudian menimbulkan Islamophobia. Di sisi lain, Islam yang menjunjung tinggi kedamaian dan keselamatan justru jarang diekspos dalam konteks diskursus global maupun di media sosial. Oleh karena itu, sisi positif Islam perlu diekspos ke panggung dunia agar pandangan masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Tiongkok, kepada Islam berubah, yaitu pandangan bahwa Islam, yang diimani oleh masyarakat Indonesia, adalah Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin.”¹⁶⁴

Pandangan bahwa Islam adalah agama yang damai harus tersampaikan kepada masyarakat Tiongkok agar tercipta pandangan baru. Hal ini bisa terwujud dengan catatan bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakatnya telah memahami betul pandangan tersebut. Dengan kata lain, citra negara yang ingin dibangun di luar negeri hanya akan tercapai bila negara dan masyarakatnya menyepakati tujuan bersama mereka.¹⁶⁵ Terkait dengan hal tersebut, Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Santo Darmosumarto, mengungkapkan bahwa

¹⁶⁴ Wahidah Siregar, Wawancara 25 September 2020

¹⁶⁵ Leonard et al, *Public Diplomacy*, 9

hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok kini tengah tersandera oleh perlakuan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia.¹⁶⁶ Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dengan Tiongkok, maka hendaknya dimulai dengan memperbaiki terlebih dahulu hubungan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia terlebih dahulu.

Konsep Islam Indonesia harus dipahami maknanya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi krusial karena Indonesia telah berupaya keras melawan isu terorisme dan radikalisme di dalam negeri sejak kurang lebih dua dekade terakhir. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Eko Siswanto terkait gerakan radikalisme di Indonesia yang tentu mengakibatkan buruknya citra Islam Indonesia di mata dunia. Jika dibiarkan, maka akan memecah belah umat beragama di Indonesia dan bisa berujung pada terganggunya keamanan dalam negeri.

“Maraknya gerakan radikalisme di Indonesia dapat mengganggu harmonisasi antar umat Islam maupun antar umat beragama satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, radikalisme ini juga bisa melahirkan suatu persepsi publik yang negatif terhadap Islam, yaitu memandang Islam sebagai agama yang ekstrem, sehingga dikhawatirkan akan menghambat adanya hubungan atau pun connectivity antara Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Tiongkok. Padahal, seharusnya Islam seharusnya ditampilkan sebagai sebuah nilai sebagai pendekatan untuk bisa disandingkan dengan agama lain.”¹⁶⁷

Apabila citra positif Islam Indonesia berhasil disampaikan dalam komunikasi yang baik dan efektif kepada Tiongkok, maka ini akan menciptakan kesan pertama yang baik pula bagi komunitas Muslim Indonesia. Hal ini penting untuk menjadi modal awal bagi komunitas Muslim Indonesia dalam memulai interaksinya dengan masyarakat Tiongkok.

¹⁶⁶ Santo Darmosumarto, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu-RI, *Focus Group Discussion*, 23 November 2020

¹⁶⁷ Eko Siswanto, Op.Cit.

- **Appreciating**

Setelah memberikan informasi yang benar, meluruskan mispersepsi, menciptakan kesan pertama yang baik, maka selanjutnya yang perlu dilakukan dalam diplomasi publik adalah memperlakukan negara tujuan dengan baik. Dalam konteks ini, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus dapat mulai menghargai apa-apa yang diyakini dan dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat Tiongkok.

Di tahap ini, kedua pemerintah yang telah saling mengenal satu sama lain, akan berupaya untuk menciptakan persepsi bersama terkait satu dan lain hal. Indonesia dan Tiongkok memang telah menjalin relasi kenegaraan sejak lama, tetapi bukan berarti tidak terjadi perbedaan pandangan, misal terkait isu komunisme Tiongkok. Isu ini masih melekat di benak masyarakat Indonesia dan terus menjadi isu yang kerap menggerus kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok. Maka, respon yang bisa dilakukan di tahap ini adalah dengan pemerintah dan masyarakat kedua negara harus saling memahami dan mendalami tentang kondisi partnernya. Masyarakat Indonesia masih memiliki ketakutan dan citra negatif terhadap Tiongkok karena isu komunisme, isu pelanggaran HAM terhadap Muslim Xinjiang, isu jeratan hutang dalam skema bantuan luar negeri dan beberapa isu lainnya. Di sisi Tiongkok, masyarakat memandang Indonesia sebagai negara Muslim yang tidak ramah dan masih timbul adanya *Islamophobia*.

Citra negatif terhadap Tiongkok ini kemudian membawa dampak terhadap persepsi masyarakat Indonesia. Di kalangan luas masyarakat Indonesia, persepsi negatif negara Tiongkok diasosiasikan dengan komunitas Tionghoa di Indonesia. Kondisi ini tentu merugikan posisi Indonesia mengingat tujuan diplomasi publik hanya akan terwujud bila pemerintah dan masyarakatnya menyepakati tujuan bersama alias kompak dan tidak terpecah. Pemerintah Indonesia perlu meredam *sinophobia* yang telah lama membuat masyarakat Tionghoa dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. KH. Abdul A'la juga mengungkapkan bagaimana Sinophobia ini nantinya menjadi tantangan bagi Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok.

“Sinophobia, yaitu sentimen terhadap masyarakat Tionghoa, telah berkembang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya Sinophobia ini, maka akan semakin banyak fitnah dan berita sepotong-sepotong tentang masyarakat Tionghoa yang bermunculan, sehingga pada akhirnya memperkecil peluang peningkatan people-to-people connectivity antara Indonesia dan Tiongkok.”¹⁶⁸

Bila persepsi negatif masyarakat terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia dapat digerus sedikit demi sedikit maka upaya untuk memahami dan mengenali Tiongkok pun dapat dilakukan bersama-sama oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

- **Engaging**

Pada tahapan ini, aktor diplomasi publik dapat mulai menapaki pendekatan dan kerjasama terhadap pemerintah dan masyarakat negara tujuan. Sebagai “lakon” dalam diplomasi publik Indonesia terhadap Tiongkok, komunitas Muslim Indonesia dapat memulai pendekatan ini dengan cara menyoroti persamaan keagamaan di antara kedua negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. AH. Rofi’uddin.

“Tema agama sebagai media untuk meningkatkan komunikasi antar negara atau antar orang dapat diwujudkan jika dapat menemukan irisannya. Dalam konteks people-to-people connectivity antara Indonesia dan Tiongkok, yang harus dilakukan adalah mencari keserasian Islam di antara kedua negara, sehingga dapat membuat keduanya berjalan secara paralel tanpa ada gesekan maupun bentrokan. Dalam kondisi yang demikian, maka akan ditemukan titik simpul yang bisa membuat adanya peningkatan interaksi hubungan antar negara maupun antar orang.”¹⁶⁹

Persamaan yang demikian disebut oleh Yudi Latif sebagai *common ground*, yang merupakan kunci dari *people-to-people connectivity* itu sendiri. Titik-titik persamaan harus ditemukan sebanyak mungkin karena semakin banyak titik persamaan yang berhasil dielaborasi antara yang satu dengan yang lain, maka *connectivity* itu akan

¹⁶⁸ Prof. KH. Abd. A’la, Op.Cit.

¹⁶⁹ Prof. AH. Rofi’uddin, M.Pd. Op.Cit.

makin kuat¹⁷⁰. Beberapa bentuk persamaan sebagaimana dimaksud dalam hal ini dapat merujuk pada pernyataan dari Jona Widhagdo Putri, yaitu persamaan pemahaman tentang Islam, sosial budaya, dan sejarah. Selain persamaan, beliau juga menyebutkan sejumlah *entry points* untuk Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok, yaitu meliputi pariwisata, ekonomi, dan juga pendidikan.¹⁷¹ Rangkaian kerjasama yang selama ini terjalin menjadi krusial karena itulah yang bisa dijadikan modal awal. Pemerintah dan masyarakat kedua negara harus menjaga dan mengembangkan model-model kerjasama tersebut.

- ***Influencing***

Tahap terakhir dalam diplomasi publik ini adalah mempengaruhi pemerintah dan masyarakat negara tujuan agar mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Tahap ini hanya bisa berjalan bila telah muncul kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat di kedua negara. Tidak salah bila dikatakan bahwa tahap akhir ini membutuhkan waktu yang lama karena orientasinya adalah membangun relasi jangka panjang dan berkelanjutan. Tujuan seperti ini adalah pencapaian tertinggi dalam diplomasi publik karena di tahap ini kedua negara akan bertindak sebagai pendukung satu sama lain.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan melancarkan aksi propaganda terhadap masyarakat negara tujuan. Dalam konteks relasi Indonesia dan Tiongkok, aksi ini membutuhkan kepiawaian komunitas Muslim Indonesia dalam mempengaruhi masyarakat Tiongkok, baik itu diaspora etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, maupun masyarakat Tiongkok secara luas. Berbagai media komunikasi juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang aksi ini, utamanya melalui platform media digital.

Media digital merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan literasi dan meminimalkan provokasi. Kecepatan akses dan biaya yang murah menjadi pilihan rasional *platform* media digital dalam membantu pembentukan opini publik. Namun

¹⁷⁰ Yudi Latif. MA, Ph.D, Op.Cit.

¹⁷¹ Jona Widhagdo Putri, Op.Cit.

perlu dicatat, Tiongkok adalah negara yang otoriter dan protektif dalam hal apapun, termasuk dalam pengelolaan media digital di negaranya. Kita tidak akan bisa mengakses *search engine* google, YouTube dan penyedia media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter di Tiongkok. Sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia yang familiar dengan produk-produk digital dari Barat tersebut. Bahkan saking familiarnya, masyarakat Indonesia memiliki 'ketergantungan' dengan produk digital dari Barat tersebut.

Tiongkok memiliki *platform* digital sendiri yang diwajibkan oleh pemerintah dan membendung segala produk digital Barat. Sehingga masyarakat Tiongkok lebih familiar dengan Youku, Baidu, Taobao, WeChat, Weibo, dan QQ, daripada Google, Facebook, Whatsapp dan Instagram. Maka untuk masa depan, pemerintah Indonesia perlu memikirkan bagaimana aksi propaganda ini juga bisa menyebar luas dalam *platform* dunia digital di masyarakat Tiongkok yang sedikit berbeda dengan masyarakat kita di Indonesia. Tentu ini dipandang bukan sebagai hambatan, ketika kedua masyarakat merasa sama-sama penting untuk sinergi bersama, bekerjasama yang sehat, termasuk dalam isu keagamaan (Islam). Dunia harus tahu bahwa Islam itu toleran, terbuka dan suka dengan perdamaian. Tugas kita bersama untuk menyuarakan Islam moderat, Islam yang adaptif dengan budaya manapun, termasuk dengan Tiongkok.

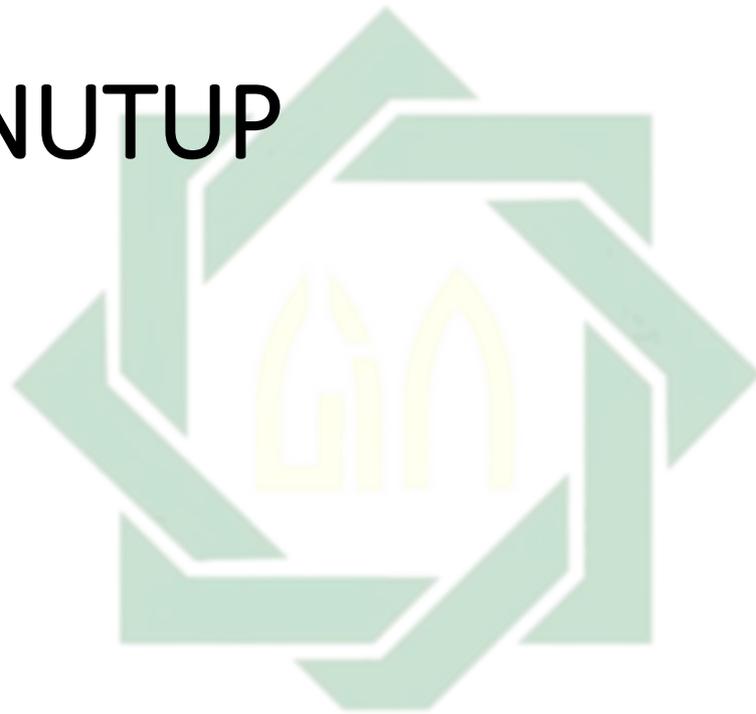
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 3. Tahapan Diplomasi Publik
Sumber: Adopsi dari Leonard et al. (2002)

BAB V

PENUTUP



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

1. Relasi Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin selama 70 tahun mendapat sambutan positif sekaligus negatif dari berbagai elite Muslim Indonesia. Sebagian elite Muslim menyatakan bahwa kedekatan Indonesia dan Tiongkok adalah pilihan yang rasional di mana Tiongkok adalah kekuatan besar global saat ini. Kerjasama di berbagai bidang yang telah terlaksana membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Aspek keterkaitan sejarah dan budaya juga menjadi dasar bagi sebagian elite Muslim untuk memandang bahwa masyarakat kedua negara memiliki kesamaan. Sebagian pandangan negatif dari elite Muslim Indonesia terkait kedekatan kedua negara muncul dari isu komunisme yang menorehkan catatan kelam sejarah negara Indonesia. Kekhawatiran akan bangkitnya ideologi komunisme menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat.
2. Dalam upaya menghadirkan Islam sebagai sarana peningkatan *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok, elite Muslim Indonesia menanggapi hal tersebut dengan beragam pandangan. Sebagian elite Muslim sepakat bahwa upaya itu bisa terwujud karena adanya kesamaan. Sebagian lain mengungkapkan bahwa ide tersebut memiliki peluang dengan memperhatikan beberapa aspek. Sebagian kecil elite Muslim memandang Islam tidak akan bisa menjadi sarana peningkatan *people-to-people connectivity* karena perbedaan ideologi kedua negara. Untuk memudahkan pemahaman secara utuh, identifikasi pandangan elite Muslim tersebut disajikan dalam bentuk Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pemetaan Pandangan Elite Muslim Indonesia Terkait Peluang dan Tantangan Islam Sebagai Sarana Peningkatan *People-to-People Connectivity* Antara Indonesia dan Tiongkok

IDENTIFIKASI RESPON INFORMAN	ISLAM SEBAGAI SARANA PENINGKATAN P2P INDONESIA – TIONGKOK	PELUANG	TANTANGAN
<p>Informan Tipe 1</p>	<p>Bisa, karena banyak kesamaan antara keduanya (sejarah, budaya, kepentingan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran pelajar, mahasiswa, guru, dosen • <i>Joint research</i> isu keagamaan, sosial budaya • Program <i>live-in</i> pelajar, mahasiswa, perwakilan ormas, komunitas • Pengajaran kurikulum bahasa Mandarin di madrasah dan PTKIN 2. Kerjasama Sosial Budaya <ul style="list-style-type: none"> • Perayaan festival budaya • Dialog titik temu Islam dan Konfusianisme • Pembentukan pelembagaan (kolaborasi masyarakat, ulama dan diaspora) • Penelusuran jejak peradaban Islam di kedua negara 3. Kerjasama Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran mubaligh dalam misi pengenalan Islam Indonesia • MTQ/MHQ dan event sejenis • Bedah kitab karya ulama kedua negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kerjasama yang saling menguntungkan, Harus <i>win-win</i>, bukan <i>win-lose</i> 2. Penguasaan bahasa 3. Provokasi eksternal 4. Literasi yang masih minim tentang Tiongkok di Indonesia 5. Tingkat kesejahteraan yang berbeda

		4. Kerjasama ekonomi Kerjasama bidang industri halal (keuangan, makanan, pariwisata, fashion)	
Informan Tipe 2	Bisa, tapi dengan syarat khusus	Peluang menjadi besar dengan catatan: 1. Penentuan segmentasi wilayah dan pasar 2. Tidak menonjolkan simbolisasi Islam, merumuskan kerjasama yang Islami, supaya bisa diterima pemerintah Tiongkok	1. Isu Komunisme 2. Isu HAM Muslim Uighur di Xinjiang 3. Isu radikalisme agama
Informan Tipe 3	Tidak bisa	Tidak ada peluang	Perbedaan ideologi antara kedua negara

Sumber: Diolah oleh tim riset

V.2 REKOMENDASI

Berdasar respon informan, pemutakhiran literatur, serta kondisi riil relasi Indonesia dan Tiongkok saat ini, maka tim peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi tindak lanjut dari penelitian ini. Rekomendasi yang diajukan adalah:

1. Relasi Indonesia dan Tiongkok dalam konteks *people-to-people connectivity* harus terus dipupuk dan dikembangkan, utamanya kerjasama di bidang pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan ekonomi.
 - a. Kerjasama Pendidikan dapat dibentuk dalam program: (1) pertukaran pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen; (2) riset bersama antar perguruan tinggi / lembaga riset, dengan berfokus pada isu keagamaan dan sosial budaya; (3) program *live-in* (hidup berdampingan) bagi mahasiswa, perwakilan ormas,

- komunitas; (4) pengajaran kurikulum Bahasa Mandarin di madrasah dan PTKIN
- b. Kerjasama Sosial dan Budaya dapat dibentuk dalam program: (1) pertukaran misi pengenalan Islam Indonesia oleh mubaligh, tokoh masyarakat, mahasiswa, siswa, guru, dosen di kedua negara; (2) pelaksanaan dialog tentang Islam dan Konfusianisme; (3) inisiasi pembentukan kelembagaan (kolaborasi pemerintah, masyarakat, ulama, dan diaspora); (4) pertukaran misi penelusuran jejak peradaban Islam di kedua negara
- c. Kerjasama keagamaan dapat dibentuk dalam program: (1) pertukaran mubaligh dalam misi pengenalan Islam Indonesia; (2) pengadaan dialog tentang kitab-kitab karya ulama di kedua negara
- d. Kerjasama ekonomi dapat dibentuk dalam program kerjasama pengembangan industri halal (keuangan, makanan, pariwisata, fashion)
2. Relasi Indonesia dan Tiongkok dalam konteks *people-to-people connectivity* hanya bisa berjalan bila ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Kombinasi ini harus sama-sama berjalan. Dengan kata lain, Indonesia harus memanfaatkan model *double-deck diplomacy*. Merujuk pada dari konsep diplomasi multijalur dan rantai nilai, model ini mensyaratkan adanya kekompakan antara pihak pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menjalankan misi diplomasi demi mewujudkan kepentingan nasional. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator dan promotor kegiatan diplomasi publik akan bersinergi dan bekerjasama dengan aktor non-negara yang juga memegang peranan penting, yakni tokoh masyarakat, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai lapisan masyarakat adalah poin krusial dalam model diplomasi ini. Upaya pemerintah saja tidak akan cukup karena keterbatasan interaksi antara pemerintah negara dengan masyarakat asing. Aktor non-negara seperti pemimpin agama/ulama, akademisi/peneliti, mahasiswa/pelajar, pengusaha, komunitas masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang memiliki modal

lebih baik dan dapat melanggengkan relasi sosial mereka dengan masyarakat asing karena tidak ada hierarki kekuatan (power) yang berada di antara mereka. Masyarakat yang sejatinya terpisah jarak dan waktu akan merasa “terhubung dan dekat” bila mereka bisa saling berinteraksi, ketimbang mempelajari satu sama lain melalui media sosial atau berita semata.¹⁷² Model sederhana dari double-deck diplomacy dapat dilihat dalam Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Model *Double deck Diplomacy*

Sumber: Diolah oleh tim riset

3. Pemanfaatan *platform* media digital harus dikembangkan dalam konteks *people-to-people connectivity* antara Indonesia dan Tiongkok. Diplomasi digital adalah keharusan bagi Indonesia bila ingin maksimal mencapai tahapan *influencing* (relasi jangka Panjang antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok). Kedua negara perlu merumuskan bentuk komunikasi yang efektif di era 4.0 dan terlebih lagi di era kenormalan baru. Pemerintah dan masyarakat di kedua negara harus mau saling belajar tentang teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam menjalankan

¹⁷² Kadir Jun Ayhan, “A Typology of People-to-People Diplomacy:”, diakses dari <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/typology-people-people-diplomacy>, tanggal 25 November 2020

kegiatan diplomasi publik. Pembukaan platform media digital sebagai wadah diskusi bersama antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok mungkin dapat menjadi opsi awal untuk dikembangkan di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR

PUSTAKA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Al-Qurtuby, Sumanto. "The Tao of Islam; Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslim in Pre-Modern Java", *Studia Islamika*, Vol.16 No.1. 2009.
- _____. *Arus Tiongkok-Jawa Islam, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI*. Yogyakarta: INTI. 2013.
- Amirrachman, A, Khoirudin, A, Nubowo, A (ed). *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, Bandung; Mizan. 2015
- Ansori, Feri. "Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Hubungan Sosial Budaya China-Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol.4, No.1. 2017
- Ayuningrum, Diah. "Akulturasi Budaya Cina dan Islam dalam Arsitektur Tempat Ibadah di Kota Lasem Jawa Tengah", *Jurnal Sabda*, Vol.12 No.2. 2017
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research, 12th edition*. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. 2010
- Barston, Ronald P. *Modern Diplomacy*. New York: Routledge. 2013.
- Berridge, G.R. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave. 2010.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Cox, B, Philpott, D. "Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent". *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*, Vol.1 No.2. 2003
- Elliott, L (ed). *Religion, Faith and Global Politics*. Canberra: Australian National University. 2006.
- Etikan, I, Musa, S.A, Alkassim, R.S. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. Vol. 5, No. 1, pp. 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11. 2016.
- Fealy, G, White, S. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS. 2008.
- Halbwachs, M. *Closer on Collective Memory*. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Johnston, Douglas. *Faith-based Diplomacy, Trumping Realpolitik*. New York: Oxford University Press. 2003
- Leight, Naomi (ed). *Essays of Faith Diplomacy*. Los Angeles: Figueroa Press. 2011.
- Leonard, M, Stead, C, Smewing, C. *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre. 2002.
- Manheim, Jarol B. *Strategic Public Diplomacy: The Evaluation of Influence*. New York: Oxford University Press. 1990.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik* (Terj.), Yogyakarta: Kanisius.1991

- Maulana, Rezza. *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa*. Yogyakarta: Impulse. 2010.
- Mellisen, Jan. *The New Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan. 2005.
- Mietzner, Marcus. *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Honolulu: East-West Center. 2015.
- Miles, M.B., Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terj.)*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Misztal, B.A. *Theories of Social Remembering*. London: Open University Press. 2003.
- NEAT Working Group. *NEAT Working Group on Enhancing People to People Connectivity Education, Tourism and Cultural Exchange Final Report*. 2014.
- Nye Jr, Joseph. "Public Diplomacy and Soft Power". *ANNALS, AAPSS*, 616. 2008.
- O'Leary, Z. *The Essential Guide to Doing Your Research Project, 2nd edition*. California: SAGE Publications. 2014.
- Rohman, A, Amaliyah, R. "Diplomasi Islam Indonesia-Tiongkok", *Insiera*, Vol.4, No.1. 2019.
- Sjamsudduha. *Sejarah Sunan Ampel, Guru Para Wali dan Perintis Pembangunan Kota Surabaya*. Surabaya: JP Press. 2004.
- Seib, Philip. *Religion and Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan. 2013.
- Sekretariat ASEAN. *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat. 2016.
- Sen, Tan Ta. *Cheng Ho and Islam in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS. 2009.
- _____. *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Sharp, Paul. *Diplomatic Theory of International Relations*. New York: Cambridge University Press. 2009
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta. 2009.
- Turpeau, Anne. "People to People Diplomacy", *World Affairs*, Vol.123, No.4. 1960
- Vernander, Benoit. "Sinicizing Religions, Sinicizing Religious Studies", *Journal of Religions*, Vo.10, No.2, pp.1-23, doi.org/10.3390/rel10020137, 2019
- Wuryandari, Ganewati (ed.). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Xu, Yihua. "Religion and International Relations in the Age of Globalization", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.6 No.4. 2012.
- _____. "Religion and China's Public Diplomacy in the Era of Globalization", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol.9 No.4. 2015.
- Sinaga, L.C. *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2013.
- Zuhri, Ahmad Syaifuddin, dkk. *Islam, Indonesia dan China; Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok*. Yogyakarta; Aswaja Nusantara Press, 2019

Wawancara/FGD

Abdul A'la, *Wawancara*, 21 September 2020

Abdulloh Yazid, *Wawancara*, 20 Oktober 2020

AH. Rofiuddin, *Wawancara*, 22 Oktober 2020
 Akhmad Muzakki, *Wawancara*, 1 Oktober 2020
 Dahlan Iskan, *Wawancara*, 22 September 2020
 Dicky Sofjan, *Wawancara*, 7 Oktober 2020
 Eko Siswanto, *Wawancara*, 24 September 2020
 Fisher Zulkarnain, *Wawancara*, 15 September 2020
 Grace Lestariana Wonoadi, *Wawancara*, 1 November 2020
 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Wawancara*, 13 Oktober 2020
 Hariyanto, *Wawancara*, 19 September 2020
 Hasib Wahab Hasbulloh, *Wawancara*, 12 Oktober 2020
 HMY Bambang Sujanto. *Wawancara*. 5 Januari 2020
 Iskandar Chang, *Wawancara*, 12 Januari 2020
 Jona Widagdho Putri, *Wawancara*, 22 Oktober 2020
 Mahdi, *Wawancara*, 20 September 2020
 Merry Efendi, *Wawancara*, 22 Oktober 2020
 Nurawi, *Wawancara*, 22 September 2020
 Qoyyum, *Wawancara*, 16 Oktober 2020
 Santo Darmosumarto, *Focus Group Discussion*, 23 November 2020
 Tiar Anwar Bachtiar, *Wawancara*, 19 September 2020
 Wahidah Zein Siregar, *Wawancara*, 25 September 2020
 Yudi Latif, *Wawancara*, 6 Oktober 2020
 Zaim Ahmad Ma'shoem, *Wawancara*, 20 Oktober 2020

Artikel Online

Ari Welianto, "Teori Masuknya Islam di Nusantara", diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/01/120000769/teori-masuknya-islam-di-nusantara?page=all>, tanggal 20 November 2020
 David Ahlstrom, "Time for China to Accept It Is No Longer a Developing Country", diakses dari <https://asia.nikkei.com/Opinion/Time-for-China-to-accept-it-is-no-longer-a-developing-country>, tanggal 19 November 2020
 Jeffrey Hutton, "A Catch-22 from China that could derail Indonesia's Widodo", diakses dari <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2145806/catch-22-china-could-derail-indonesias-widodo>, tanggal 20 November 2020
 Kadir Jun Ayhan, "A Typology of People-to-People Diplomacy:", diakses dari <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/typology-people-people-diplomacy>, tanggal 25 November 2020
 "Bahasa Mandarin Makin Populer di Indonesia", Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/bahasa-mandarin-makin-populer-di-indonesia-5627047.html>, tanggal 22 November 2020
 "Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-Cina", Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/324-memaknai-tahun-persahabatan-indonesia-cina->

- “Relasi Indonesia-China di Era Jokowi: Mau Tapi Malu, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191017121413-106-440311/relasi-indonesia-china-di-era-jokowi-mau-tapi-malu>, tanggal 20 November 2020
- “RI-China Teken Kerja Sama Pelatihan Buruh”, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4839455/ri-china-teken-kerja-sama-pelatihan-buruh>, tanggal 21 November 2020
- “Pengamat: Pastikan Kerjasama RI-China Buka Lapangan Kerja Lokal”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1540192/pengamat-pastikan-kerja-sama-ri-china-buka-lapangan-kerja-lokal>, tanggal 21 November 2020
- “Tingkatkan Kerjasama Investasi dan Pariwisata RI-China KBRI Beijing Gelar Forum Bisnis, diakses dari <https://rmco.id/baca-berita/internasional/18559/tingkatkan-kerja-sama-investasi-dan-pariwisata-richina-kbri-beijing-gelar-forum-bisnis>, tanggal 25 November 2020
- “Pariwisata Indonesia Tiongkok Diyakini Kembali Bangkit Usai Pandemi”, diakses dari <https://www.jawapos.com/internasional/18/09/2020/pariwisata-indonesia-tiongkok-diyakini-kembali-bangkit-usai-pandemi/>, tanggal 25 November 2020
- “Turis Asal China Bisa Pulihkan Pariwisata Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, Tujuan Favoritnya Bali, diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/07/18/turis-asal-china-bisa-pulihkan-pariwisata-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19-tujuan-favoritnya-bali>
- “Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, Dari Indonesia Untuk Dunia”, diakses dari <http://presidenri.go.id/internasional/islam-nusantara-dan-islam-berkemajuan-dari-indonesia-untuk-dunia.html>, tanggal 5 September 2020 “Five-Year Planning Outline for Persisting in the Sinification of Islam (2018-2022)”, diakses dari <https://www.chinalawtranslate.com/en/islamsinificationplan/>, tanggal 15 September 2020
- “Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, Dari Indonesia Untuk Dunia”, diakses dari <http://presidenri.go.id/internasional/islam-nusantara-dan-islam-berkemajuan-dari-indonesia-untuk-dunia.html>] tanggal 5 September 2020
- “Berapa Jumlah Pelajar Indonesia di Tiongkok?”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/21/berapa-jumlah-pelajar-indonesia-di-tiongkok>, tanggal 5 September 2020
- “Kunjungi Masjid Niujie Beijing, Gus Dur Pertama Jokowi Kedua”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/875261/kunjungi-masjid-niujie-beijing-gus-dur-pertama-jokowi-yang-kedua/full&view=ok>] tanggal 5 September 2020
- “SMA Nurul Jadid Jadi Penyelenggara Ujian Bahasa Mandarin Berstandar Internasional”, diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/160570/sma-nurul-jadid-jadi-penyelenggara-ujian-bahasa-mandarin-berstandar-internasional>, tanggal 30 Oktober 2020

“New Indonesian-Chinese Studies Center Inaugurated in Wuhan”, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/27/new-indonesian-chinese-studies-center-inaugurated-in-wuhan.html>, tanggal 17 September 2020

“Wisatan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2015-2019”, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/04/07/1794/wisatawan-mancanegara-yang-datang-ke-indonesia-menurut-kebangsaan-2015-2019.html>, tanggal 20 September 2020

“May Day 2019 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat”, diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat>, tanggal 20 September 2020

“Jokowi: TKI di Tiongkok Malah 80.000 Lebih di Sana yang Antek Indonesia”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/12422721/jokowi-tki-di-tiongkok-malah-80000-lebih-di-sana-yang-antek-indonesia>, tanggal 20 September 2020



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A